

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

EDUKASI

K E U A N G A N

www.bppk.depkeu.go.id

Edisi 10/2012

PROFIL
Drs. Endang Tata



APBN 2012



SERAMBI ILMU
Emas:
Stay, In, or Out?



GERAI BPPK
Perjalanan
Transformasi BPPK



**NOW AVAILABLE
ON MOBILE VERSION**

Grab the latest Training Info on your gadget



Log on to
www.bppk.depkeu.go.id

Social Media BPPK:



Find Us on Facebook
facebook.com/bppk.kemenkeu



Follow Us on Twitter
[@BPPKkemenkeu](https://twitter.com/BPPKkemenkeu)
[@BPPKlive](https://twitter.com/BPPKlive)

Daftar Isi

3 LIPUTAN UTAMA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

APBN 2012 Mendamba Kemakmuran dalam Ancaman Krisis Global

22 GERAJ BPPK

Perjalanan Transformasi BPPK

PROFIL 15

Drs. Endang Tata:
Berawal di Kapal Patroli
Berlabuh di Bojana Tirta

PENGAWASAN IMPORTASI PREKURSOR

48 SERAMBI ILMU



Liputan Utama	3
Profil	15
Liputan Khusus	20
Gerai BPPK	22
Serambi Ilmu	33
Selasar Alumni	51
Mata Air	52
Klinik Sehat	54
Pojok IT	55
Info Diklat	58
Resensi Buku	60
Kang Edu	62
Galeri BPPK	63

Salam Redaksi

Tahun 2012 menjadi tahun transformasi bagi BPPK. Imbas dari transformasi ini merembet pada Majalah Edukasi Keuangan. Pada tahun 2012, terjadi perubahan pada Majalah Edukasi Keuangan. Mulai dari kepengurusan terutama Dewan Redaksi hampir seluruhnya dipunggawai oleh Pejabat Fungsional (Widyaiswara, Pranata Komputer, Dokter). Di samping itu konten dari Majalah Edukasi juga mengalami transformasi yang lebih mengarah kepada pengayaan informasi tentang edukasi keuangan negara pada unit-unit eselon I di Kementerian Keuangan (di luar BPPK). Demikian juga informasi terkait dengan BPPK dipilih informasi yang terkini dan terpenting untuk disajikan kepada pembaca yang budiman.

Edisi perdana di tahun 2012 (edisi 10) ini, mengusung tema utama tentang seluk-beluk APBN 2012, mulai dari kebijakan terkait asumsi makro, penerapan tiga pilar reformasi penganggaran, serta kebijakan subsidi BBM 2012. Liputan khusus mengangkat informasi tentang *Education and Training Expo 2012* yang diikuti oleh BPPK Kementerian Keuangan.

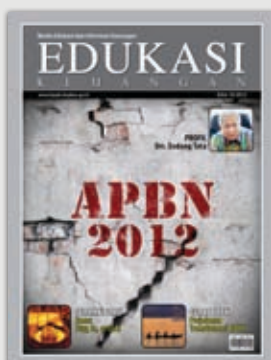
Informasi tentang Transformasi BPPK juga menjadi sajian penting pada rubrik Gerai BPPK. Dilengkapi dengan artikel tentang makna suatu perubahan. Untuk memberikan inspirasi kepada pembaca yang budiman, maka profil yang diangkat untuk edisi kali ini adalah Bapak Endang Tata (Kapusdiklat Bea dan Cukai). Kolom Serambi Ilmu kini terbagi menjadi dua yaitu artikel tentang hasil kajian (riset) dan artikel tentang edukasi keuangan negara. Artikel dengan judul Peran DJBC sebagai *Community Protector* Dalam Pengawasan Importasi Prekursor, menjadi pilihan tentang hasil kajian. Sedangkan untuk artikel terkait dengan edukasi keuangan negara, menyajikan beberapa tulisan diantaranya permasalahan tentang e-Rekon untuk BMN, Analisis Pengalihan PBB P2 Menggunakan CPM & PERT, dan Investasi Emas: (*In, Stay, or Out?*).

Kolom selasar alumni mengunggah informasi tentang testimoni dari peserta DBK IV. Rubrik baru yaitu mata air, diharapkan dapat menjadi pewarna dan penyejuk bagi para pembaca yang budiman, kali ini artikel yang dimuat berjudul Menyikapi Kegagalan. Kolom baru lainnya yaitu kolom kesehatan, secara khusus tenaga fungsional kesehatan (dokter) di lingkungan BPPK akan secara berkelanjutan mengisi rubrik ini dan edisi 10 menyajikan info kesehatan tentang waspada hipertensi.

Mengikat perkembangan IT yang terus tak terbendung, khususnya perkembangan IT di lingkungan BPPK, maka dirasa perlu untuk menyediakan ruang khusus yang menyajikan informasi tentang IT. Para pranata komputer, menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk rubrik ini. Edisi kali ini pojok IT menghadirkan tulisan tentang mengenal *Video on Demand* BPPK. Beberapa artikel lain yang melengkapi edisi kali ini yaitu, resensi buku tentang pemikiran Anggito Abimanyu, informasi tentang diklat dan foto-foto terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh BPPK.

Demikian sajian edisi kesepuluh majalah Edukasi. Redaksi beserta jajarannya terus berupaya untuk melakukan perbaikan ke depan baik terkait kualitas informasi edukasi keuangan maupun ketepatan waktu terbit. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kebaikan penerbitan edisi-edisi selanjutnya. Kami tetap berupaya untuk mewujudkan sebuah kata Transformasi.

Susunan Redaksi



Penasehat Kepala BPPK

Pengarah

Kapusdiklat PSDM
Kapusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan
Kapusdiklat Bea dan Cukai
Kapusdiklat Pajak
Kapusdiklat KNPK
Kapusdiklat Keuangan Umum
Direktur STAN
Penanggung Jawab
Sekretaris BPPK
Pemimpin Umum
Iqbal Soenardi

Pemimpin Redaksi

Tanda Setiya
Redaktur
Surono
Sampurna Budi Utama
Noorcholis Madjid
Andy Prasetyawan Hamzah
Heru Supriyanto
Agus Hekso Pramudijono
Eduard Tambunan
M. Ichsan
Pilar Wirotama
Gathot Subroto
Pemimpin Harian
Setyawan Dwi Antoro

Penyunting/Editor

Wawan Ismawandi
Romy Setiawan
Sera Betania
Yohana Tolla
Fotografer
Eros Lassa Mursalin
Layout/Desain Grafis
Muhammad Fath Kathin
Riko Febrialdo
Victorianus M. I. Bimo Adi
Sekretariat
Alyn Dwi Setyaningrum
Diah Nofita Rini
Hendra Putra Irawan

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam *huruf Arial 11 spasi 1,5* maksimal 5 halaman. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@gmail.com. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7244873 Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.depkeu.go.id>



Sumber: www.awesomestories.com

APBN 2012: Mendamba Kemakmuran dalam Ancaman Krisis Global

OLEH : NOOR CHOLIS MADJID

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

APBN 2012 disusun dengan berpedoman pada Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012. Selain di bawah ancaman krisis ekonomi global RAPBN juga sempat melewati “drama politik” yang ditandai dengan adanya ancaman dari sebagian anggota Badan Anggaran DPR untuk menghentikan pembahasan RAPBN. Akhirnya RAPBN 2012 disepakati untuk menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR pada hari Jumat

tanggal 28 Oktober 2011.

APBN 2012 difokuskan untuk mendanai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 yang meliputi 11 prioritas nasional, yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, dan pasca-konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Asumsi Ekonomi Makro	RAPBN 2012	Kesepakatan dengan DPR
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,7	6,7
Inflasi (%)	5,3	5,3
Nilai Tukar Rupiah (Rp/Dollar)	8.800	8.800
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bln (%)	6,5	6,0
Harga Minyak (Dollar/barrel)	90,0	90,0
Lifting minyak (ribu barrel/hari)	950	950

Catatan : SPN adalah Surat Perbendaharaan negara (SPN) diproyeksikan menggantikan fungsi Sertifikat Bank Indonesia

Hasil Kesepakatan Pemerintah dan DPR

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika, Eropa dan Asia, target pertumbuhan ekonomi 6,7 % terlihat cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat diperlukan bagi Indonesia untuk mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus didorong APBN yang ekspansif melalui tambahan belanja dan juga harus memperhatikan kualitas, bukan semata penyerapan anggaran.

Namun perlu disadari bahwa pemerintah tidak mungkin sendirian mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, peran swasta terutama dari sisi konsumsi masyarakat, investasi swasta dan ekspor tetap menjadi penentu utama pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu menjadi tantangan bagi seluruh aparat pemerintah untuk mengelola anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga sehingga mampu menstimuli pertumbuhan dengan optimal.

Target Ekonomi Indonesia

Pro Growth, Pro Job, Pro Poor senantiasa menjadi mantra dalam penyusunan APBN. *Pro growth* atau APBN harus mampu mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini biasanya senantiasa menempati posisi pertama

karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional suatu Negara meningkat. Dengan adanya peningkatan PDB maka berarti akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap atau akan terwujud kondisi terciptanya lapangan kerja dalam jumlah yang besar (*pro job*) dan pengangguran menurun. Dengan terciptanya kondisi dimana pengangguran turun maka dapat dipastikan kemiskinan juga akan berkurang (*pro poor*).

Penentu utama pertumbuhan ekonomi adalah investasi, konsumsi masyarakat. Pengeluaran/konsumsi Pemerintah dan ekspor. Ketika investasi tumbuh maka akan mendorong terciptanya lapangan kerja. Ketika semua orang bekerja dan memiliki daya beli yang tinggi akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa yang berarti juga akan mendorong pengusaha untuk menambah investasi dan selanjutnya akan mendorong penciptaan tenaga kerja (hubungan timbal balik). Permintaan dari luar negeri (berarti peningkatan ekspor) juga akan memberikan efek yang sama terkait investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pengeluaran pemerintah (tercermin dalam APBN) pada hakekatnya adalah konsumsi sehingga juga akan memberikan efek yang sama seperti konsumsi masyarakat.

Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi maka APBN harus diarahkan untuk menyediakan infrastruktur yang memadai. Dengan adanya infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik dan gas maka diharapkan investor swasta tidak segan menginvestasikan dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kebijakan baru ini adalah langkah terobosan strategis, untuk melengkapi strategi pembangunan yang bersifat sektoral dan regional. Dalam rancang bangun MP3EI itu digunakan tiga strategi besar, yaitu:

1. mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia, yang meliputi: koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan koridor Papua-Maluku;
2. memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional; dan
3. mempercepat kemampuan SDM dan IPTEK, untuk mendukung pengembangan program utama, dengan meningkatkan nilai tambah di setiap koridor ekonomi.

Pengembangan keenam koridor ekonomi itu kita harapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah. Pendanaan kegiatan MP3EI dilakukan melalui keterpaduan pendanaan dari APBN, APBD, BUMN, serta pihak swasta dan masyarakat. Pelaksanaan MP3EI ini semaksimal mungkin memberikan peran yang besar kepada pelaku usaha domestik dan sumberdaya dalam negeri.



Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi maka APBN harus diarahkan untuk menyediakan infrastruktur yang memadai. Dengan adanya infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik dan gas maka diharapkan investor swasta tidak segan menginvestasikan dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi

Jangan Lupakan Pemerataan

Perdebatan yang tidak kalah menarik terkait target ekonomi suatu Negara adalah pemerataan. Pada masa orde baru *trickle down effect* (efek menetes ke bawah) dianggap otomatis akan tercipta. Namun bukti empiris menunjukkan tanpa campur tangan yang tegas dari Negara, pemerataan akan berjalan dengan lambat. Ketimpangan ekonomi yang menyolok dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama akan membuat rakyat menjadi tidak sabar dan akan terjadi instabilitas. Telah banyak pemerintah yang jatuh karena ketidakmampuan mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Pertanyaannya adalah apakah ekonomi ditumbuhkan terlebih dahulu baru diratakan ataukah lebih penting ekonomi merata dan tumbuh bersama meskipun lambat?. Pilihan dari kebijakan tersebut pada hakekatnya akan mencerminkan aliran pemikiran ekonomi suatu negara apakah konsep kapitalis yang akan dikedepankan yaitu dengan mendorong ekonomi tumbuh setinggi-tingginya, mendorong individu bersaing dengan bebas dan selanjutnya bagi yang kalah akan dilindungi oleh negara melalui jaminan sosial. Pilihan lain datang dari kaum sosialis dimana negara campur tangan dalam banyak hal untuk mengatur ekonomi dengan tujuan menghindari kesenjangan sosial.

Indonesia adalah Negara Pancasila dan salah satu poin penting dari Pancasila adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka seharusnya orientasi kita adalah kemakmuran yang berkeadilan. Selama ini pemerintah berusaha untuk menciptakan kondisi tersebut melalui belanja bantuan sosial

Komponen Utama APBN 2012

Penerimaan	1.311,4
Belanja	1.435,4
Defisit Anggaran	(125,6)



Sumber: radicaljournalism.com

JURUS MENGHADAPI BADAI KRISIS

Untuk mengantisipasi terjadinya dampak buruk penurunan ekonomi global, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah pengamanan. Dalam Undang Undang APBN 2012 ditegaskan panduan manajemen krisis (*crisis management protocol*) sebagai antisipasi gejala krisis global antara lain:

1. Jika terjadi krisis pasar Surat berharga Negara (SBN) domestik, pemerintah dengan persetujuan DPR diberikan kewenangan menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) dalam rangka stabilisasi pasar SBN;
2. Dalam keadaan darurat, pemerintah dengan persetujuan DPR dapat melakukan enam langkah strategis mitigasi krisis yaitu:
 - Melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan atau belanja melebihi pagu yang sudah ditetapkan dalam APBN,
 - Melakukan pergeseran anggaran belanja antar program, antar kegiatan dan/atau antarjenis belanja;
 - Mengurangi pagu belanja untuk efisiensi dengan tetap menjaga pencapaian berbagai sasaran program prioritas;
 - Penggunaan SAL guna menutup kekurangan pembiayaan APBN;
 - Penerbitan SBN melebihi pagu yang sudah ditetapkan;
 - Mencari alternatif sumber pembiayaan yang berasal dari kreditur bilateral maupun multilateral.

dan subsidi namun selalu muncul pertanyaan apakah itu semua sudah cukup? Apakah telah tepat sasaran? (akan kita bahas dalam artikel mendatang).

Bagaimana Krisis Global Menyebar ke Indonesia?

Dimulai dari krisis utang Yunani selanjutnya ekonomi dunia dilanda berbagai guncangan. Kondisi ini dapat berpengaruh pula pada perekonomian di negara kita. Akibat krisis, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju hampir pasti akan melambat, bila dibandingkan dengan pertumbuhannya di tahun lalu. Perekonomian Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris dan Negara-negara maju yang lain diprediksi akan tumbuh melambat. Krisis keuangan yang melanda Eropa; meningkatnya inflasi dan risiko *overheating* perekonomian di Tiongkok dan India; serta krisis fiskal yang tidak diatasi dengan tuntas di Amerika Serikat baru-baru ini, merupakan risiko tambahan bagi perekonomian dunia tahun ini dan tahun depan.

Bagaimana krisis global mempengaruhi perekonomian Indonesia? Salah satu hal yang menjadi tanya bagi sebagian besar rakyat negeri ini adalah bagaimana krisis yang bermula di benua Eropa akan mempengaruhi ekonomi Indonesia? Di tengah perekonomian dunia yang semakin mengglobal, kondisi perekonomian pada salah satu belahan dunia akan mempengaruhi negara yang lain. Transmisi pergeseran krisis dari Eropa ke Indonesia secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelemahan Impor Eropa. Ketika sebuah kawasan mengalami krisis ekonomi maka daya beli masyarakat di kawasan tersebut melemah. Karena daya beli mereka melemah maka konsumsi mereka atas barang-barang dari Negara lain (termasuk Indonesia) akan berkurang. Karena permintaan impor dari Eropa berkurang maka produsen di negara-negara yang mempunyai pasar benua Eropa akan mengurangi produksi. Pelemahan ekonomi di Eropa akan diikuti negara-negara lain yang mem-

punya hubungan ekonomi dengan Eropa seperti Jepang, China, India, Amerika, Australia dll. Ketika para raksasa ekonomi dunia tersebut mulai goyah, permintaan barang dan jasa terhadap Indonesia juga akan menurun, produsen Indonesia mengurangi produksi dan mengurangi permintaan tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja berarti menyebabkan pengangguran akan bertambah.

2. Pengurangan Investasi ke Indonesia. Selain dari sisi Konsumsi yang melemah dan selanjutnya akan menurunkan ekspor Indonesia ke Negara-negara tersebut. Pengaruh negatif krisis juga datang dari sisi Investasi. Dengan adanya krisis, maka investasi negara-negara Eropa dan juga negara-negara yang terpengaruh krisis akan berkurang atau malahan investasi yang sudah mereka jalankan di Indonesia menjadi bangkrut. Ketika investasi berkurang maka terjadi pengurangan tenaga kerja sehingga pengangguran di Indonesia akan meningkat. Karena ketiadaan Investasi maka pertumbuhan ekonomi Indonesia terganggu, kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi berkurang, dan kemiskinan meningkat.

Kecepatan, Ketepatan, Keberanian dan Jaminan Politik

Sejarah memberikan pelajaran bagi pengambil kebijakan dalam menghadapi badai krisis global harus diambil kebijakan yang cepat, tepat, tegas dan tidak ragu-ragu. Pengalaman krisis 1997/1998 memberi pelajaran bagi bangsa ini, terlalu percaya diri dengan fundamental ekonomi yang “konon” kokoh ternyata tidak cukup. Ketika krisis mulai melanda Asia, Pemerintah Orde Baru pada masa itu sangat yakin ekonomi Indonesia akan kuat bertahan. Akibatnya antisipasi terhadap krisis menjadi lamban dan kita semua tahu, krisis tersebut tidak hanya menyapu perekonomian Indonesia tetapi juga sebuah pemerintahan yang telah berkuasa dengan kokoh selama kurang lebih 32 tahun.



Krisis ekonomi 2008 dan 2009 memberi pelajaran yang lain bagi pemerintah kita. Ketika krisis perekonomian mulai terasa pemerintah dengan cepat bereaksi dan terbukti krisis 2008/2009 tidak sampai menggoyahkan perekonomian Indonesia meskipun negara-negara tetangga semua merasakan akibatnya. Namun ada persoalan yang sampai sekarang dianggap belum selesai yaitu kebijakan pemerintah terhadap “bail out” bank Century. Meskipun tindakan pemerintah tersebut diyakini sebagai upaya antisipasi krisis namun akibat politiknya belum terselesaikan sampai saat ini.

Penanggulangan krisis adalah bagian dari kebijakan publik. Sifat dari kebijakan publik adalah *loss function* yaitu biaya atau investasi yang dilakukan tidak akan menghasilkan pengembalian material (uang) secara langsung. Kebijakan publik menuntut biaya yang sangat besar dan “*at all cost*” semua harus ditanggung pemerintah. Keberhasilan kebijakan publik dinilai dari besarnya kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari kebijakan tersebut atau berapa kerugian yang dapat dihindari. Stabilitas ekonomi adalah sedikit hal yang termasuk sangat penting untuk diperjuangkan berapapun biayanya.

Ketika suatu kebijakan publik harus diambil secara tepat dan cepat harus ada jaminan bagi pejabat pengambil kebijakan dari tuntutan hukum di kemudian hari. Hanya apabila kebijakan tersebut terbukti diikuti oleh korupsi, kolusi dan nepotisme maka pelaku KKN-nya yang harus diusut bukan pengambil kebijakan.

Tanpa ada perlindungan politik yang cukup maka tidak akan ada yang berani mengambil kebijakan secara cepat dan tepat dengan biaya yang sangat besar. Dan apabila keputusan terlambat dieksekusi krisis ekonomi mungkin akan meluluhlantakkan semua yang sudah kita punya dan tidak mustahil sejarah pahit tahun 1998 kembali terulang. Semoga bangsa ini telah cukup belajar dari sejarah masa lalu dan tidak terjerumus dalam lubang yang sama.

Simpulan

APBN 2012 disusun untuk mendanai RKP 2012 dengan tetap fokus pada usaha-usaha untuk mendukung kebijakan *Pro Growth*, *Pro Job* dan *Pro Poor*. Namun harus disadari pada 2012 badai krisis akibat utang Yunani dan penyelesaian krisis *subprime mortgage* yang belum tuntas di USA mengancam perekonomian dunia termasuk Indonesia. Pemerintah berusaha mensinkronkan antara keinginan pencapaian target-target pembangunan dan keamanan perekonomian dari krisis. Pemerintahan yang transparan, kredibel dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Negara serta memahami tantangan ekonomi global yang akan mampu membawa APBN 2012 mencapai tujuannya.

Maju terus Indonesia !!!

*Penulis adalah Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Sumber: www.bhasafm.com

Kebijakan Subsidi BBM, akan Berujung Kemana?

OLEH : NOOR CHOLIS MADJID

Isu paling hangat terkait kebijakan publik di awal tahun 2012 pastilah kebijakan subsidi BBM. Berdasarkan Undang-Undang APBN 2012 pemerintah Indonesia harus melakukan pembatasan subsidi BBM tanpa ada opsi menaikkan harga BBM.

Secara umum pengeluaran negara dapat dikelompokkan dalam kelompok belanja barang dan jasa yang berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, serta subsidi (*government transfer payment*) yang merupakan alat kebijakan pemerintah untuk redistribusi dan stabilisasi.

Pengeluaran berupa subsidi tersebut akan membawa pengaruh terhadap efisiensi ekonomi, perilaku individu,

serta pemerataan pendapatan. Sementara, secara makro, pengeluaran pemerintah akan berdampak pada stabilitas ekonomi (khususnya stabilitas harga), permintaan agregat, serta pertumbuhan.

Menurut Investopedia (2012), *subsidy is a benefit given by the government to groups or individual usually in the form of a cash payment or tax reduction. The subsidy is usually given to remove some type of burden and is often considered to be interest of the public.*

Government Financial Statistics (2001) mendefinisikan subsidi sebagai pengeluaran rutin yang tidak dikembalikan dan dilakukan oleh unit instansi pemerintah kepada perusahaan yang didasarkan pada tingkat kegiatan produksi atau kuantitas atau nilai atas barang dan jasa yang diproduksi, dijual, diekspor atau diimpor. Subsidi tersebut diberikan untuk mempengaruhi tingkat produksi, tingkat harga jual barang, atau keuntungan perusahaan, yang dapat dibayar untuk barang-barang khusus atau pada barang-barang secara umum.

Hal yang menjadi khas dari subsidi menurut konsep GFS adalah dibayarkan hanya kepada produsen, tapi tidak kepada konsumen terakhir, karena sifatnya hanya merupakan transfer rutin, bukan transfer modal.

Dengan tidak stabilnya harga minyak internasional maka besaran subsidi dalam APBN seringkali melampaui pagu yang ada. Akibatnya APBN menjadi terbelenggu dan sulit untuk mengalokasikan dana bagi kegiatan pembangunan di bidang lain seperti pembangunan infrastruktur maupun pengeluaran yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Penerapan subsidi harga seperti dalam kasus BBM sekarang menimbulkan dua kemungkinan :

1. jumlah konsumen tetap tetapi jumlah yang dikonsumsi menjadi lebih banyak. Dalam kasus subsidi, harga mempunyai resiko tidak tepat sasaran yang tinggi, karena akan mendorong konsumen mampu untuk “memborong” barang bersubsidi, sehingga akan terjadi mis-alokasi subsidi dan konsumsi yang berlebih.
2. jumlah konsumen bertambah sehingga secara otomatis jumlah yang dikonsumsi menjadi lebih banyak. Dalam kasus ini, subsidi harga mempunyai tingkat tepat sasaran yang lebih baik. Namun demikian, perlu diberikan kebijakan yang dapat membatasi terhadap jumlah yang dikonsumsi oleh konsumen lama.

Subsidi BBM Kenapa Harus Dibatasi?

Subsidi dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama menjadi beban tersendiri bagi pemerintah karena di samping subsidi masih banyak kegiatan pemerintahan yang memerlukan dana yang besar. Ketergantungan perekonomian terhadap subsidi juga diyakini menimbulkan inefisiensi dan akhirnya dengan berjalannya waktu subsidi tidak semata terkait masalah ekonomi namun juga terkait masalah sosial dan politik.

Berdasarkan catatan dari tahun ke tahun nilai subsidi BBM dalam APBN Indonesia senantiasa terus meningkat. Peningkatan subsidi yang sedemikian pesat dirasakan mengganggu sustainability dari APBN. Dengan tidak stabilnya harga minyak internasional maka

membuat harga barang dan jasa domestik menjadi “artifisial” yang seolah-olah kompetitif terhadap barang impor. Subsidi juga dianggap mendistorsi pasar, dan dari sisi pemerintah subsidi menimbulkan biaya ekonomi yang besar dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan efek ketidakmandirian bagi bangsa.

Adalah fakta tidak ada Negara di muka bumi yang benar-benar menghapuskan belanja subsidi dari APBN-nya karena subsidi juga diyakini sebagai salah satu “katup pengaman” terhadap gejolak politik dan sosial. Hampir seluruh pemerintah di muka bumi mengakui salah satu kewajiban Negara adalah memberikan perlindungan kepada warganya yang “kalah” dalam persaingan dalam sistem pasar dan perwujudan perlindungan bagi mereka yang kalah tersebut adalah subsidi.

Permasalahannya adalah sejauh mana sebuah kebijakan subsidi telah dijalankan dengan tepat dan sesuai konsep awalnya yaitu untuk melindungi mereka yang “tersingkir dan kalah” tanpa harus mendistorsi pasar dan menimbulkan permasalahan baru? Apakah subsidi yang digelontorkan oleh Negara benar-benar jatuh kepada mereka yang “kalah dan tersingkir”? Dan apakah benar subsidi telah membuat APBN menjadi sangat terbebani...?.

Pembatasan Subsidi Kenapa Ditentang?

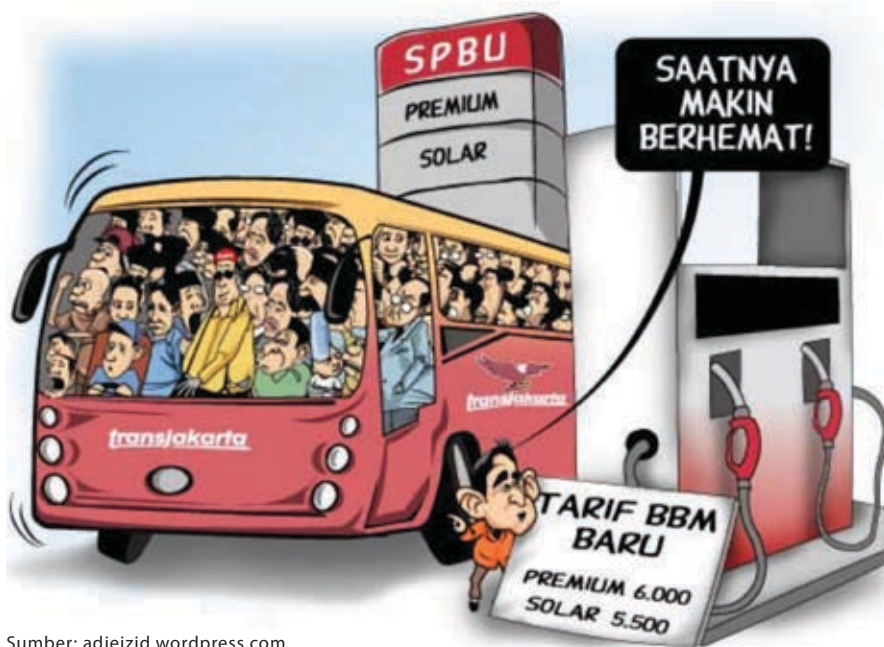
Penentangan yang sedemikian hebat terhadap pembatasan subsidi dengan cara konversi ke Bahan Bakar Gas dan subsidi BBM hanya untuk kendaraan umum dan kendaraan roda dua antara lain dipicu oleh:

• Keterbatasan SPBG

Apabila kebijakan pembatasan BBM dilaksanakan pada 1 April dan kepada masyarakat pengguna (pemilik kendaraan roda 4 atau lebih dan angkutan umum) diberi pilihan untuk mengkonversi bahan bakarnya ke gas atau kalau tidak bersedia mengkonversi ke gas maka harus menggunakan premium. Namun pada kenyataannya konversi ke gas akan

besaran subsidi dalam APBN seringkali melampaui pagu yang ada. Akibatnya APBN menjadi terbelenggu dan sulit untuk mengalokasikan dana bagi kegiatan pembangunan di bidang lain seperti pembangunan infrastruktur maupun pengeluaran yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat banyak. Melihat kenyataan sumber daya APBN yang terbatas maka pilihan untuk membatasi subsidi BBM menjadi pilihan yang sangat rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Apalagi subsidi BBM diakui tidak tepat sasaran karena lebih banyak jatuh kepada masyarakat yang seharusnya tidak perlu disubsidi.

Bagi pengusung paham perekonomian pasar bebas, subsidi yang tidak tepat adalah “dosa” yang harus dihindari karena subsidi dianggap sebagai bentuk hambatan proteksionisme. Subsidi



Sumber: adjeizid.wordpress.com

menimbulkan masalah baru terkait dengan ketersediaan bahan bakar gas dan stasiun penjualan BBG. Ketika stasiun BBG jumlahnya terbatas maka otomatis pengguna kendaraan tidak berminat beralih ke gas karena khawatir kalau sewaktu-waktu memerlukan BBG padahal di sekitar tempat dia berada tidak tersedia.

- **Keterbatasan SPBU**

Tidak semua SPBU Pertamina didesain untuk menjual pertamax dan untuk mengubah SPBU non pertamax menjadi SPBU pertamax diperlukan investasi baru.

- **Kapasitas Tangki Pertamax**

Kemampuan Pertamina menyediakan pertamax ternyata terbatas. Pertamina belum mampu menyediakan pertamax dalam jumlah yang mencukupi seandainya terjadi migrasi bahan bakar ke pertamax secara besar-besaran. Kondisi ini diindikasikan hanya akan menguntungkan SPBU asing yang beroperasi di Indonesia.

- **Converter Kit**

Indonesia belum mampu memproduksi *converter kit* secara massal. Sehingga apabila ada permintaan

converter kit besar-besaran karena migrasi ke BBG maka harus impor *converter kit* dalam jumlah yang besar. Kondisi ini sangat dilematis karena *converter kit* sebenarnya bukanlah produk yang bersifat teknologi tinggi dan tidak mampu dikuasai anak bangsa. Permasalahannya hanyalah karena pabrik di Indonesia belum mampu memproduksi secara massal dan dalam waktu yang singkat.

- **Biaya Pengawasan.**

Apabila pembatasan subsidi dipilih dengan cara mewajibkan mobil berplat hitam harus menggunakan BBM non subsidi dan kendaraan roda dua diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi, maka diperlukan pengawasan khusus terhadap SPBU yang tersebar di seluruh pelosok negeri agar mereka menjual BBM bersubsidi hanya kepada yang berhak. Kondisi ini diperkirakan akan menimbulkan kerawanan di bidang sosial dan keamanan. Selain itu model pembatasan seperti ini juga masih sangat rawan bocor, baik itu disebabkan lemahnya pengawasan maupun penyelundupan yang masih sulit diberantas.

Simpulan

Pada prinsipnya semua pemangku kepentingan menyadari bahwa era subsidi BBM bagi semua harus diakhiri. Subsidi yang tidak tepat sasaran selama ini dianggap akan membahayakan perekonomian nasional di masa mendatang. Namun pilihan untuk mengurangi subsidi memerlukan persiapan yang cukup dan perhitungan yang matang. Kebijakan pembatasan subsidi tanpa persiapan yang matang ditengarai justru akan menimbulkan masalah baru yang sulit diukur akibatnya dan dikhawatirkan justru akan merusak situasi perekonomian yang stabil. Untuk jangka pendek, pilihan pengurangan subsidi dengan menaikkan harga BBM dianggap cara yang paling praktis dan murah ongkos sosial politiknya dibandingkan dengan cara pembatasan subsidi dan konversi ke BBG.

Pilihan kebijakan akhirnya berada di tangan pemerintah. Penerapan subsidi BBM adalah ranah kebijakan publik. Kebijakan publik bersifat *loss function* yaitu biaya atau investasi yang dilakukan tidak akan menghasilkan pengembalian yang bernilai secara material (uang) secara langsung. Keberhasilan kebijakan publik dinilai dari besarnya kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari kebijakan tersebut atau berapa kerugian yang dapat dihindari. Begitu juga dalam kasus subsidi BBM harus benar-benar ditimbang untung rugi-nya bagi masyarakat luas.

Ketika suatu kebijakan publik harus diambil secara tepat dan cepat maka pengambil kebijakan harus siap dengan resiko sosial politik yang akan dihadapi. Tugas pemerintah untuk membuat kebijakan yang diyakini terbaik bagi rakyatnya. Karena seorang pemimpin akan menjadi berarti dan berharga ketika dia berani membuat kebijakan yang diyakini akan mampu mensejahterakan rakyatnya, meski harus menghadapi berbagai resiko terkait kebijakan yang diputuskannya.

*Penulis adalah Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Tiga Pilar Penganggaran dalam APBN 2012

OLEH : TANDA SETIYA

Sejauh mana penerapan Tiga Pilar Penganggaran dalam APBN 2012 ? Sebuah pertanyaan kritis yang perlu dilontarkan untuk mengetahui laju penerapan tiga pilar reformasi penganggaran yang telah digulirkan 7 tahun yang lalu. Berawal dari tahun 2005 kemudian bergerak hingga tahun 2012 tentu banyak hal yang telah mengalami perkembangan dalam penerapan pilar-pilar reformasi penganggaran. Tulisan berikut akan menyajikan uraian tentang bagaimana penerapan tiga pilar reformasi penganggaran dalam APBN 2012 yang telah diundangkan berdasarkan UU 22 Tahun 2011.

Tiga Pilar Reformasi Penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 meliputi: *Unified Budget* (Penganggaran Terpadu), *Performance Based Budgeting* (Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK) dan *Medium Term Expenditure Framework* (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah). Pilar-pilar tersebut yang diharapkan mendorong pengelolaan APBN yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Pada ujungnya dengan pengelolaan keuangan negara yang baik tersebut dapat mendukung terwujudnya *good governance*.

Penerapan PBK dalam APBN 2012

Dalam pelaksanaannya fokus reformasi lebih mengarah kepada penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Hal ini dapat dipahami karena penganggaran terpadu merupakan prasyarat penerapan PBK dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) merupakan jaminan kontinuitas penyediaan anggaran kegiatan karena telah dirancang hingga tiga atau lima tahun ke depan.

Setelah melalui masa pembelajaran 5 tahun sejak penerapan PBK dalam penyusunan APBN di Indonesia, maka pada tahun 2012 tetap dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan PBK. Terdapat dua hal mendasar dalam penerapan PBK pada penyusunan APBN 2012 yaitu tingkatan penerapan PBK dan struktur anggaran PBK.

Struktur Anggaran dalam PBK

Upaya penyempurnaan penerapan PBK pada TA 2012 yang lain berupa Struktur Anggaran. Penerapan PBK yang diamanatkan proses reformasi penganggaran mengakibatkan perubahan dalam struktur anggaran. Struktur Anggaran dalam penerapan PBK, lebih memperhatikan keterkaitan secara jelas hubungan antara perencanaan dan penganggaran yang merefleksikan keselarasan antara kebijakan (*top down*) dan pelaksanaan kebijakan (*bottom up*).

Struktur Anggaran merupakan penggambaran satu kesatuan perencanaan dan penganggaran dalam unit organisasi K/L. Satu kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan dalam kebutuhan sumber daya yang diperlukan oleh Satker dalam rangka pelaksanaan Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana tugas fungsi yang diemban Satker (*bottom up*). Hal ini harus sejalan dengan rancangan kebijakan yang diputuskan pada tingkat Organisasi Pemerintah yang telah dikoordinasikan oleh Unit-Unit Organisasinya (*top down*) yang bertanggung jawab terhadap Program.

Restrukturisasi Program dan Kegiatan ini, dimulai pada TA 2011. Tujuan dilakukannya Restrukturisasi Program dan Kegiatan yaitu untuk mencegah

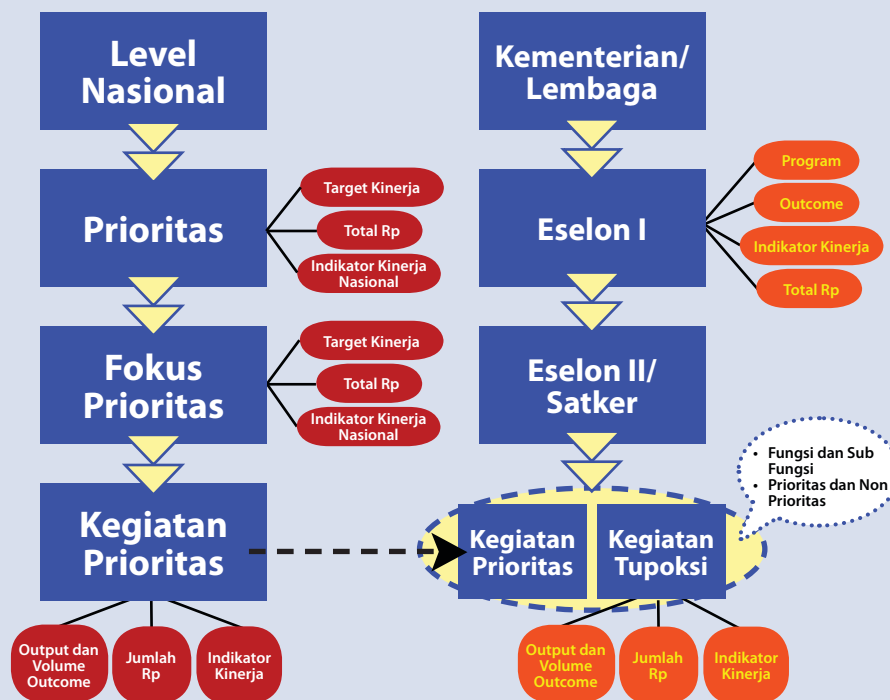


Diagram 1 : Penerapan PBK Berdasarkan Tingkatan

PBK Tingkatan Nasional

Berdasarkan tingkatan penerapan PBK dalam TA 2012 diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu penerapan PBK Tingkat Nasional dan Penerapan PBK Tingkat Kementerian/Lembaga.

Penerapan PBK pada tingkat Nasional dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah menentukan tujuan (dalam bentuk Prioritas dan Fokus Prioritas pembangunan nasional beserta target kinerjanya) untuk waktu 1 (satu) tahun yang akan datang dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan berupa *national outcome* yang mengarah kepada gambaran sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar;
2. Berdasarkan tujuan tersebut Pemerintah merumuskan Kegiatan Prioritas dan/atau Kegiatan dalam kerangka tugas-fungsi yang diemban suatu K/L, IKK, dan output (jenis, volume, dan satuan ukur). Selanjutnya Pemerintah akan menghitung perkiraan kebutuhan anggarannya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara;

3. Tujuan Pemerintah tersebut akan dilaksanakan oleh masing-masing K/L (beserta perangkat organisasi di bawah koordinasinya) dalam bentuk program dan kegiatan sesuai tugas-fungsinya.

PBK Tingkatan Kementerian/Lembaga

Sedangkan pelaksanaan PBK dalam tingkat Kementerian/Lembaga dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Renstra K/L, Unit Eselon IA merumuskan Program, IKU Program dan hasil;
2. Selanjutnya Program dijabarkan dalam Kegiatan, IKK, dan output pada Unit pengeluaran (*spending unit*) pada tingkat Satker atau Eselon II di lingkungan Unit Eselon IA sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Kegiatan-kegiatan tersebut, disesuaikan pada kategori Fungsi/Sub Fungsi yang didukung, Prioritas Nasional/Bidang atau Non Prioritas;
4. Hasil rumusan Program, IKU Program, hasil, Kegiatan, IKK, dan output dituangkan dalam dokumen Renja-K/L, RKA-K/L dan DIPA.

STRUKTUR ANGGARAN PENERAPAN PBK



Diagram 2 : Struktur Anggaran Penerapan PBK

tumpang tindih pelaksanaan Program dan Kegiatan sehingga unit penanggung jawab tiap kegiatan menjadi jelas. Hal ini dapat dilihat dari diagram 3 Perbandingan Struktur Anggaran.

Dari tabel perbandingan tersebut dapat terlihat jelas bahwa dengan adanya restrukturisasi program semakin terarah kaitan antara program kegiatan dengan output yang dihasilkan. Apalagi dalam restrukturisasi ini K/L harus mencantumkan IKU Program dan IKK untuk level kegiatan.

Yang perlu mendapat perhatian dengan adanya restrukturisasi program ini malah mengakibatkan jumlah program membengkak dibanding sebelum adanya restrukturisasi. Demikian juga dengan jumlah kegiatan juga mengalami kenaikan yang sangat ekstrim. Memang banyak yang menjadi faktor bertambahnya program dan kegiatan ini namun kedepan kiranya perlu dicermati kenapa kenaikannya sangat besar. Hal ini terbukti pada TA 2012 jumlah program mengalami penurunan dibanding TA 2011. Menurut penulis, idealnya, program setelah restrukturisasi lebih ramping dibanding sebelum adanya restrukturisasi.

Alasannya, program dalam konsep PBK diampu oleh 1 unit eselon I, nah apabila dibandingkan unit jumlah K/L yang ada sebelum dan setelah restrukturisasi tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, maka perubahan program sepatutnya tidak berubah secara signifikan

juga. Apalagi bila ditilik dari keberadaan program pada masa sebelum restrukturisasi dapat diampu oleh Eselon II, dan I unit eselon I juga mengampu lebih dari 1 (satu), 2 (dua) bahkan 3 (tiga) program. Maka sangat logis apabila restrukturisasi program masih perlu terus dijalankan dalam rangka penerapan PBK.

Secara garis besar dalam menyusun program dan kegiatan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program

- Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi K/L yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau unit K/L yang berisi Kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang

terukur.

- Rumusan Program merupakan hasil restrukturisasi tahun 2011 dan penyesuaiannya.
- Rumusan Program dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan Program yang ada dalam dokumen Renja-K/L.

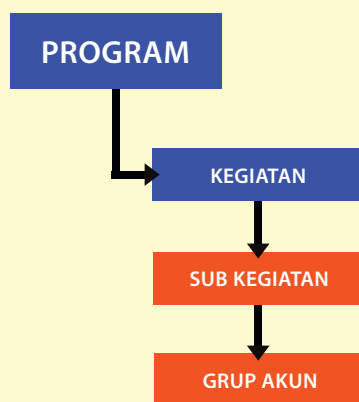
2. Kegiatan

- Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen Kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur.
- Rumusan Kegiatan hasil restrukturisasi tahun 2011 dan penyesuaiannya.
- Rumusan Kegiatan dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan Kegiatan yang ada dalam dokumen Renja-K/L.
- Alokasi anggaran kegiatan dirinci lebih lanjut dalam beberapa struktur yaitu Komponen, Subkomponen dan Detil Belanja.

Penerapan KPJM 2012

KPJM sebagai suatu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan yang pengambilan keputusannya dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, mempunyai implikasi biaya pada tahun yang akan datang (tertuang dalam prakiraan maju). Angka prakiraan maju sebagai implementasi KPJM

SEBELUM RESTRUKTURISASI



SETELAH RESTRUKTURISASI

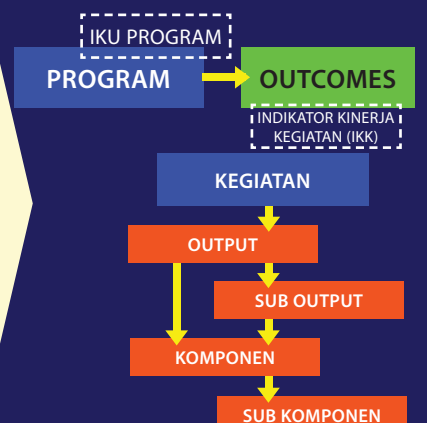


Diagram 3 : Perbandingan Struktur Anggaran

Tabel Perubahan Program Kegiatan 2010, 2011, 2012

Uraian	TA 2010	TA 2011	TA 2012
Pagu Anggaran	340.149.162.389.000	432.779.310.642.000	476.610.160.600.000
Jumlah Program	217	416	401
Jumlah Kegiatan	1.798	2.946	-
Jumlah Satker	17.311	17.805	-

yang disusun oleh suatu Kementerian Negara/Lembaga harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pada TA 2012 penerapan KPJM terdapat 3 hal utama yang dilakukan penyesuaian yaitu Memperbaiki Angka Dasar, Penyesuaian Angka Dasar dan Inisiatif Baru.

Memperbaiki Angka Dasar

RKA-K/L tahun anggaran 2011 telah ditetapkan angka prakiraan maju untuk tahun 2012. Persiapan penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/L 2012 dimulai dengan memperbaiki angka prakiraan maju menjadi Angka Dasar. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di saat menetapkan angka prakiraan maju/angka dasar, harus diperbaiki sehingga menunjukkan angka yang benar.

Alasan utama untuk memperbaiki angka dasar antara lain:

1. K/L melakukan kesalahan ketika mencantumkan Volume Output pada Prakiraan Maju;
2. K/L salah dalam mengklasifikasikan “berhenti” atau “berlanjut” untuk Output atau komponen;
3. K/L salah dalam mengklasifikasikan komponen “utama” atau “pendukung”;
4. K/L terlalu detail dalam mengelompokkan output, sehingga jumlah output dari suatu K/L terlalu banyak;
5. K/L mendefinisikan output terlalu luas yang selanjutnya dibagi menjadi beberapa sub output yang seharusnya dapat menjadi output tersendiri;
6. Nomenklatur output K/L tidak mencerminkan barang atau jasa;

7. Pada level komponen, K/L perlu memunculkan komponen baru atau menghapus komponen yang tidak dibutuhkan; dan/atau

8. K/L perlu melakukan penajaman perumusan komponen.

Penyesuaian Angka Dasar

Penyesuaian Angka Dasar merupakan proses menjadikan Angka Dasar yang telah disusun pada tahun sebelum tahun yang direncanakan (misal tahun 2011) sesuai dengan asumsi-asumsi atau parameter yang akan terjadi pada tahun yang direncanakan (misal tahun 2012). Parameter yang perlu disesuaikan yaitu parameter ekonomi yang secara otomatis dilakukan oleh sistem aplikasi RKA-KL dan parameter non-ekonomi yang disesuaikan secara manual oleh perencanaan. Selain penyesuaian parameter, penyesuaian Angka Dasar juga meliputi penyusunan Angka Prakiraan Maju baru (3 tahun dari tahun yang direncanakan).

Terdapat tiga hal yang menjadi penyebab dilakukan penyesuaian terhadap Angka Dasar yaitu penyesuaian parameter ekonomi, penyesuaian parameter non-ekonomi, dan penyusunan prakiraan maju baru.

1. Penyesuaian parameter ekonomi.

Parameter ekonomi yang digunakan pendekatan KPJM dalam menyusun anggaran adalah asumsi-asumsi ekonomi yang ada dalam APBN, namun dalam penerapan KPJM saat ini, asumsi yang digunakan adalah inflasi.

Setiap tahun prakiraan inflasi berbeda dari tahun sebelumnya, oleh karena itu perlu dilakukan *update* terhadap asumsi inflasi yang

akan digunakan pada tahun yang direncanakan.

Asumsi inflasi digunakan sebagai parameter penyesuaian agar pengeluaran yang direncanakan pada tahun yang direncanakan tepat.

Di tahun 2011 dalam menyusun prakiraan maju (PM 1) untuk Tahun 2012 asumsi inflasi (parameter) yang digunakan adalah 5,3%, jika di tahun 2012 inflasi yang digunakan adalah 4% maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap anggaran 2012 yang akan disusun.

2. Penyesuaian parameter non-ekonomi.

Parameter ekonomi merupakan parameter yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau K/L. Lingkup parameter ekonomi yang harus dilakukan penyesuaian adalah:

- Penyesuaian perhitungan belanja pegawai disesuaikan dengan perubahan database kepegawaian.
- Penambahan atau pengurangan Volume Output.
- Pengurangan anggaran.
- Pengurangan target volume output dan anggaran.
- Realokasi anggaran dan target Output serta pagu K/L.
- Memindahkan target Volume Output ke masa depan.

3. Membuat prakiraan maju baru.

Dasar utama dari penerapan KPJM adalah *rolling budget*. Sebagai bagian dari penyusunan anggaran setiap tahun maka prakiraan maju yang baru harus ditambahkan dalam Angka Dasar.

- Prakiraan maju baru untuk komponen pendukung

Komponen pendukung merupakan komponen yang tidak terkait secara langsung dengan volume Output dan dilakukan pengindeksasian dalam perhitungan prakiraan majunya.

Penyesuaian untuk komponen pendukung secara otomatis akan dilakukan oleh sistem selama komponen tersebut diklasifikasikan sebagai komponen berulang. Sedangkan untuk komponen pen-

dukung yang berhenti hanya akan ada sampai tahun ketika komponen tersebut berhenti.

- Prakiraan maju baru untuk komponen utama
Perhitungan prakiraan maju untuk komponen utama dikaitkan secara langsung dengan volume dari Output kegiatan sehingga kenaikan atau pengurangan Volume Output secara langsung akan mengurangi biaya untuk komponen utama. Karakteristik lain dari komponen utama adalah dalam hal indeksasi. Komponen utama dapat diindeks jika ditentukan dengan kebijakan dan biaya untuk komponen utama tersebut dipengaruhi harga pasar (terpengaruh inflasi).

Inisiatif Baru

Inisiatif Baru dan Angka Dasar merupakan bagian terpenting dari penerapan KPJM. Angka Dasar dalam KPJM mengakomodir seluruh kebijakan yang berulang dari tahun ke tahun, sedangkan Inisiatif Baru mengakomodir perubahan kebijakan atau munculnya kebijakan baru dalam jangka tahun tertentu. Di dalam KPJM, Inisiatif Baru didefinisikan sebagai kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran *baseline* maupun anggaran kedepan.

Landasan Konseptual yang mendasari penerapan Inisiatif Baru adalah:

1. Fleksibilitas dalam perencanaan dengan tetap menjaga akuntabilitas;
2. Perencanaan berorientasi pada arah kebijakan;
3. Penerapan prinsip tatakelola yang baik (transparansi dan akuntabilitas); dan
4. Berorientasi pada pencapaian kinerja.

Inisiatif Baru dan Angka Dasar merupakan bagian terpenting dari penerapan KPJM.

Tujuan dari penerapan Inisiatif baru adalah:

1. Memberikan fleksibilitas pada sistem perencanaan dan penganggaran.
2. Menjaga Konsistensi pencapaian tujuan pembangunan nasional.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
4. Melakukan efisiensi.

Terdapat 3 (tiga) kategori Inisiatif Baru yang diajukan oleh K/L yaitu:

1. Program (Fokus Prioritas), Outcome, Kegiatan, dan output Baru.
Inisiatif baru ini disebabkan adanya arah kebijakan baru, atau adanya perubahan pada kebijakan berjalan, yang membawa konsekuensi berupa penambahan anggaran di luar Angka Dasar. Bentuk Inisiatif Baru ini dapat berupa Program baru, Outcome Baru, Kegiatan Baru dan/atau output Baru.
2. Penambahan Volume Target.
Inisiatif Baru berupa penambahan volume output yang menyebabkan pertambahan anggaran pada tahun yang direncanakan.
3. Percepatan Pencapaian Target.
Inisiatif Baru ini berupa penambahan volume target dalam rangka melakukan percepatan yang menyebabkan tambahan anggaran namun masih dalam pagu anggaran *Baseline* jangka menengah awal.

Inisiatif Baru yang diajukan oleh K/L proses pendanaannya dapat berasal dari adanya Tambahan Anggaran (*on Top*), Realokasi Anggaran, dan Kombinasi *On Top* dan Realokasi. Sedangkan dilihat dari terjadinya proses pengusulan Inisiatif Baru dapat dilakukan sebelum Pagu indikatif (Pengusulan I), sebelum Pagu Anggaran (Pengusulan II), dan sebelum Alokasi Anggaran (Pengusulan III).

Setiap K/L dapat mengajukan proposal Inisiatif Baru yang terkait dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Penetapan usulan yang akan disetujui sebagai Inisiatif Baru dilakukan melalui sistem kompetisi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan ditetapkan melalui sistem kompetisi atas kelayakan proposal.

Penerapan Penganggaran Terpadu dalam APBN 2012

Penerapan Penganggaran Terpadu dalam reformasi penganggaran bisa di bilang yang lebih dahulu tuntas, karena permasalahannya tidak serumit PBK dan KPJM. Walau demikian, seiring bergulirnya waktu maka apabila masih ada hal-hal yang kurang dan terjadi kendala dalam pelaksanaannya, maka penyempurnaan juga tetap terus dilakukan.

Pada TA 2012, penerapan penganggaran terpadu tidak terlalu banyak menyita waktu. Hal paling pokok dalam penerapan penganggaran terpadu yang dilakukan pada TA 2012 adalah penyempurnaan klasifikasi jenis belanja. Terdapat beberapa penyesuaian untuk empat jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bansos.

Perbaikan Mata Anggaran (MA) dan penegasan kembali penggunaan jenis belanja ini didasarkan adanya beberapa regulasi yang mengalami perubahan (seperti kebijakan alokasi dana Dekon/TP, Bantuan Sosial), dan penegasan tentang belanja pegawai, belanja barang, Modal dan Bansos agar K/L dapat mengalokasikan dananya dalam MA yang tepat. Hal ini juga terkait dengan penerapan akuntansi dan pelaporan pada K/L.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penerapan PBK, Penganggaran Terpadu dan KPJM sebagai pilar reformasi penganggaran masih terus dilakukan dalam penyusunan APBN. Hal ini dapat terjadi karena dalam penerapannya pilar-pilar tersebut memang memerlukan beberapa tahap yang tidak pendek. Apalagi penerapan tiga pilar tersebut tidak hanya dilakukan di internal Kementerian Keuangan, namun melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga hingga seluruh satker yang tersebar di Indonesia. Tentu kedepannya, penerapan tiga pilar reformasi penganggaran masih akan terus dilakukan demi mewujudkan penyusunan APBN yang mendukung pencapaian *Good Governance*.

*Penulis adalah Widyaaiswara Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Drs. Endang Tata Bermula di Kapal Patroli, Berlabuh di Bojana Tirta

OLEH: PILAR WIROTAMA & DIAH NOFITA RINI

“**P**antang pulang sebelum tumpukan dokumen di meja kerjanya rampung adalah kebiasaannya. Ini juga yang ia coba ‘tularkan’ kepada para stafnya di Pusdiklat Bea dan Cukai. Berbekal pengalaman 31 tahun berkiprah di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai ia berhasil memelihara sinergi kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan dengan unit almamaternya tersebut. Ia tak lain adalah Endang Tata dan ini adalah sekilas perjalanan hidupnya yang disarikan dari wawancara reporter Majalah Edukasi Keuangan, Diah Nofita Rini.”

Foto: Eros Lassa Mursalin

Endang Tata lahir 60 tahun silam di Jakarta. Orangtuanya berasal dari Desa Sinagar, Kecamatan Sukaratu yang terletak persis di lereng gunung Galunggung, Tasikmalaya, sebelum akhirnya hijrah ke Jakarta pada tahun 1949. Ayahnya adalah seorang PNS di PD. Pasar Jaya dan Ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Saat berumur 9 tahun, Endang Tata harus kehilangan sang ayah dan menjadi yatim. Bersama Ibu dan ketiga saudara kandungnya, ia menjalani kehidupan sederhana. Sehari-hari Ibunya membuka toko kelontong di kawasan rumahnya agar dapat membiayai hidup keempat anaknya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di SD 6 Menteng Wadas dan SMP Negeri 3 Manggarai, bungsu dari empat bersaudara ini pun melanjutkan ke SMA Negeri 3 Teladan, sekolah yang meninggalkan pengalaman berkesan baginya. “Guru-guru di sana sebagian besar berpendidikan Belanda. Jadi sistem pendidikannya mengutamakan disiplin. Keras, tapi buat kita jadi belajar dengan baik” kenangnyaa.

Tamat dari SMA, ia pun berusaha mendaftar ke berbagai sekolah kedinasan yang tidak memungut biaya kuliah. “Karena waktu itu saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, tujuan saya adalah mencari sekolah yang gratis, itu saja” imbuhnya. Usahnya pun berbuah manis, tak hanya satu namun tiga sekolah tinggi kedinasan menerimanya. Ia pun lantas berdiskusi dengan Ibunya saat tiba waktu untuk memilih. “Jadi saya waktu itu diterima di Institut Ilmu Keuangan (IIK), Akademi Imigrasi dan Jawatan Metereologi dan Geofisika. Tapi hanya IIK yang memberikan *degree program* sampai Sarjana. Saya tanya Ibu dan beliau bilang, “Ambil yang Sarjana dong”, Maka akhirnya saya ambil IIK” ceritanya.

Diterima dan berkuliah di IIK ia merasakan sebagai jalan hidup yang harus dijalani dan bukan semata karena keinginannya, seperti yang ia utarakan, “Saya masuk IIK istilahnya bukan karena keinginan, tapi karena jalan hidup saya”. Di IIK ia pun diterima di program Bea Cukai, bukan program Akuntansi sebagaimana yang ia tulis di formulir pendaftaran dulu.

Leader on Duty

Tahun 1975, Endang Tata berhasil menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda dengan program Bea Cukai dan memperoleh gelar BcKN. Layaknya lulusan IIK lainnya, ia pun lalu ditempatkan praktek di unit kerja. Di awal penempatannya, ia langsung dipercaya sebagai komandan patroli laut dengan 18 orang anggota di Kanwil I DJBC Tanjung Balai Karimun. “Dari awal saya memang sudah belajar memimpin, dari *scope* yang paling kecil sampai *scope* yang besar. Contohnya waktu masih pelaksana, saya menjadi Komandan patroli di Tanjung Balai Karimun. Saya memimpin satu kapal yang tugasnya menangkap penyelundup dan kadang kala mereka mempunyai kekuatan yang lebih besar dari kita”, kenangnyaa. Di tahun 1977 ia kembali melanjutkan pendidikannya dan memperoleh gelar Drs. dari Institut Ilmu Keuangan pada tahun 1979.

Tingkat komando kembali digenggamnya saat tahun 1981 ditunjuk menjadi Kepala Kantor Cabang Tk II Kuala Tanjung dan kemudian 1982-1985 ia ditunjuk sebagai Kepala Kantor Cabang Tk. I DJBC Kuala Langsa Aceh Timur. Semenjak itu berbagai jabatan yang dipercayakan padanya semakin mengasah jiwa kepemimpinan dan memperkaya pengalamannya, “Masing-masing jabatan dan tempat memberikan pengalaman yang berbeda. Sebagai Kepala Kantor misalnya, kita melakukan pengamanan keuangan Negara. Di Tanjung Priok

misalnya, bongkar muat barang disana hampir 70% dari seluruh Indonesia dan tidak gampang *manage* barang yang sekian banyak dengan anak buah yang saya miliki. Waktu saya menjadi Kepala Kantor di Tanjung Perak, *scope*-nya mungkin tidak terlalu besar namun karakteristik masyarakat di sana juga berbeda dan itu memerlukan cara pendekatan sendiri”. Saat ditanya bagaimana cara seorang Endang Tata mengelola permasalahan di setiap unit yang dipimpinnya, ia pun menjawab singkat, “Semua masalah bisa diselesaikan. Yang penting dengan niatan yang baik, kita akan bisa menyelesaikan semuanya”. Pengalamannya sebagai pemimpin kembali dibuktikan saat ia menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah di Tanjung Balai Karimun, Jakarta, Bandung serta sebagai Direktur Pencegahan dan Penyidikan sebelum akhirnya memimpin Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai. Dari sederet jabatan yang pernah dipegangnya, jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Tanjung Balai Karimun adalah yang paling berkesan baginya. “Suatu pengalaman yang paling berkesan buat saya, karena saya diberi kepercayaan sekaligus nostalgia ke tempat saya pertama kali ditempatkan. Yang tadinya hanya komandan patroli, akhirnya menjadi kepala Kanwil disana”, kenangnyaa. Hampir sepanjang tugasnya, salah satu peserta terbaik Sekolah Staff Pimpinan Administrasi Nasional (SESPANAS) tahun 1995 ini selalu melaksanakan tugas sebagai pemimpin.

Saat berumur 9 tahun, Endang Tata harus kehilangan sang ayah dan menjadi yatim. Bersama Ibu dan ketiga saudara kandungnya, ia menjalani kehidupan sederhana.

Tamat dari SMA, ia pun berusaha mendaftar ke berbagai sekolah kedinasan yang tidak memungut biaya kuliah. “Karena waktu itu saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, tujuan saya adalah mencari sekolah yang gratis, itu saja” imbuhnya.

“Dari awal saya memang sudah belajar memimpin, dari *scope* yang paling kecil sampai *scope* yang besar. Contohnya waktu masih pelaksana, saya menjadi Komandan patroli di Tanjung Balai Karimun. Saya memimpin satu kapal yang tugasnya menangkap penyelundup dan kadang kala mereka mempunyai kekuatan yang lebih besar dari kita”, kenangannya.



Pak Endang Tata bersama istri

Foto : Istimewa

Pelabuhan Terakhir

Tahun 2006 bisa dibilang merupakan babak baru bagi perjalanan hidup dan karir seorang Endang Tata. Pada tahun itu, kala ia menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Penyidikan, ia harus kehilangan putri keduanya. Hal itu ia rasakan sebagai pukulan keras baginya dan keluarga. Mempertimbangkan kondisi keluarganya saat itu serta amanah yang diembannya sangat besar, ia pun mengajukan pengunduran diri dari jabatannya dan kemudian mengajukan pindah ke Pusdiklat Bea dan Cukai di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui Dirjen Bea dan Cukai. Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan saat itu mengabulkan permohonannya, “Saya masih ingat, tanggal 30 Agustus 2006 saya mendapat SK dari Bu Sri Mulyani untuk pindah ke Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai Kepala Pusdiklat”.

Berpindah dari unit yang telah membesarkannya selama 31 tahun ke unit yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda, memaksa Endang Tata untuk melakukan perubahan mendasar da-

lam dirinya. “Saya harus merubah mental yang biasanya memimpin anggota untuk tugas-tugas operasional di lapangan menjadi seorang pendidik. Paling tidak membuat *policy-policy* di bidang pendidikan” ceritanya. Di masa-masa awal jabatannya, Endang Tata belum melakukan apa-apa, “Dua-tiga bulan pertama saya tidak berbuat apa-apa kecuali belajar, belajar dan belajar lagi mengenai pendidikan. Pada awal tahun 2007, baru saya mulai memetakan permasalahan dan membuat kebijakan”.

Diakuinya, menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai adalah masa yang paling nyaman baginya, “Saya betul-betul paling nyaman, paling tenang dan paling bahagia saat disini. Karena saya bisa betul-betul menyampaikan, walaupun tidak secara langsung ya, pengetahuan dan pengalaman yang saya punya kepada para siswa. Ada satu kebahagiaan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain”. Meskipun ia merasa nyaman, bukan berarti tidak ada tantangan yang harus ia hadapi. “Tantangan yang paling utama adalah bagaimana mencukupi kebutuhan Widyaiswara atau tenaga

pengajar dalam konteks untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka kepada para siswa.”, ungkapnya. Ia menambahkan, untuk menjadi seorang Widyaiswara itu tidaklah semudah menjadi dosen, “Seorang profesor, doktor atau seseorang dengan pendidikan S2 yang memiliki pengetahuan yang cukup, maka ia bisa jadi dosen. Tapi untuk menjadi Widyaiswara itu saja tidak cukup. Seorang Widyaiswara harus sudah memiliki pengalaman praktek yang cukup atas ilmu yang dikuasainya sehingga ia bisa mentransfer pengalaman-pengalaman itu kepada siswanya. Jadi harus bisa mentransfer bukan hanya Knowledge-nya saja, tapi yang utama adalah Skill dan attitude yang dikuasai”. Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh BPPK adalah bersifat teknis dan lebih cenderung kepada pelatihannya bukan kepada pendidikan.

Ia juga memandang sistem rekrutmen Widyaiswara yang diselenggarakan saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan Widyaiswara dengan segera. Hal ini diperparah dengan rendahnya minat terhadap jabatan Widyaiswara serta

fasilitas jabatan widyaiswara yang kurang menarik. “Kalau pegawai Bea Cukai pindah menjadi Widyaiswara itu istilahnya downgrade, baik dari segi grading maupun fasilitas” ungkapnya. Adapun solusi yang ia lakukan untuk mengatasi tantangan ini adalah bekerjasama dengan user yaitu Ditjen Bea dan Cukai serta instansi terkait dalam hal penyediaan tenaga pengajar atau instruktur. “Kegiatan di Pusdiklat Bea dan Cukai itu sangat spesifik, Instruktur kita minta dari Ditjen Bea dan Cukai. Untuk diklat tentang barang kimia, kita minta bantuan dari asosiasi kimia. Untuk diklat tentang obat-obatan kita kerjasama dengan pabrik/pengusaha obat-obatan, kerjasama dengan bandara, asosiasi alat-alat berat, otomotif, elektronik, Kopassus TNI AD, dan masih banyak lagi” ceritanya.

Ia juga memiliki cita-cita agar pegawai terbaik Ditjen Bea dan Cukai yang akan memperoleh promosi dapat ‘mampir’ ke Pusdiklat untuk membagi pengalamannya dengan para siswa. “Saya mau untuk memenuhi tenaga pengajar disini, kirimlah orang-orang dari Ditjen Bea dan Cukai yang berpengalaman kesini dan mereka diminta mengajar, baru

dia dipromosikan. Tapi dipilih dulu dan nanti kita sediakan Training of Trainers (TOT) sebelum mereka mengajar” ujarnya. Melengkapi cita-citanya, Endang Tata berharap disisa masa tugasnya ia dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pendidikan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, khususnya di pelabuhan terakhirnya, Pusdiklat Bea dan Cukai.

Point of No Return

Berbincang dengan Endang Tata, tak Berbincang dengan Endang Tata, tak akan lengkap rasanya jika belum menggali pendapatnya tentang proses Transformasi Kelembagaan BPPK yang sedang berlangsung, mengingat ia adalah Penanggung Jawab Komisi Pengendalian Mutu dan Kepatuhan Internal di Tim Transformasi Kelembagaan BPPK. “Transformasi harus jalan, kita sudah waktunya berubah. Walaupun saat-saat awal ada perdebatan mengenai transformasi ini, itu hal yang wajar. Tapi sejak kita aklamasikan di Rapat Kerja yang lalu, kita sepakat kalau kita harus berubah” tegasnya. Secara pribadi ia akui bahwa kondisi yang sekarang memang nyaman.

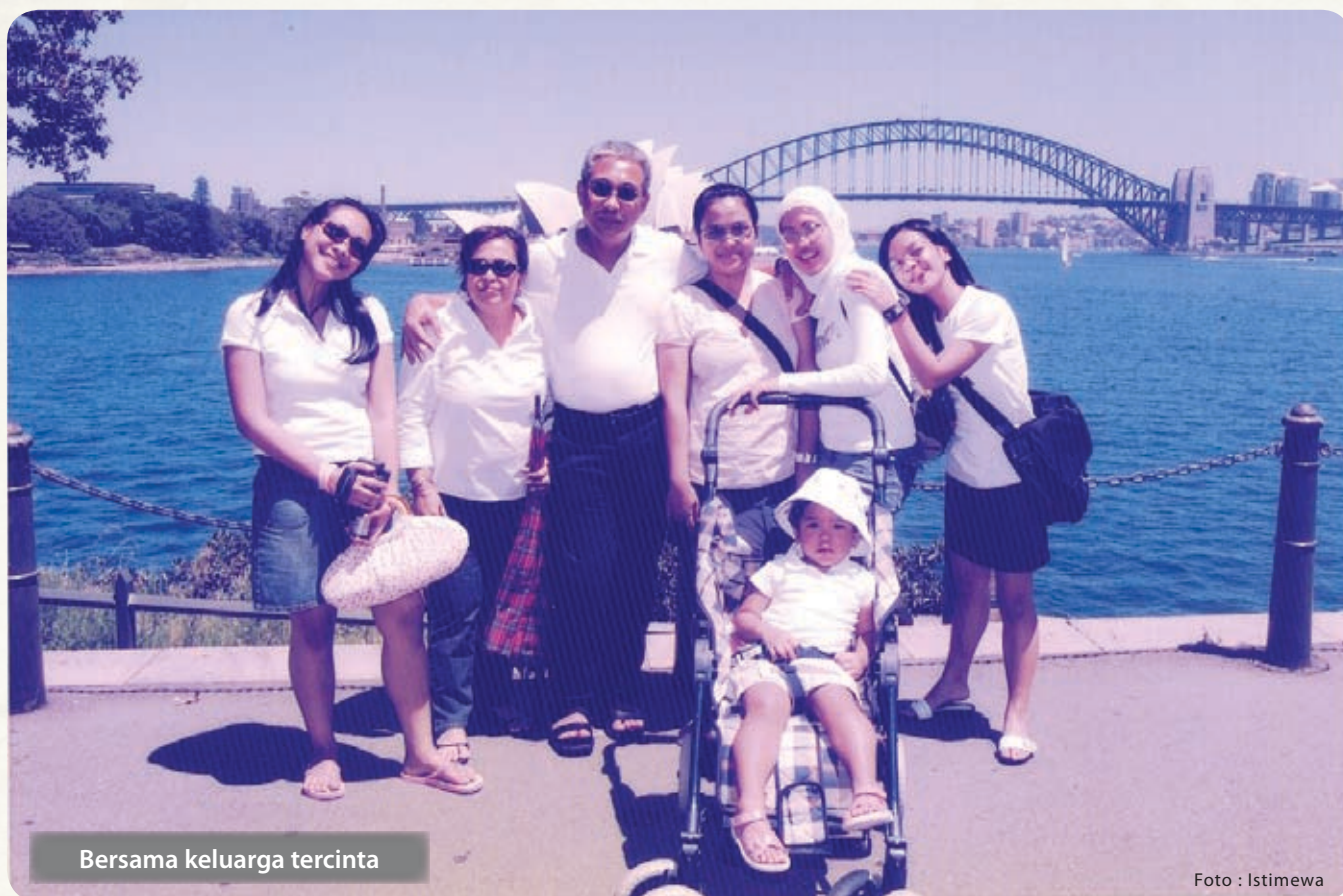
Ia bisa menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan proses bisnis yang biasa. Namun ia menyadari bahwa BPPK harus berubah agar lebih dihargai oleh pengguna. “Dulu kita berorientasi pada produk yang diinginkan user atau sekedar men-support kebutuhan user, sekarang kita beralih pada fungsi-fungsi organisasi yang diharapkan dapat lebih memuaskan user”, ucapnya.

Endang Tata menyadari bahwa waktu yang disediakan bagi BPPK untuk berubah memang cukup singkat, namun ini bukan alasan untuk berhenti ditengah jalan, “Istilah Pak Kamil itu ‘point of no return’, kita nggak bisa mundur lagi. Tidak ada lagi yang bicara sanggup nggak sanggup, tapi semua harus saling percaya bahwa transformasi kelembagaan ini harus jalan, karena ini sudah menjadi amanah Menteri”. Ia pun berharap seluruh pihak yang terlibat, terutama para agent of change dapat bekerja lebih cepat dan mencurahkan pikirannya dalam proses transformasi ini. Target yang harus dicapai bukan lagi dalam hitungan minggu, namun harus ditingkatkan dalam hitungan hari.



menyematkan tanda peserta diklat secara simbolis

“Transformasi harus jalan, kita sudah waktunya berubah. Walaupun saat-saat awal ada perdebatan mengenai transformasi ini, itu hal yang wajar. Tapi sejak kita aklamasikan di Rapat Kerja yang lalu, kita sepakat kalau kita harus berubah”



Bersama keluarga tercinta

Foto : Istimewa

“Kerjakanlah pekerjaan pada saat ini, jangan menunda untuk besok”

Tentang Falsafah Hidup

Selama meniti karir hingga berada di posisinya saat ini, Endang Tata terus berpegang teguh pada falsafah sederhana, “Kerjakanlah pekerjaan pada saat ini, jangan menunda untuk besok”. Hal inilah yang mendorongnya untuk tidak pulang dari kantor sebelum seluruh pekerjaannya rampung. “Saya harus ‘Clean desk’ istilahnya. Karena saya tidak mau membawa pekerjaan ke rumah. Rumah itu untuk akrab dan bercengkerama dengan istri dan anak-anak, makan lalu tidur”, tegasnya. Selain itu ia berpendapat bahwa menunda pekerjaan hanya akan menambah beban keesokan harinya karena pekerjaan lainnya akan datang.

Penggemar makanan sunda ini juga

selalu berusaha mensinergikan para pegawai di unit yang dipimpinnya. “Jadi yang paling utama disini adalah sinergi. Artinya saling membantu satu sama lain, supaya timbul keakraban”, ucapnya. Ia berprinsip, jika ada masalah yang harus dihadapi oleh suatu bidang, maka yang lain pun perlu membantu karena bidang-bidang tersebut saling terkait dan akan mempengaruhi bidang yang lainnya. Ia menyebut sinergi ini dengan istilah ‘Guyub’.

Menjelang akhir masa tugasnya di Kementerian Keuangan, ia tidak pernah merasa bangga dengan jabatan-jabatan yang pernah digenggamnya. Ia justru merasa bangga karena telah berhasil menyekolahkan keempat anaknya sesuai

minat mereka serta mengantarkan mereka ke jenjang pernikahan, “Orang tua itu pada dasarnya kebanggaannya pada anak dan cucu. Kalau jabatan, sebentar saja hilang dan begitu pensiun kita bisa lupa. Tapi kalau anak dan cucu, itu nggak ada habisnya” ucapnya.

Rangkaian perjalanan hidup telah dilalui oleh sosok yang dikenal tegas, detail dan taat beribadah ini. Jika jalan hidup telah membawanya untuk berkuliah di IIK pada program Bea dan Cukai, maka jalan hidup pula yang telah menuntunnya dari kapal patroli di Tanjung Balai Karimun hingga akhirnya berlabuh di Pusdiklat Bea dan Cukai, Bojana Tirta.

*Penulis adalah Pelaksana Pada Bagian TIK - Sekretariat Badan BPPK



EDUCATION & TRAINING EXPO 2012: ANTUSIASME YANG MEWARNAI EMPAT HARI PENYELENGGARAAN

OLEH : SHERA BETANIA

Sekitar 165 peserta dari berbagai institusi yang berhubungan dengan lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta seperti universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik, lembaga pendidikan, sekolah kedinasan serta pusat pendidikan dan pelatihan milik pemerintah, mengikuti pameran pendidikan dan pelatihan terbesar di Indonesia.

Pameran bernama 21st *Education and Training Expo* 2012 ini berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 16-19 Februari 2012 di *Jakarta Convention Center*. *Education and Training Expo* adalah pameran pendidikan tinggi dan pelatihan yang rutin diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 1992, pada tahun 2012 ini merupakan tahun ke-21 penyelenggaraan. Tujuan penyelenggaraan *Education & Training Expo* 2012 adalah membantu mempermudah pelajar kelas XII SMA/SMK/MA dan lulusan Diploma, Sarjana S1, S2 dan para profesional, untuk mendapatkan informasi pendidikan tinggi, program training dan kursus. *Education & Training Expo* 2012

merupakan pameran International pendidikan tinggi terbesar dan terlengkap di Indonesia yang diselenggarakan oleh PT.Wahyu Promocitra dengan dukungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pameran kali ini mengusung tema "pendidikan berkualitas menciptakan kader bangsa berkarakter, cerdas dan terampil". Hari pertama penyelenggaraan dilakukan pembukaan oleh Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Suryo Hapsoro. Pemukulan gong menandai dibuka secara resmi *Education and Training Expo* (ETE) 2012. "Pilih kampus

sesuai minat dan bakatmu”, ujar Suryo dalam kata sambutan yang dihadiri oleh perwakilan seluruh peserta expo. “Perlu adanya kesempatan untuk menjembatani informasi kampus kepada calon mahasiswa”, beliau menjelaskan tujuan dari diselenggarakannya expo ini. ETE 2012 membantu mempermudah pelajar kelas XII SMA/SMK/MA, lulusan program diploma, sarjana S1, S2 dan S3 serta para profesional untuk memperoleh informasi mengenai pendidikan tinggi, program training serta kursus. Pameran semacam ini adalah jembatan bagi para pengunjung dapat dengan mudah memilih dan memilah perguruan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.

BPPK sendiri telah turut berpartisipasi dalam pameran sejak tahun 2010 melalui kegiatan *International Public Service Expo* (IPSE) bergabung bersama unit Eselon I Kementerian Keuangan lainnya. Mengusung stand Kementerian Keuangan, seluruh layanan yang dimiliki Kemenkeu ditampilkan dan dijelaskan kepada pengunjung yang hadir di stand saat itu, termasuk layanan diklat BPPK. Pada tahun 2011, BPPK tidak secara langsung ikut dalam pameran atau expo. Maka dari itu, pada kesempatan Seminar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Strategi Implementasi di Kemenkeu yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Keuangan Umum, BPPK mendirikan stand/*booth* kecil di depan lokasi penyelenggaraan seminar, yaitu di Ruang Mezanine, Gedung Juanda Kementerian Keuangan. Peserta seminar ini sendiri berasal dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan pendidikan tinggi negeri. Stand BPPK menyajikan tayangan profil dan layanan diklat melalui layar LCD dan juga melalui media publikasi cetak, seperti buku profil, brosur dan majalah.

Pada tahun 2012 ini, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) turut serta untuk pertama kalinya dalam *Education and Training Expo 2012*. Pengunjung utama dari expo ini adalah para siswa/siswi yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Melihat target utama dari expo ini, maka BPPK mengusung Sekolah Tinggi

Akuntansi Negara (STAN) sebagai salah satu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Keuangan. STAN dengan nama yang sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat diharapkan mampu menarik banyak pengunjung yang hampir seluruhnya siswa/siswi kelas XII. Setiap harinya, panitia mendatangkan pengunjung pameran dari berbagai sekolah. Panitia menjemput siswa/siswi dari beberapa sekolah di daerah Jakarta dan sekitarnya untuk datang langsung ke expo. Setiap harinya, Kamis hingga Minggu, expo ini tidak kosong dari pengunjung.

Tema yang diangkat oleh stand BPPK-STAN Kemenkeu dalam mengikuti ETE 2012 ini adalah “pencetak ahli keuangan negara”. Tema ini ditampilkan dalam *backdrop* berukuran 2 x 3 meter. Selain STAN, tidak lupa petugas konsultasi juga menjelaskan BPPK dan unit-unit lainnya selain STAN. Selain itu, dijelaskan pula unit-unit yang berada di daerah. Secara perlahan namun jelas, para petugas konsultasi menjelaskan struktur organisasi yang dimulai dari Kementerian Keuangan, BPPK, unit eselon II dan Balai Diklat yang berada di daerah. Tidak lepas dari profil, kepada para pengunjung dijelaskan juga produk-produk yang dimiliki oleh BPPK. Pengunjung dapat mengambil brosur, *flyer*, pembatas buku, majalah atau buku profil sebagai referensi mengenai BPPK.

Stand BPPK-STAN Kemenkeu mampu menarik banyak pengunjung. Setiap harinya tidak kurang dari 200 pengunjung mendatangi stand BPPK-STAN Kemenkeu. Petugas konsultasi yang siap sedia tidak hanya berasal dari Sekretariat Badan dan STAN, tapi juga dari seluruh Pusdiklat. Hari pertama penyelenggaraan, stand BPPK-STAN *laris manis* diserbu pengunjung. Para siswa/siswi yang datang ke stand BPPK-STAN Kemenkeu sangat antusias bertanya seputar penerimaan mahasiswa STAN, mulai dari USM, proses seleksi, jurusan program diploma yang tersedia dan banyak pertanyaan lainnya. Petugas konsultasi dari STAN tidak hanya melibatkan pegawai, tapi juga mahasiswa

STAN. Mereka membagikan pengalaman selama mengikuti USM hingga akhirnya menjadi bagian dari STAN. Keberadaan mahasiswa STAN sangat membantu petugas konsultasi utama yang berasal dari pegawai. Bahkan pada hari Sabtu dan Minggu penyelenggaraan, beberapa mahasiswa D1 Program Diploma (prodip) Bea dan Cukai datang untuk menjadi petugas konsultasi ‘dadakan’. Mereka menjadi daya tarik pengunjung tersendiri, dengan almamater STAN dan seragam prodip Bea dan Cukai.

Setiap pengunjung yang mengunjungi stand/*booth* BPPK-STAN berkesempatan untuk mendapatkan *goodie bag* yang berisi majalah, profil beberapa unit, notes dan pena, dengan cara mengisi kuesioner yang kami berikan. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan seputar keikutsertaan BPPK-STAN dalam hal kondisi/desain stand/*booth* serta materi-materi yang ada di dalam stand/*booth*.

Melalui keikutsertaan BPPK dalam expo ini diharapkan mampu menarik para calon mahasiswa yaitu siswa/siswi SMA untuk melanjutkan pendidikan di STAN. Semoga keikutsertaan BPPK pada expo ini mampu menjadi jembatan komunikasi antara stakeholder BPPK, yang salah satunya adalah masyarakat umum dengan BPPK. Expo ini diharapkan mampu memperkenalkan BPPK sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan serta tugas dan fungsi yang dijalankan. Melalui pameran ini setidaknya mampu menggalang pemahaman dan pengetahuan khalayak pameran mengenai organisasi BPPK serta produk-produk yang dimilikinya.

Kegiatan yang cukup besar ini dapat dijadikan suatu kesempatan bagi BPPK dalam memperkenalkan diri dan meningkatkan citra dalam hal pelaksanaan diklat. Tugas dan fungsi BPPK dalam hal pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di Kementerian Keuangan dan juga stakeholder lainnya selain Kementerian Keuangan.

*Penulis adalah Pelaksana Bagian TIK, Sekretariat BPPK



Foto : Gathot Subroto

Perjalanan Transformasi BPPK

PENULIS : RIDO PARULIAN PANJAITAN

BPPK sebagai salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan, mempunyai tanggungjawab terhadap peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan.

Pada pemaparan Roadmap 2010-2014, Menteri Keuangan memberikan tantangan kepada BPPK untuk melakukan revitalisasi sebagai Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Diklat Keuangan Negara sehingga BPPK dapat meningkatkan layanan bagi seluruh *stakeholders*.



menjawab tantangan tersebut, mulai triwulan IV 2010 BPPK melakukan identifikasi terhadap keterbatasan organisasi yang ada melalui *focus group discussion* (FGD) oleh tim Gugus Tugas Transformasi Kelembagaan yang dibentuk BPPK. Dari FGD ini didapatkan informasi awal mengenai keterbatasan BPPK. Kegiatan identifikasi tersebut dilanjutkan pada 2011 dengan melaksanakan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap organisasi BPPK, khususnya kapasitas organisasi. Kepala Badan, dengan dibantu oleh profesional menetapkan penggunaan pendekatan evaluasi atas elemen organisasi dalam *framework* 7S McKinsey, yaitu: *Strategy, Structure, Staff, Skills, Shared values, Style* dan *System*. Kapasitas organisasi BPPK diukur dengan melakukan *assessment* menggunakan *Capacity Assessment Grid* dari *Venture Philanthropy*, suatu instrumen yang dirancang untuk menggali informasi terkait kapasitas organisasi.

organisasi yaitu memberikan diklat kepada setiap pegawai Kementerian Keuangan sebesar 5% dari total jam kerja pegawai Kementerian Keuangan. Standardisasi dalam hal sarana-prasarana diklat juga belum dapat dikatakan terimplementasi secara final. Selain itu, keterbaruan materi diklat masih memerlukan perhatian khusus. Kondisi seperti ini masih membuat BPPK sulit untuk mencapai prestasi *world-class standard* dan memuaskan para pengguna layanan, baik peserta diklat maupun instansi pengirimnya. Beberapa keterbatasan dalam struktur organisasi saat ini menyebabkan BPPK tidak dapat menjalankan fungsinya dengan optimal, secara rinci dipaparkan sebagai berikut:

1. Kurangnya keselarasan antar elemen organisasi

Hasil *assessment* kapasitas organisasi yang dilakukan berdasarkan elemen-elemen dalam *framework* 7S McKinsey menunjukkan bahwa elemen-elemen penyusun kapasitas organisasi di BPPK belum cukup selaras. Akibatnya, efektivitas organisasi secara keseluruhan menjadi tidak optimal. Hasil *assessment* ditunjukkan dalam Gambar 2.

Dari Gambar 2, terlihat bahwa terdapat ketidakselarasan antara elemen *Aspiration (Style)* dengan 2 (dua) elemen lain yaitu *Strategy* dan *Structure*. Dalam konteks BPPK, aspirasi merupakan arahan dari Menteri Keuangan mengenai peran BPPK dalam mendukung pengembangan kompetensi SDM Kementerian Keuangan. Inti dari arahan Menteri Keuangan ini adalah bahwa BPPK diharapkan untuk fokus kepada pendidikan dan pelatihan keuangan melalui penyelenggaraan diklat yang terintegrasi serta memiliki kualitas yang dapat disandingkan dengan *training center* terkemuka di dunia.

Sementara itu, hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi BPPK saat ini belum siap untuk melaksanakan aspirasi tersebut. Perilaku anggota organisasi saat ini masih terpusat pada pekerjaan *legacy* yang telah menjadi rutinitas organisasi selama bertahun-tahun.

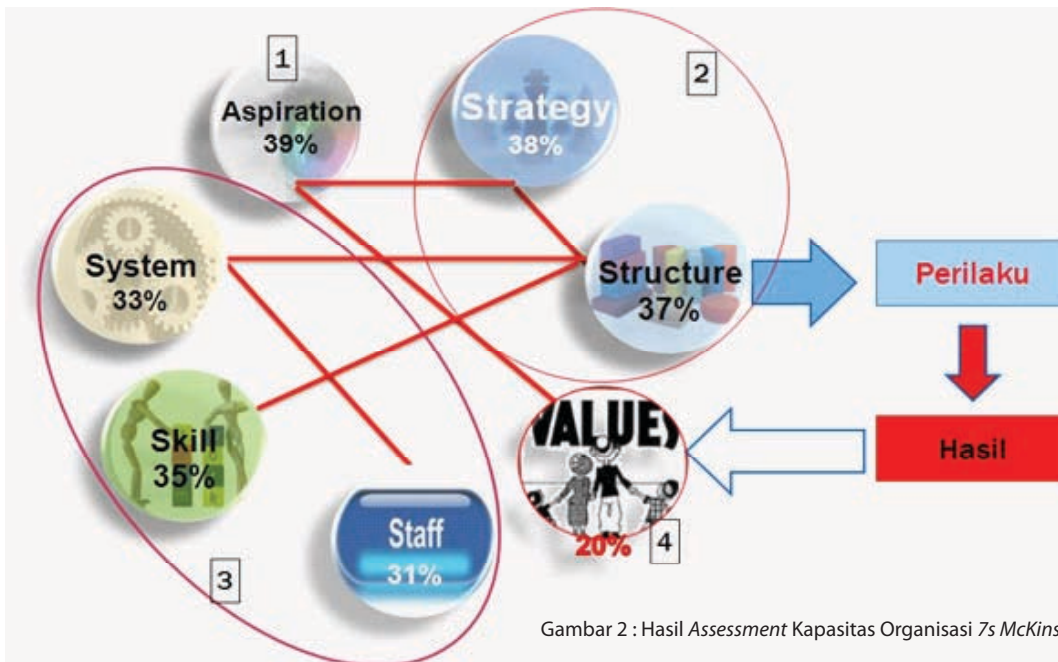
Hasil Identifikasi
Keterbatasan
Struktur
Organisasi BPPK
saat ini

Kurangnya
keselarasan
antar elemen
organisasi



Gambar 1 : *Framework 7s McKinsey*

Setelah dilakukan kajian terhadap kondisi organisasi BPPK, ditarik kesimpulan bahwa desain struktur BPPK saat ini belum dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan belum tercapainya salah satu target layanan



Gambar 2 : Hasil Assessment Kapasitas Organisasi 7s McKinsey

Ketidakselarasan lain yang teridentifikasi adalah kurangnya keselarasan antara elemen *Structure* dengan *System*, *Staff*, dan *Skill* di mana kompetensi anggota organisasi sebenarnya masih sangat berpotensi untuk dikembangkan guna meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Terdapat 'silo' antar Pusdiklat

Keterbatasan lain yang teridentifikasi adalah ditemukannya 'silo' akibat rancangan struktur organisasi saat ini, yaitu departementalisasi BPPK berdasarkan 'konsumen' diklat. Struktur organisasi BPPK saat ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Rancangan struktur organisasi saat ini menimbulkan 'silo' atau keterpisahan antar-Pusdiklat karena setiap Pusdiklat memiliki kewenangan atas penyelenggaraan diklatnya masing-masing. Timbulnya 'silo' ini setidaknya mengakibatkan tiga keterbatasan dalam organisasi BPPK saat ini:

- Terdapat perbedaan standar antar Pusdiklat dalam penyelenggaraan diklat, materi ajar, fasilitas, dan infrastruktur.
- Dengan adanya Pusdiklat, maka relasi dengan 'konsumen' (terutama unit Eselon I lembaga terkait) dilakukan oleh masing-masing Pusdiklat. Pusdiklat yang memiliki hubungan baik dengan 'konsumen' akan lebih mudah mendapatkan *update* informasi yang dibutuhkan untuk memperbaharui materi ajarnya.

Sehingga, kebaruan materi ajar menjadi terbatas pada pusdiklat-pusdiklat tertentu.

- Peran Pusdiklat dalam penyelenggaraan diklat di lapangan maupun relasi dengan unit Eselon I lembaga terkait juga menimbulkan beragam *sphere of influence*. Sehingga, pada gilirannya pengaruh Kepala Badan dapat bersilangan dengan unit Eselon 1 lainnya di Kementerian Keuangan dalam hal kediklatan.

3. Kompetensi Staf

Hasil analisis melalui *assessment* maupun FGD menunjukkan bahwa kompetensi staf (baik Widyaiswara maupun struktural) belum sesuai dengan standar yang diharapkan untuk melayani kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan.

4. Potensi aset

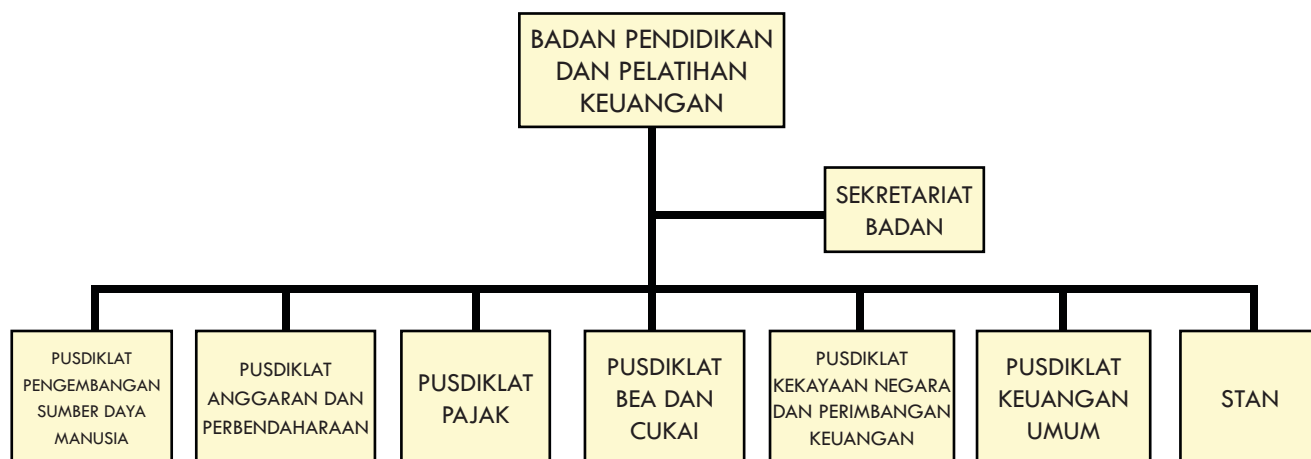
Hasil analisis menunjukkan, masih terdapat potensi aset yang belum digunakan secara optimal (*underutilized*) di beberapa Pusdiklat, seperti kapasitas ruang kelas dan bangunan. Hal ini disebabkan oleh adanya keterpisahan pelaksanaan diklat pada masing-masing Pusdiklat.

Dari kelemahan dan keterbatasan organisasi BPPK yang sudah teridentifikasi serta untuk menjawab tantangan dari Menteri Keuangan dan *user*, apa yang harus dilakukan BPPK? Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah transformasi struktur organisasi.

2
Terdapat
'silo' antar
Pusdiklat

3
Kompetensi
Staf

4
Potensi Aset



Gambar 3 : Struktur Organisasi BPPK Saat Ini

MENGAPA HARUS TRANSFORMASI?

Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang transformasi organisasi. Suatu organisasi didirikan dengan tujuan berusaha agar tetap bisa bertahan dalam jangka panjang, berkembang dalam jangka menengah dan menghasilkan output yang lebih baik dalam jangka pendek. Agar semua tujuan itu dapat terealisasi maka organisasi harus berani melakukan perubahan atau inovasi sesuai dengan perkembangan lingkungan dan menanamkan kepercayaan bahwa melakukan sesuatu yang berbeda bukan berarti melawan tatanan yang sudah ada tapi justru sebagai upaya memenuhi kebutuhan *user* yang senantiasa berkembang dan berubah.

Organisasi yang efektif seharusnya tidak menghindari perubahan. Sebaliknya, mereka harus mengantisipasi dan menyesuaikan kegiatan operasional sehari-hari dalam upaya untuk menyelaraskan dengan perubahan yang sangat cepat. Ketujuh elemen dalam 7S McKinsey yang dibahas di awal, dapat mempengaruhi perilaku organisasi yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas organisasi. Pada dasarnya, perilaku organisasi merupakan variabel dependen, sedangkan ketujuh elemen 7s McKinsey dan *alignment* di antaranya merupakan variabel independen.

Untuk mencapai perilaku yang diharapkan, organisasi perlu ditata kembali. Namun, penataan ulang masing-masing elemen menjadi sangat kompleks, terutama pada elemen-elemen yang bersifat *intangible* seperti *style*, *skill*, dan *shared*

values. Oleh karena itu, penataan organisasi dalam praktiknya disimplifikasi dengan mengacu kepada pandangan fungsionalis yang dikemukakan oleh Blau (1970). Pada intinya, pandangan fungsionalis mengacu kepada prinsip organisasi rasional yang menekankan pada struktur sebagai alat utama untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga, untuk menghadapi *contingency* (perubahan lingkungan maupun pertumbuhan internal), organisasi akan melakukan perubahan secara rasional dengan cara perubahan struktural seperti penambahan atau pengurangan anggota organisasi.

Jadi, pada praktiknya transformasi organisasi difokuskan kepada perubahan struktur organisasi (*structure*) dalam konteks ketujuh elemen 7S McKinsey sehingga tidak mengabaikan pengaruh keenam elemen lainnya. Hal ini tepat dilakukan dalam konteks BPPK, di mana elemen *shared values*, *strategy*, dan *style/aspiration* merupakan variabel yang *given*. Artinya, ketiga variabel tersebut telah ada dan tidak dapat diubah karena adanya unsur *legacy* yang telah tertanam selama bertahun-tahun. Struktur yang ada ditata ulang dengan mengacu kepada tiga variabel *given* tersebut. Penataan struktur akan menimbulkan kebutuhan penyesuaian kepada elemen *system*, *staff*, dan *skill* sehingga akan tetap selaras dengan struktur yang ada dan menghasilkan perilaku yang diharapkan untuk mencapai efektivitas organisasi. Dalam merancang struktur organisasi, terdapat lima parameter penting yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Spesialisasi

Spesialisasi adalah pembagian dan alokasi pekerjaan pada individu maupun departemen. Spesialisasi dapat terjadi secara horizontal, di mana pembagian pekerjaan terjadi pada level jabatan yang sama atau secara vertikal di mana pekerjaan tertentu membutuhkan otoritas yang berbeda sehingga memunculkan level hierarki baru.

2. Integrasi

Pengelompokan fungsi-fungsi yang sejenis ke dalam suatu departemen (departementalisasi) dan diikat dengan standarisasi yang dituangkan dalam *standard operating procedure* (SOP).

3. Formalisasi

Standard operating procedures (SOP) diwujudkan dalam dokumen tertulis yang kemudian diformalisasi menjadi suatu aturan yang baku dan mengikat bagi setiap anggota organisasi.

4. Kewenangan

Kewenangan merupakan pendistribusian otoritas dalam pelaksanaan tindakan maupun penggunaan sumber daya organisasi. Terkadang, lingkungan kerja yang dinamis menimbulkan kondisi dimana anggota organisasi perlu bertindak di luar SOP yang berlaku. Apabila kewenangan untuk bertindak di luar SOP semakin terkonsentrasi kepada level hierarki yang tinggi, maka organisasi tersebut semakin tersentralisasi. Namun, apabila kewenangan ini semakin terdistribusi pada level bawah hirarki, maka organisasi tersebut semakin terdesentralisasi.

5. Pengendalian

Merupakan kemampuan organisasi untuk mengoordinasikan dan memotivasi anggotanya untuk bekerja dan berperilaku sesuai dengan kepentingan organisasi. Pengendalian diwujudkan melalui penataan sistem informasi dan sistem *reward & punishment*.

Kelima parameter tersebut akan menjadi pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi baru BPPK yang tepat untuk menghasilkan perilaku organisasi yang efektif. Sehingga, pada akhirnya, BPPK memiliki kapabilitas untuk mencapai tujuan organisasinya, serta pada gilirannya mampu menyediakan kebutuhan sumber daya manusia dalam rangka mendukung reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI BARU BPPK

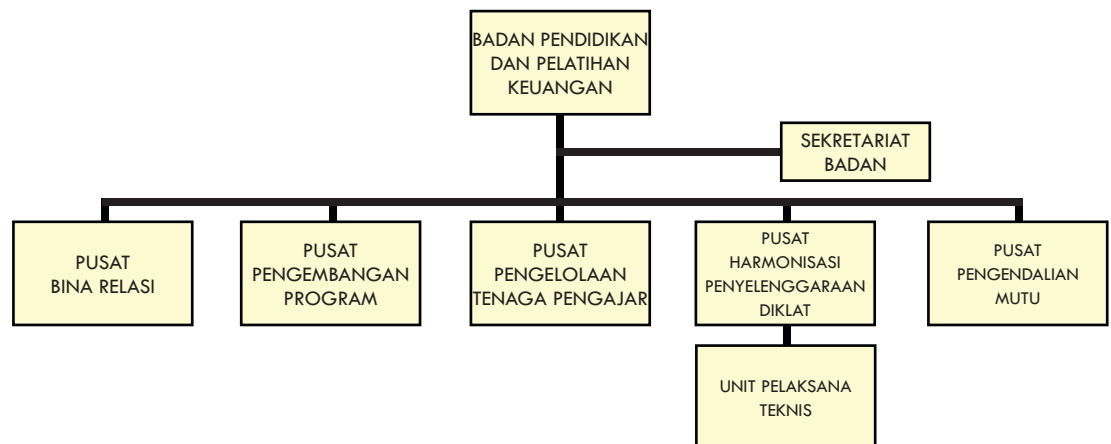
Dengan adanya perubahan strategi dalam spesialisasi tugas dan fungsi, maka BPPK juga perlu mengubah pengelompokan/departementalisasi tingkat Eselon II. Struktur organisasi BPPK yang diusulkan lebih menekankan kepada fungsi/proses organisasi modern, yaitu fungsi yang diperlukan dalam menjalankan keseluruhan proses bisnis BPPK, seperti penyelenggaraan dan pengembangan infrastruktur diklat, bina relasi, pengelolaan tenaga pengajar, pengawasan mutu diklat dan pengembangan program. Oleh karena itu, pusdiklat-pusdiklat yang sebelumnya lebih berorientasi pada 'pasar' menurut jenis konsumen/kebutuhannya ditransformasi menjadi Pusat Bina Relasi, Pusat Pengembangan Program, Pusat Pengelolaan Tenaga Pengajar, Pusat Harmonisasi Penyelenggaraan Diklat, dan Pusat Pengendalian Mutu.

Fungsi dan peranan utama masing-masing Eselon II di struktur organisasi BPPK baru adalah sebagai berikut:

- **Sekretariat Badan**
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif dan konsultatif kepada semua unsur di lingkungan Badan.
- **Pusat Bina Relasi**
Melakukan pengoleksian dan harmonisasi informasi *training program*, serta melaksanakan pengelolaan beasiswa.
- **Pusat Pengelolaan Tenaga Pengajar**
Mengelola pengadaan, pengembangan dan penugasan tenaga pengajar.
- **Pusat Pengembangan Program**
Melakukan pengembangan *training program* sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan perkembangan lingkungan.
- **Pusat Harmonisasi Penyelenggaraan Diklat**
Melaksanakan harmonisasi penyelenggaraan *training program*, serta menginventarisasi, mengembangkan, menstandarisasi, dan memelihara infrastruktur *training*.
- **Pusat Pengendalian Mutu**
Menilai, mengembangkan, dan mengendalikan standar kerja berbasis risiko dan standar kinerja.

Parameter penting dalam merancang struktur organisasi





Gambar 4 : Struktur Organisasi Baru BPPK

PERBEDAAN ORGANISASI BPPK SAAT INI DENGAN ORGANISASI BARU

PARAMETER	ORGANISASI SAAT INI	ORGANISASI BARU
Spesialisasi	Spesialisasi dibagi berdasarkan 'konsumen' yang dilayani yaitu lembaga-lembaga di Kementerian Keuangan.	Spesialisasi dibagi berdasarkan fungsi untuk menjalankan keseluruhan proses bisnis BPPK.
Integrasi	- Departementalisasi dilakukan dengan membentuk pusdiklat - pusdiklat sesuai dengan 'konsumen' diklat. - Standardisasi yang dituangkan dalam SOP ditetapkan oleh masing-masing pusdiklat sehingga timbul perbedaan standar antar-pusdiklat.	- Departementalisasi dilakukan dengan mengelompokkan fungsi-fungsi yang terkait. - Standardisasi yang dituangkan dalam SOP ditetapkan oleh BPPK pusat dan berlaku untuk seluruh jenis diklat bagi seluruh 'konsumen'.
Formalisasi	Mengikuti departementalisasi dan standardisasi pada organisasi saat ini.	Mengikuti perubahan departementalisasi dan standardisasi organisasi baru.
Kewenangan	Cenderung terdesentralisasi karena penyelenggaraan fungsi diklat dilaksanakan oleh setiap pusdiklat yang ada.	Menjadi lebih tersentralisasi dengan adanya standardisasi serta penyelenggaraan fungsi dilaksanakan secara terpusat.
Pengendalian	Sistem pengendalian yang dilakukan bersifat <i>compliance</i> individu.	Sistem pengendalian dilakukan dengan manajemen mutu, di samping <i>compliance</i> .

*The
Changing*

PRODUCT (EXISTING)

PROCESS (FUTURE)

KEUNGGULAN

SPECIALISASI FUNGSI

mendorong pengembangan kompetensi para pemangku jabatan karena adanya fokus dalam pelaksanaan tugas

PERUBAHAN DEPARTEMENTALISASI

menghindarkan terjadinya 'silo' dan memudahkan pengawasan

SENTRALISASI STANDARDISASI

memudahkan standarisasi dalam berbagai proses organisasi yang bersifat strategis

KEUNGGULAN STRUKTUR ORGANISASI BARU BPPK

Struktur organisasi baru BPPK yang diusulkan dengan pendekatan di atas, memiliki beberapa kekuatan kunci sebagai berikut:

1. Spesialisasi fungsi untuk mendorong pengembangan kompetensi para pemangku jabatan

Spesialisasi fungsi dalam organisasi baru dapat mendorong pengembangan kompetensi para pemangku jabatan karena adanya fokus dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, spesialisasi juga memudahkan para pemangku jabatan untuk meng-*update* pengetahuan dan keterampilan seiring dengan perkembangan kondisi lingkungan dan tuntutan global, terutama dalam mengembangkan kapabilitas tenaga pengajar serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

2. Perubahan departementalisasi dapat menghindarkan 'silo' yang terjadi pada struktur organisasi saat ini

Struktur organisasi ini dapat menghindarkan terjadinya 'silo' yang timbul dalam struktur organisasi saat ini. Apabila 'silo' antar pusdiklat dapat dihilangkan, maka *sphere of influence* akan menjadi terpusat kepada Kepala Badan sehingga pada gilirannya Kepala Badan dapat mengawal ketunggalan komando atas para pejabat eselon II di BPPK. Hal ini akan mengoptimalkan peran Kepala Badan sekaligus memudahkan pengawasan secara keseluruhan.

3. Sentralisasi untuk memudahkan standarisasi

Peningkatan sentralisasi yang juga menjadi tujuan struktur organisasi baru akan memudahkan standarisasi dalam berbagai proses organisasi yang bersifat strategis. Misalnya dalam modernisasi sarana dan prasarana kediklatan dan pengembangan tenaga pengajar, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

TANTANGAN STRUKTUR ORGANISASI BARU BPPK

BPPK menyadari bahwa selalu ada *trade-off* yang harus diambil dalam suatu strategi. Begitu juga dengan rancangan struktur baru, terdapat beberapa risiko yang harus dipertimbangkan.

1. Kebutuhan kompetensi dan regenerasi SDM untuk menyukseskan implementasi rancangan organisasi baru

Tantangan terbesar ada pada sumber daya, khususnya sumber daya manusia. Konfigurasi SDM yang disyaratkan untuk suksesnya implementasi rancangan organisasi baru sampai saat ini belum tersedia. Sedangkan transformasi kelembagaan dan penataan organisasi di lingkungan BPPK merupakan agenda yang harus segera dilaksanakan. Dengan kata lain, mencari pejabat yang memenuhi syarat kompetensi untuk masing-masing jabatan baru dalam organisasi baru BPPK merupakan tantangan yang serius.

Selain itu, terdapat tantangan lain yaitu perlunya regenerasi SDM yang membutuhkan waktu lama (minimal 2 tahun) di samping membiasakan seluruh anggota organisasi BPPK mengadopsi perilaku-perilaku baru yang belum lazim dilaksanakan, terutama dalam hal koordinasi antar unit-unit kerja yang baru.

2. Potensi munculnya perbedaan persepsi di antara *stakeholders* BPPK

Rancangan organisasi yang baru berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi di antara para *stakeholders* BPPK, baik internal maupun eksternal khususnya lingkungan eselon 1 Kementerian Keuangan yang selama ini menjadi mitra BPPK. Perbedaan persepsi dapat memunculkan konflik dan menghasilkan kondisi yang tidak kondusif bagi percepatan adaptasi perilaku anggota organisasi BPPK dalam fungsi-fungsi organisasi yang baru dan fokus kepada "user".

*Penulis adalah Kasubbag Tata Laksana Bagian OTL, Sekretariat BPPK

MEMAKNAI SUATU PERUBAHAN

Foto : Gathot Subroto

OLEH : SURONO

Perubahan memiliki efek psikologis yang sangat besar kepada pikiran manusia. Untuk mereka yang takut akannya (takut akan perubahan), perubahan tersebut terasa menjadi ancaman karena dengan perubahan ada kemungkinan segala hal menjadi lebih buruk lagi. Tetapi bagi mereka yang berani dan percaya diri, adanya suatu perubahan justru menyenangkan dan memberi inspirasi karena di situ ada kesempatan untuk membuat segala sesuatu lebih baik lagi dari yang sekarang.

-King Whitney Jr.-

Perubahan Sebagai Keniscayaan

Pada tahun 2004, Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa *Harvard University*, dalam usianya yang belum genap 20 tahun mencoba mengotak-atik suatu program pembuatan *website*. Idenya cukup sederhana. Bagaimana menciptakan program tersebut menjadi suatu media yang bisa menghubungkan teman-teman satu kampusnya. Ia hanya butuh waktu sekitar dua minggu untuk membuat situs ini, yang kemudian diberi nama *facebook*. Selanjutnya ia mengumumkan situsnya dan mengajak teman-teman sekampusnya untuk bergabung ke dalam *facebook*. Ternyata sambutanannya luar biasa. Dalam waktu singkat, *facebook* telah menjaring sekitar dua pertiga dari keseluruhan mahasiswa Harvard. Kemudian dalam waktu sekitar

empat bulan *facebook* telah menjaring keanggotaan mahasiswa dari 30 kampus yang ada di Amerika.

Mendapatkan kondisi yang luar biasa ini, seorang Mark muda mulai berfikir jauh ke depan. Ia memimpikan *facebook* bisa menjadi pesaing *friendster* yang saat itu sedang *trend* di dunia. Untuk serius menggarap *facebook* ini, Mark memutuskan untuk melakukan perubahan besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk *drop-out* dari kampusnya. Bersama dengan tiga rekannya, McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes, Mark kemudian membesarkan *facebook*. Hasilnya sungguh sangat luar biasa. *Facebook* menjadi situs jejaring sosial nomor satu di dunia. *Facebook*-lah yang mengantarkan pria muda berusia 27 tahun ini menjadi miliarder termuda sepanjang sejarah.

Dalam kisah inspiratif lainnya, partai PAP pimpinan Lee Kuan Yew berhasil memenangkan pemilu di Singapore pada tahun 1959. Lee kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri Singapore. Kondisi Singapore saat itu cukup memprihatinkan. Kas negara dalam keadaan kosong, kekayaan alam tidak ada, penerapan hukum sangat buruk, konflik antar etnis sering terjadi, diperparah lagi dengan perilaku masyarakat yang sangat jorok. Lee hanya punya impian dan semangat untuk menjadikan Singapore menjadi lebih baik. Untuk mencapai hal itu maka tidak boleh tidak, Singapore harus berubah.

Perubahan mendasar pertama yang dilakukan oleh Perdana Menteri Lee adalah mengubah *mindset* masyarakat Singapore menjadi bangsa yang berdisiplin tinggi. Aturan kedisiplinan dan sanksi yang tegas diterapkan tanpa pandang bulu. Masyarakat Singapore, baik warga negara Singapore sendiri maupun orang asing dilarang membuang sampah sembarangan, melakukan vandalisme, berambut gondrong, ataupun bertindak tidak tertib di jalan. Ancaman sanksi denda yang sangat besar menanti bagi siapa saja yang melanggar. Pemerintahan Lee menerapkan aturan ini secara konsisten. Hal inilah yang menjadi kunci keberhasilan penerapan aturan kedisiplinan tersebut.

Di sisi lain, strategi Lee menciptakan "*the new Singapore*" dilandasi dengan prinsip-prinsip keunggulan daya saing yang memanfaatkan posisi strategis Singapore sebagai pusat lintasan perdagangan dunia di kawasan Asia Tenggara. Untuk mencapai produktivitas yang tinggi, Lee menjamin pemerintahannya bersih dari korupsi, masyarakat Singapore yang lebih disiplin, dan industrialisasi yang dikawal oleh tenaga-tenaga profesional. Pada akhirnya usaha Perdana Menteri Lee ini membuahkan hasil yang memuaskan. Singapore tampil menjadi raksasa ekonomi Asia yang dapat disejajarkan dengan bangsa-bangsa maju di dunia.

Berkaca pada dua kisah inspiratif tersebut kita dapat mengambil suatu hikmah positif mengenai makna perubahan. Perubahan adalah suatu keniscayaan yang perlu dilakukan oleh siapapun yang ingin mencapai hasil lebih baik. Namun perubahan membutuhkan pengorbanan. Manusia harus siap keluar dari zona nyaman mereka dan berjuang untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tiada kehidupan tanpa perubahan. Manusia yang tidak berubah maka akan digerus oleh perubahan.

Langkah Perubahan

Rheinald Kasali dalam bukunya *Change* (2005) memberikan tips sederhana bagi organisasi yang sedang melakukan perubahan. Ada tiga langkah yang perlu dilakukan, yaitu: melihat, bergerak, dan menyelesaikan sampai tuntas. Sesungguhnya persoalan dalam perubahan seringkali muncul akibat kegagalan dalam mengantisipasi ketiga langkah tersebut. Tugas pemimpinlah mengantisipasi perubahan dengan cara mengajak untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ia harus menjadi lokomotif perubahan dan juga memberikan energi kepada bawahannya agar menyelesaikan perubahan secara tuntas.

Langkah pertama proses perubahan adalah "melihat". Ada ungkapan "*seeing is believing*". Melihat perubahan bukanlah suatu perkara yang mudah. Seringkali organisasi terjebak dengan suasana *comfortable* sehingga menganggap bahwa kondisi saat ini sudah cukup bagi mereka. Perubahan yang muncul sama sekali tidak nampak dan seringkali tertutup oleh kabut kecemasan dan ketakutan. Bahkan perubahan yang nyata-nyata sudah di depan mata, tetapi tetap saja disangkal dan berupaya untuk ditutup-tutupi. Sebagai contoh, ketika badai krisis moneter menerpa Asia pada Juli 1997, yang diawali dengan kebijakan Thailand mengambang mata uang baht terhadap dollar USA. Kondisi ini memiliki efek domino terhadap kejatuhan mata uang negara-negara Asia lainnya, termasuk rupiah. Akan tetapi, pemerintah Indonesia saat itu masih yakin bahwa fundamental ekonominya masih kuat. Perubahan yang ada masih belum dipercayai sepenuhnya. Antisipasi yang terlambat dan diperparah dengan kepanikan di dalam negeri membuat rupiah semakin jatuh lebih dalam. Indonesia saat itu, tergilas oleh perubahan.

Untuk melihat perubahan, organisasi membutuhkan pemimpin yang visioner. Kasali mengibaratkan pemimpin sebagai mata. Pemimpin idealnya memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang belum kelihatan bagi banyak orang. Dengan kelebihan pengetahuan, kecerdasan, ketajaman dan intuisinya, pemimpin mampu mengumpulkan mozaik yang terpecah-pecah menjadi suatu gambar yang utuh. Tugas selanjutnya adalah membantu mengajak agar orang-orang di sekitarnya dapat melihat perubahan tersebut. Black & Gregersen (dalam Kasali, 2005) mereferensikan tiga cara untuk mengajak orang melihat. Ketiga cara itu adalah menciptakan kontras yang tajam, menciptakan konfrontasi yang efektif, dan menggabungkan keduanya.

Langkah
perubahan

1
Melihat



2 Bergerak

Langkah kedua dalam proses perubahan adalah “bergerak”. Membuat orang-orang dapat melihat perubahan tidaklah cukup. Sebagian besar orang yang menyadari adanya suatu perubahan bersikap “wait and see”. Hal ini dapat dimaklumi karena perubahan memiliki efek psikologis yang sangat besar kepada pikiran manusia. Bagi mereka yang pesimis maka perubahan menjadi ancaman. Mereka dihantui dengan bayangan buruk mengenai kemungkinan segala hal yang akan menjadi lebih buruk lagi. Disinilah peran penting pemimpin dibutuhkan. Pemimpin hendaknya menjadi penyemangat bagi setiap orang dalam organisasi.

Untuk bergerak, organisasi membutuhkan dukungan dan kerjasama tim. Idealnya tim ini bertindak sebagai agen perubahan (*change agents*) yang bertugas menggalang dukungan, memotivasi orang lain dan mengajak orang-orang bergerak searah dengan perubahan. Ibarat sebuah bola salju maka *change agents* terus bergerak maju sambil merangkul orang-orang lain yang masih ragu. Hal ini akan berhasil apabila didukung oleh *blueprint strategy* yang jelas. Kasali mendeskripsikan *blueprint strategy* sebagai rumusan yang mencakup tiga hal sekaligus, yaitu: tujuan dan sasaran yang jelas (*a clear destination*), peralatan atau dukungan sumber daya yang memadai (*resources*), dan imbalan (*rewards*) yang memadai untuk insentif.

Langkah terakhir dalam proses perubahan adalah menyelesaikannya sampai tuntas. Semangat perubahan seringkali begitu besar pada fase awal namun semakin menurun dalam perjalanannya. Ada dua alasan utama yang menyebabkan organisasi gagal menyelesaikan perubahan yaitu karena kelelahan atau kehilangan kepercayaan. Lagi-lagi peran pemimpin dibutuhkan dalam kondisi ini. Pemimpin harus tetap menjadi obor bagi perubahan. Pemimpin senantiasa memberi-

kan semangat dan memotivasi orang-orang dalam organisasi agar mampu menyelesaikan perubahan sampai tuntas.

Refleksi Bagi BPPK

Proses perubahan di BPPK sudah bergulir sejak 2010 yang lalu. Semangat perubahan yang mengemuka saat itu adalah bagaimana memperkuat peran sentral BPPK sebagai unit diklat dan keluar dari silo-silo departementalisasi. *Blue print strategy* perubahan BPPK telah disusun. Sinyal-sinyal perubahan sudah dinyalakan oleh Menteri Keuangan. Meskipun terkesan berjalan lambat namun lokomotif perubahan BPPK sudah berjalan pada *track* yang direncanakan.

Dua tahun sudah berlalu, namun nuansa perubahan belum sepenuhnya dirasakan oleh segenap insan BPPK. Hal ini menjadi “PR” besar bagi tim *change agents* BPPK agar terus menggulirkan bola salju perubahan BPPK. Setiap pegawai hendaknya diberikan pemahaman bahwa BPPK sedang menuju “*the new BPPK*”. Semua unsur organisasi harus siap menyongsong BPPK baru yang diharapkan akan menjadi jembatan menuju sesuatu yang lebih baik. Janganlah menjadi seorang pesimis yang ragu dan cemas terhadap perubahan. Jadilah “si pemberani dan percaya diri” yang siap menyongsong perubahan. Perubahan adalah suatu kesempatan untuk membuat segala sesuatu lebih baik lagi dari yang sekarang.

Referensi:

- Rheinald Kasali, 2005. *Change*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Biografi Mark Zuckerberg - Pendiri Facebook. Sumber online: <http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/10/biografi-mark-zuckerberg-pendiri.html>

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Bea dan Cukai

Selesaikan sampai tuntas

e-Rekon, *Do the right things right* (Sebuah Alternatif Solusi)

OLEH : SUPRIYANTO

Prestasi besar dan bersejarah bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah telah dilakukannya inventarisasi dan penilaian terhadap seluruh Barang Milik Negara (BMN) di Indonesia. Kegiatan tersebut telah berhasil membukukan nilai kekayaan Negara Indonesia yang berada dalam penguasaan seluruh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri.

Sebuah awal yang luar biasa ini merupakan modal yang sangat berharga, bahkan mungkin layak untuk disejajarkan dengan pentingnya awal pelaksanaan sensus penduduk bagi bangsa ini. Betapa tidak? Sepanjang sejarah belum pernah ada institusi yang berhasil menghitung dan membukukan nilai kekayaan negara Indonesia. Keberadaan BMN yang telah terbukukan dengan baik tersebut perlu ditindaklanjuti dengan upaya meng-*update* data seiring berjalannya waktu.

Selain agenda inventarisasi ulang secara berkala, kegiatan pemutakhiran data juga harus dilakukan. Mengingat pentingnya hal tersebut, DJKN melakukan rekonsiliasi BMN. Rekonsiliasi BMN

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pengaturan lebih lanjut dari PMK tersebut adalah Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Tulisan ini dibatasi pada rekonsiliasi tingkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN walaupun tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan di level-level di atasnya.



Situasi Rekonsiliasi BMN di KPKNL Manado

Wajah Rekonsiliasi

Pada saat tulisan ini dibuat, teman-teman DJKN sedang menyelesaikan rekonsiliasi Semester II dan Tahunan 2011. Tidak terdapat perubahan signifikan, baik ketentuan, aplikasi maupun prosedur rekonsiliasi. Hanya terdapat *update* aplikasi rekonsiliasi (Modul KN) sehingga diharapkan rekonsiliasi dapat berjalan dengan lancar.

Rekonsiliasi BMN dibagi dalam beberapa jenjang dan kelompok yaitu: rekonsiliasi internal Kementerian Negara/Lembaga yang meliputi rekonsiliasi tingkat satuan kerja, tingkat wilayah, tingkat Eselon 1, dan tingkat Pengguna; Rekonsiliasi antara Kementerian Negara/Lembaga dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang meliputi rekonsiliasi tingkat satuan kerja, tingkat wilayah, tingkat Eselon 1, dan tingkat Pusat; Rekonsiliasi antara Kementerian Negara/Lembaga dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi rekonsiliasi tingkat UAKPA, tingkat UAPPA-W, tingkat UAPPA-E1, dan tingkat UAPA; dan Rekonsiliasi pada Bendahara Umum Negara yaitu antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi rekonsiliasi tingkat daerah, tingkat wilayah dan tingkat pusat.

Apabila dilihat dari bentuknya, rekonsiliasi data BMN dapat dilaksanakan dalam dua bentuk. Pertama yaitu

pertemuan langsung, dimana petugas dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang membawa langsung data dan melakukan rekonsiliasi dengan DJKN. Kedua, penyampaian data dan konfirmasi dilakukan secara elektronik. Dalam dua bentuk rekonsiliasi tersebut tetap dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi sebagaimana ketentuan. Demikian juga dengan proses pelaksanaannya. Rekonsiliasi data BMN dapat dilaksanakan baik secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada yang dibuat khusus dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi BMN.

Sampai dengan saat ini tidak terdapat pembakuan format pelayanan kegiatan rekonsiliasi di tingkat KPKNL dan Kanwil DJKN. Masing-masing kantor melakukan persiapan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain: jumlah satuan kerja yang dilayani; ketersediaan tempat pelaksanaan rekonsiliasi; kondisi geografis yang dihadapi oleh satuan kerja yang dilayani; jumlah SDM yang melayani rekonsiliasi; waktu yang ditentukan untuk melakukan rekonsiliasi; dan jumlah satuan kerja kategori DK/TP.

Walaupun dimungkinkan oleh ketentuan untuk melakukan rekonsiliasi secara elektronik, hampir semua kantor melakukan rekonsiliasi langsung. Hal ini tentu membutuhkan ruangan yang memadai untuk menerima petugas akuntansi barang dari Pengguna/Kuasa

Pengguna Barang. Sebagai salah satu solusi terjadinya penumpukan peserta rekonsiliasi adalah dengan membuat jadwal rekonsiliasi sesuai Kementerian Negara/Lembaganya. Jumlah satker dibagi dalam jumlah hari kerja pada masa rekonsiliasi. Alternatif lain adalah membuka kesempatan bagi satuan kerja untuk datang selama masa rekonsiliasi, tetapi hal ini memungkinkan terjadinya penumpukan satuan kerja pada hari tertentu.

Kondisi ini diperparah dengan tidak meratanya kemampuan operator SIMAK BMN dari satuan kerja. Tidak semua operator SIMAK BMN satker melakukan input data pada aplikasi dengan benar. Demikian juga halnya dengan kemampuan untuk meyajikan data sebagai bahan rekonsiliasi sebagaimana ketentuan. Tidak jarang petugas dari KPKNL maupun Kanwil DJKN melayani dan mengasistensi mulai dari instalasi aplikasi SIMAK BMN, mengajari input data sampai dengan menunjukkan cara pengisian berita acara internal.

Idealnya kemampuan petugas rekonsiliasi dari satuan kerja yang datang pada semester ini harusnya lebih baik dari semester yang lalu. Bukankah telah dilakukan sosialisasi sebelumnya dan bahkan pendampingan kepada mereka? Ternyata dalam kenyataannya tidak seperti itu. Banyak operator baru yang muncul di setiap semester yang memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan rekonsiliasi. Bahkan satu satuan kerja dapat datang berkali-kali dalam masa rekonsiliasi untuk dapat menyelesaikan rekonsiliasi dengan benar. Neraca hasil *print out* dari aplikasi SAKPA dan SIMAK BMN seharusnya sama, kecuali ada catatan yang menerangkan perbedaan yang terjadi. Sebelum melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL, satker seharusnya telah melakukan rekonsiliasi internal. Hal sederhana ini pun masih sering dijumpai sebagai masalah dalam rekonsiliasi. Beberapa kemungkinan yang menjadi penyebabnya, antara lain transaksi di SAKPA belum dikirim ke SIMAK BMN. Kemungkinan lain operator melakukan perubahan data pada aplikasi

karena menganggap hasil rekonsiliasi periode yang lalu mengandung kesalahan. Seringkali rekonsiliasi (rekon) di tingkat Eselon 1 Kementerian Negara/Lembaga merubah hasil rekon di tingkat bawahnya. Hal ini terkadang tidak dilaporkan kepada KPKNL maupun Kanwil DJKN. Dapat juga hal ini disebabkan kesalahan input pada aplikasi serta banyak penyebab lainnya.

Sebagai ilustrasi, diasumsikan suatu KPKNL melayani 600 satker dengan petugas rekon KPKNL sebanyak 3 orang (sesuai jumlah meja pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu). Waktu pelayanan rata-rata termasuk proses asistansi adalah 20 menit/satker (pada kenyataannya dapat lebih dari 20 menit). Satker yang menyelesaikan rekonsiliasi sesuai jadwal dengan benar antara 70%-90%. Artinya terdapat 10%-30% satker harus kembali di lain hari untuk menyelesaikan rekonsiliasi. Rekon adalah rekon semester I yang dilakukan pada tanggal 1-7 Juli, dimana tanggal 1 jatuh pada hari Senin, maka satker dibagi dalam 5 hari kerja sebagai tertera pada Tabel 1.

Ketentuan menyebutkan bahwa rekonsiliasi semester I dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 7 Juli. Berbeda halnya apabila diatur rekonsiliasi semester I dilakukan 7 hari kerja pada bulan berikutnya (Juli).

Berbagai pertanyaan kemudian muncul di benak kita. Apakah mungkin KPKNL atau Kanwil DJKN menyelesaikan rekon dengan kondisi sebagaimana ilustrasi di atas? Berapa meja dan kursi yang harus disiapkan untuk melayani satker jika satu satker yang datang rekon adalah 2 orang? Apabila seorang pelaksana siap melayani pada pukul 07.30 dan harus istirahat sholat dan makan, maka jam berapa ia bisa pulang ke rumah? Bagaimana dengan satker tunda, apakah penyelesaian pekerjaan akan melewati batas waktu rekon? Apakah semua kantor telah memberlakukan aturan rekon dengan benar, termasuk penguasaan sanksi?

Rekon langsung mengandung konsekuensi keluarnya biaya di pihak satker. Dalam pelaksanaan rekon, satker biasanya mengirimkan lebih dari satu

Tabel 1: Ilustrasi Rekonsiliasi BMN Semester I di KPKNL (1 s.d. 7 Juli)

Hari/ Tanggal	Jumlah Satker	Waktu Pelayanan @20 menit	Waktu Pelayanan/ petugas KPKNL (3 orang)	Satker Selesai	Satker Tunda
Senin/1	120	2400 menit	800 menit (13,33 jam)	90% (108)	12
Selasa/2	120	2400 menit	800 menit (13,33 jam)	85% (102)	18
Rabu/3	120	2400 menit	800 menit (13,33 jam)	80% (96)	24
Kamis/4	120	2400 menit	800 menit (13,33 jam)	75% (90)	30
Jumat/5	120	2400 menit	800 menit (13,33 jam)	70% (84)	36
Sabtu/6	Libur				
Minggu/7	Libur				
Jumlah				80% (480)	120

petugas ke KPKNL atau ke Kanwil DJKN. Surat tugas dan SPPD biasanya 2-3 hari. Apabila masih diperlukan perbaikan data, kemungkinan petugas akan datang lebih dari satu kali. Bagi satker yang pada tahun berjalan mendapatkan alokasi dana DIPA, hal ini mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Namun bagaimana dengan satker yang sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan dana DIPA dan harus tetap melakukan rekonsiliasi?

Itulah wajah rekon yang ada di sebagian besar KPKNL dan Kanwil DJKN sampai dengan saat ini. Kendala begitu banyak, alternatif solusi juga banyak. Dalam tulisan ini ditawarkan sebuah alternatif solusi agar rekon BMN dapat lebih lancar, hasilnya juga lebih akurat dan akuntabel serta pelaporan sebagai akhir dari kegiatan rekon juga lebih efektif dan efisien.

e-Rekon, Sebuah Alternatif Solusi

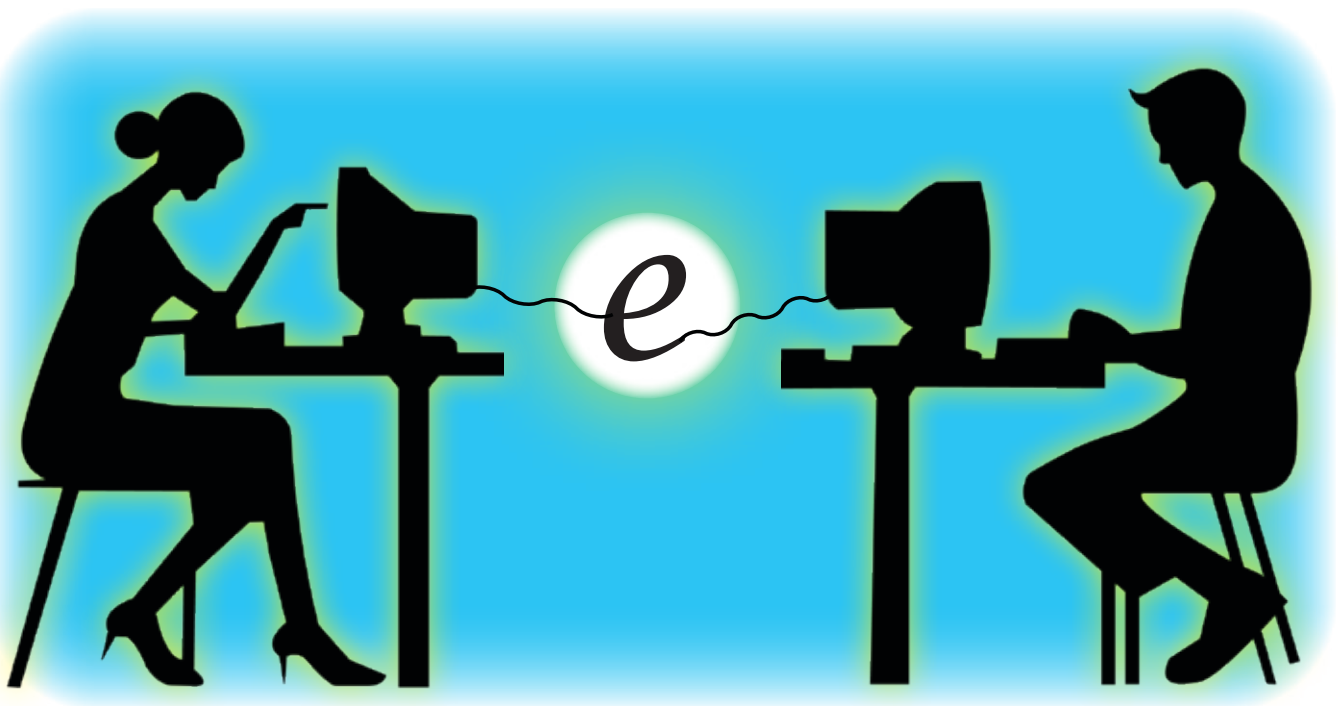
Rekonsiliasi data barang milik negara harus dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal penyampaian laporan. Tahapan mulai dari rekon internal kementerian negara/lembaga, rekon dengan DJKN, rekon pada BUN terikat oleh waktu sebagaimana diatur dalam Perdirjen Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009. Sumber daya manusia KPKNL maupun Kanwil DJKN yang harus melayani setiap petugas rekon dari satker jumlahnya sangat terbatas. Demikian juga dengan tempat pelaksanaan rekon, selain Tempat Pelayanan

Terpadu (TPT), juga perlu ruang untuk konsultasi dan asistansi. Jumlah satker dalam wilayah kerja KPKNL atau Kanwil DJKN rata-rata sangat besar. Tingkat kesalahan data dari satker pada saat rekon dengan DJKN masih cukup tinggi.

Kondisi seperti tersebut di atas dapat diatasi dengan salah satunya pemberlakuan e-Rekon atau rekon secara elektronik. Hal ini tidak menyalahi ketentuan karena diperkenankan melakukan rekon data secara elektronik tanpa harus dilakukan pertemuan langsung. Dari sisi pengeluaran negara, kegiatan e-Rekon ini akan mengurangi biaya khususnya perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor. Data yang diperoleh dari satker juga dapat lebih baik sehingga laporan BMN dari DJKN juga dapat cepat, akurat dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan rekon, terdapat dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai kelengkapan rekon. Sebagai contoh untuk rekon dengan KPKNL, dokumen kelengkapan rekon berupa :

1. Berita Acara Rekonsiliasi Internal UAKPA dan UAKPB.
2. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada UAKPB, beserta Arsip Data Komputer (ADK).
3. Dokumen pengelolaan BMN dapat meliputi:
 - Rekapitulasi data/laporan pengelolaan BMN;
 - Dokumen persetujuan/penetapan pelaksanaan pengelolaan BMN dari Pengelola Barang;



- Dokumen tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan BMN, meliputi namun tidak terbatas pada Surat keputusan penghapusan dari Pengguna Barang, Berita acara serah terima pengelolaan BMN, risalah lelang BMN, dan/atau kontrak/naskah perjanjian pemanfaatan BMN.
 - 4. Dokumen lainnya yang dianggap perlu.
Untuk dapat melakukan e-Rekon tentu saja perlu dipersiapkan *tool* yang tepat. Selain aplikasi *base on internet*, perlu juga dipersiapkan payung hukum bagi pelaksanaan e-Rekon ini. Aplikasi rekonsiliasi BMN paling tidak dapat menjawab tuntutan sebagai berikut:
 - Aplikasi dapat dioperasikan oleh operator SIMAK BMN pada setiap Satker dengan prosedur yang sederhana,
 - Aplikasi dapat dioperasikan dengan menggunakan komputer dengan spesifikasi tertentu yang dapat dijangkau oleh seluruh Satker,
 - Masih dimungkinkan rekon manual untuk satker yang tidak dapat mengakses internet, baik dengan datang langsung maupun mengirimkan ADK lewat email KPKNL atau Kanwil DJKN,
 - Rekon dilakukan dengan melakukan registrasi pada aplikasi dengan tetap mengikuti persyaratan rekon yang sudah diatur,
 - Pihak KPKNL dan Kanwil DJKN memiliki *data base* yang akurat dan tersimpan dengan baik di server masing-masing kantor,
 - Setiap rekon internal dapat langsung terpantau di KPKNL maupun Kanwil DJKN sehingga memudahkan pengawasan,
 - Setiap perubahan saldo awal dapat diakomodir dengan tetap menggambarkan *history* perubahan tersebut termasuk penyebab perubahannya,
 - Transaksi baik keuangan maupun non keuangan pada periode berjalan dapat dipastikan telah sinkron dengan kedua aplikasi sumber yaitu SIMAK BMN dan SAKPA,
 - Terdapat fasilitas validasi pada aplikasi e-Rekon yang berada pada KPKNL maupun Kanwil DJKN sehingga dapat di kategorikan dalam dua hal : *pending* rekon atau berhasil rekon,
 - Untuk ketidaksinkronan data dapat dikategorikan pending rekon dan tidak muncul nomor berita acara rekon,
 - Bagi satker dengan data telah sesuai dengan saldo awal dan transaksi periode berjalan pada kedua aplikasi sumber dapat diproses menjadi berhasil rekon dengan penerbitan berita acara secara otomatis.
 - Bagi satker dengan kategori berhasil rekon secara otomatis terangkum sesuai wilayah, eselon 1 dan kementerian negara/lembaga sehingga mempercepat proses penghimpunan data di level rekon di atasnya secara hirarkis.
- Untuk dapat membangun e-Rekon bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini harus dimulai dengan pembuatan *data base* yang akurat, aplikasi yang memadai serta komitmen pimpinan untuk mewujudkan 3T : tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik. Pekerjaan berat dan kebutuhan biaya yang besar pada awal pembangunan mekanisme ini dirasakan wajar untuk memperoleh hasil yang optimal di kemudian hari. Upaya bersama ini akan ditorehkan sebagai *mile stone* yang penting bagi pembangunan *Strategic Asset Management* di Indonesia.

*Penulis adalah Widyaiswara
Pusdiklat Pajak



Foto : Gathot Subroto

Analisis Pengalihan PBB P2 Menggunakan CPM & PERT

OLEH : HERU SUPRIYANTO

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang lebih populer dengan istilah PBB P2, telah ditetapkan menjadi pajak daerah (kabupaten dan kota) berdasarkan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Batas waktu yang telah ditetapkan oleh UU PDRD bagi kabupaten kota untuk mengelola PBB P2 yaitu selambat-lambatnya 1 Januari 2014.

Kota Surabaya adalah daerah yang menempati urutan pertama dalam mengelola PBB P2. Belajar dari plus minusnya kota Surabaya mengelola PBB P2, maka di tahun 2012 ini, sebanyak 16 kabupaten kota segera mengikuti jejak kota Surabaya untuk mengelola PBB P2. Dan apabila kita ikuti berita dari internet tentang 16 kabupaten kota tersebut maka kita akan tahu bahwa secara umum mereka telah mengatakan siap dan ingin menjadi *pilot project* di daerahnya masing-masing.

Pertanyaannya adalah sejauhmanakah mereka telah mempersiapkan pengalihan PBB P2 tersebut? Karena setidaknya ada empat hal yang harus dipersiapkan oleh mereka, yaitu a). Sarana dan Prasarana; b). Struktur organisasi dan tata kerja; c). Sumber Daya Manusia dan d). Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Standar Operating Prosedur.

Jika proses pengalihan PBB P2 diibaratkan sebagai proses pendaratan sebuah pesawat terbang maka perlu diusahakan agar pendaratan tersebut berlangsung mulus. Nah, tulisan ini bertujuan memberikan gambaran singkat tentang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengalihan PBB P2. Penggambaran tersebut menggunakan analisis CPM & PERT dan hanya membahas hal-hal yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, sekaligus memberikan gambaran apa yang telah dilakukan oleh Bagian Evaluasi Pendapatan Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

CPM dan PERT

Adalah kepanjangan dari *Critical Path Method* dan *Project Evaluation and Review Technique*, yaitu suatu metode yang apabila digunakan dalam sebuah proyek maka diharapkan proyek tersebut akan berhasil tepat waktu. Tujuan metode ini diantaranya adalah mengurangi penundaan pekerjaan, gangguan produksi, mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara komprehensif dan mempercepat selesainya proyek. Teknik ini memungkinkan dihasilkannya suatu pekerjaan yang terkendali dan teratur, karena jadwal dan anggaran dari suatu pekerjaan telah ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.

CPM dan PERT telah menentukan bahwa a). *Node*, yang menggambarkan kejadian atau event atau peristiwa tidak digambarkan sebagai lingkaran, akan tetapi berbentuk kotak; b). Jenis kegiatan atau peristiwa sengaja tidak ditulis dalam bentuk huruf, akan tetapi berbentuk beberapa kata atau kalimat. Hal ini terpaksa dilakukan semata-mata untuk memudahkan penulisan.

Aktivitas

Menteri Keuangan telah menentukan beberapa aktivitas yang harus dilakukan oleh kabupaten/kota sebelum menerima pengalihan PBB P2. Aktivitas tersebut meliputi: a). Sarana dan Prasarana; b). Struktur organisasi dan tata kerja; c). Sumber Daya Manusia dan d). Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan

Standard Operating Procedures.

Aktivitas-aktivitas tersebut dapat digambarkan melalui Diagram 1.

Persiapan menerima pengelolaan PBB P2 dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota diawali dengan melakukan Bimtek Administrasi PBB yang harus diikuti oleh seluruh aparat DPPKAD kabupaten/kota. Bimtek berikutnya adalah Bimtek Penilai PBB, Bimtek OC, Bimtek Juru Sita dan Workshop Teknologi Informasi. Prasyarat agar bisa mengikuti bimtek tersebut adalah telah mengikuti Bimtek Administrasi PBB.

Setelah aparat DPPKAD mengetahui proses bisnis dalam PBB karena mereka sudah mengikuti semua bimtek maka proses pembuatan peraturan daerah sudah mengikuti semua bimtek maka proses pembuatan peraturan daerah menjadi mudah. Langkah berikutnya adalah membentuk struktur organisasi dan tata kerja yang sesuai kebutuhan untuk melaksanakan proses bisnis PBB.

Setelah struktur organisasi dan tata kerja terbentuk maka dilakukanlah kegiatan berupa pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan organisasi tersebut serta kegiatan pendataan, pemetaan dan penilaian yang akan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Penilai PBB.

Hasil dari dua kegiatan tersebut akan digunakan untuk kegiatan *entry data*. Kegiatan *entry data* dilakukan oleh petugas-petugas pada Seksi Data dan Informasi. Kegiatan selanjutnya adalah cetak massal SPPT di bawah pengawasan petugas *Operating Consule* PBB.

AKTIVITAS MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA

Agar kabupaten/kota memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola PBB P2, maka aktivitas yang harus dilakukan adalah mengadakan bimtek (bimbingan teknis), yaitu suatu istilah yang sudah biasa di Kementerian Dalam Negeri. Kalau di Kementerian Keuangan lebih dikenal dengan istilah pendidikan dan pelatihan (Diklat). Bimtek yang harus dilakukan oleh kabupaten atau kota adalah:

1. Bimtek Administrasi PBB (Kode Aktivitas A)

Diajarkan proses bisnis tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimulai dari pendaftaran objek dan subjek PBB sampai dengan diterbitkannya SPPT PBB, penagihan, pembayaran, hak-hak sebagai wajib pajak. Bimtek ini harus diikuti oleh seluruh jajaran DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Asset Daerah). Mengapa? Agar seluruh pegawai di DPPKAD memiliki persepsi dan pengetahuan yang sama tentang PBB P2.

2. Bimtek Penilai PBB (Kode Aktivitas B)

Diajarkan tentang hal-hal yang akan menjadi tugas pejabat fungsional penilai PBB yang meliputi pendataan, pemetaan dan penilaian PBB. Oleh karena itu prasyarat peserta adalah telah mengikuti bimtek administrasi PBB.

3. Bimtek OC (*Operating Consule*) PBB (Kode Aktivitas C)

Diajarkan tentang hal-hal yang akan

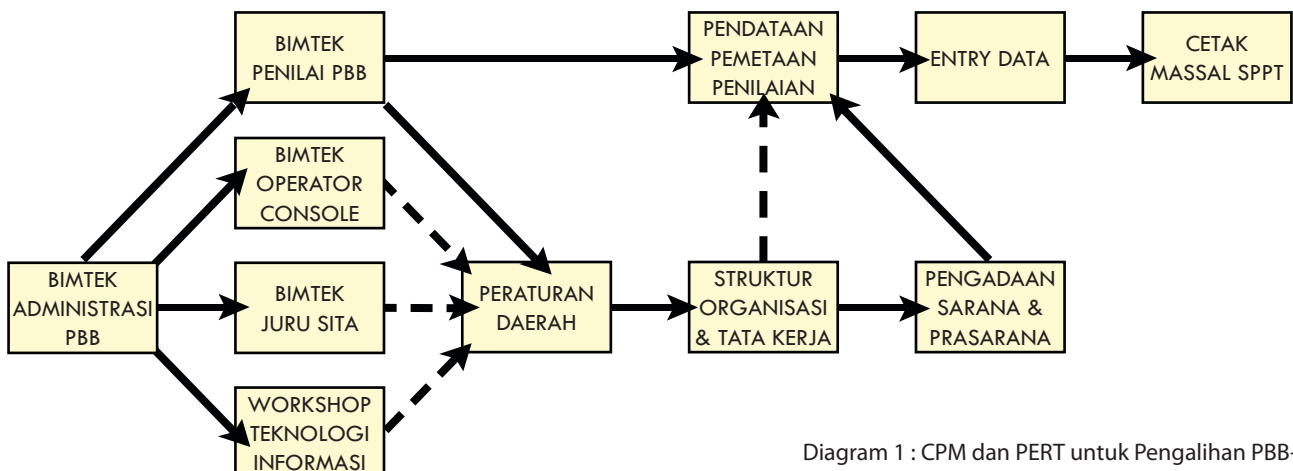


Diagram 1 : CPM dan PERT untuk Pengalihan PBB-P2

menjadi tugas pejabat OC PBB, yaitu tentang manajemen sistem informasi yang ada dalam sebuah kantor pelayanan pajak. Oleh karena itu, prasyarat peserta adalah telah mengikuti bimtek administrasi PBB. Bimtek ini hanya bisa dilakukan di Pusdiklat Pajak – BPPK – Kementerian Keuangan, yang mana di dalamnya telah terdapat laboratorium komputer dan sistem aplikasi SISMIO, SIG dan DBKB.

4. Bimtek Juru Sita PBB (Kode Aktivitas D)

Diklat ini dimaksudkan untuk mencetak calon tenaga fungsional juru sita pajak.

5. Workshop Teknologi Informasi PBB (Kode Aktivitas E)

Workshop ini akan membahas teknologi informasi PBB, Proses Bisnis PBB P2, SISMIO, dan SIG. Termasuk di dalamnya adalah pembayaran PBB menggunakan *mobile banking* dan *internet banking*.

AKTIVITAS PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (Kode Aktivitas F)

Pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan SOP (*Standard Operating Procedure*). Agar hasilnya benar, maka aparat yang telah mengikuti bimtek-bimtek di atas perlu saling bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi.

Peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan SOP yang harus disiapkan, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

• Pendataan

Berkaitan dengan kegiatan pengumpulan objek dan subjek PBB, apakah menggunakan cara Penyebaran SPOP, identifikasi, atau pengukuran.

• Penilaian

Berkaitan dengan tata cara penilaian individual ataupun penilaian massal, analisis NIR (Nilai Indikasi Rata-Rata) dan ZNT (Zona Nilai Tanah), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), pendekatan penilaian.

• Pengenaan

Berkaitan dengan pengenaan PBB atas

objek pajak khusus seperti bendungan PLTA, jalan tol, rel kereta api, perikanan darat, perairan pada pelabuhan laut, areal pembudidayaan ikan dan areal penangkapan ikan dll.

• SPPT

Berkaitan dengan proses penerbitan (cetak massal), proses distribusi dari DPPKAD sampai ke tangan wajib pajak, serta pelibatan pihak lain yaitu ketua Rukun Warga dan ketua Rukun Tetangga.

• Pembayaran

Mengatur tentang cara pembayaran yang meliputi Buku I sampai dengan Buku V, pembayaran langsung ke bank/pos persepsi ataupun pembayaran melalui ATM.

• Penagihan

Mengatur tentang proses penagihan, dari penagihan *door to door* sampai dengan penagihan PBB dengan Surat Paksa.

• Pengurangan

Mengatur tentang wajib pajak yang tidak mampu secara ekonomi untuk membayar, objek pajak yang terkena bencana alam ataupun kebakaran, wajib pajak sebagai veteran, pensiunan PNS, janda ataupun duda.

• Keberatan

Mengatur tentang wajib pajak yang tidak setuju (tidak sependapat) dengan fiskus terhadap klas bumi ataupun klas bangunan. Intinya adalah telah terjadi sengketa antara keduanya.

• Banding

Wajib pajak yang tidak puas dengan keputusan keberatan, maka ia dapat mengajukan banding di Pengadilan Pajak di Jakarta. Jika selama ini fiskus (KPP Pratama) di Papua diwakili oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, bagaimanakah kabupaten/kota yang ada di Indonesia bagian Timur, seperti Papua?

• Restitusi

Pengembalian kelebihan pembayaran PBB disebabkan oleh pengurangan yang dikabulkan, keberatan yang dikabulkan, banding yang dikabulkan, pembayaran ganda.

• Pemeriksaan

Pemeriksaan dapat saja dilakukan oleh petugas pajak dalam rangka untuk menguji kepatuhan wajib pajak daerah ataupun karena wajib pajak mengajukan keberatan.

• Imbalan bunga

Imbalan bunga, biasanya diberikan manakala keberatan atau banding dikabulkan. Dapat juga karena pejabat terlambat menerbitkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan restitusi.

• Pengurangan denda administrasi

Diberikan kepada wajib pajak manakala wajib pajak terkena sanksi administrasi yang munculnya bukan karena kesalahan wajib pajak.

• Pengurangan, penghapusan, pembatalan

Dapat diajukan manakala peluang untuk mengajukan keberatan telah lewat waktu. Adapun surat permohonan keberatan tidak dipertimbangkan karena kurangnya dokumen keberatan.

• Pembetulan

Dapat diajukan oleh wajib pajak sepanjang terdapat kesalahan berupa salah tulis, salah hitung yang tidak terdapat unsur persengketaan/perselisihan antara wajib pajak dengan fiskus.

• Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran

Mengatur tentang pembayaran PBB yang dapat diangsur.

• Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak PBB yang Belum Jelas Diketahui WP-nya dan Pencabutan sebagai WP.

AKTIVITAS PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (Kode Aktivitas G)

Perlu pembentukan lembaga yang mirip dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan (KP PBB), bukan KPP Pratama. Organisasi pada Direktorat Jenderal Pajak yang sekarang ini berlaku adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang di dalamnya terdapat KPP Pratama.

PARAMETER	KPP PBB	KPP PRATAMA
DASAR HUKUM	KMK RI Nomor 443/KMK.01/2001 Instansi vertikal Ditjen Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kakanwil.	PMK RI Nomor 62/PMK.01/2009
TUGAS	Melaksanakan pelayanan di bidang PBB dan BPHTB dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPn BM, PTLL, PBB dan BPHTB dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
FUNGSI	• Pendataan objek dan subjek pajak dan penilaian objek PBB; • Pengolahan dan penyajian data PBB dan BPHTB; penetapan PBB dan BPHTB; • Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, serta penyelesaian restitusi PBB dan BPHTB; • Penyelesaian keberatan, pengurangan, dan penatausahaan banding; • Pembetulan SKP; • Pengurangan sanksi pajak; • Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi PBB dan BPHTB; • Pelaksanaan administrasi KPPBB.	• Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek PBB; • Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; • Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT, serta penerimaan surat lainnya; • Penyuluhan perpajakan; • Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak; • Pelaksanaan ekstensifikasi; • Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; • Pelaksanaan pemeriksaan pajak; • Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; • Pelaksanaan konsultasi perpajakan; • Pelaksanaan intensifikasi; • Pembetulan ketetapan pajak; • Pengurangan PBB serta BPHTB;
SEKSI-SEKSI	• Subbagian Umum; • Seksi Pendataan dan Penilaian; • Seksi Pengolahan Data dan Informasi; • Seksi Penetapan; • Seksi Penerimaan; • Seksi Penagihan; • Seksi Keberatan dan Pengurangan; • Kelompok Jabatan Fungsional.	• Subbagian Umum; • Seksi Pengolahan Data dan Informasi; • Seksi Pelayanan; • Seksi Penagihan; • Seksi Pemeriksaan; • Seksi Ekstensifikasi Perpajakan; • Seksi Pengawasan dan Konsultasi I; • Seksi Pengawasan dan Konsultasi II; • Seksi Pengawasan dan Konsultasi III; • Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; • Kelompok Jabatan Fungsional.

Sementara itu, KPP PBB diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi yang tepat

berkenaan dengan PBB P2 dan BPHTB lebih tepat diperankan oleh Kantor Pelayanan PBB. Karena dalam Kantor Pelayanan PBB lebih spesifik dibandingkan KPP Pratama yang lebih luas cakupannya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Namun aturan yang lebih lengkap tentang struktur organisasi sebagaimana dalam peraturan menteri dan keputusan Menteri Keuangan di atas belum pernah ada sampai sekarang. Dalam perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, disisipkan "L.1." Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah ditambahkan fungsi, yaitu:

KPP PBB	KPP PRATAMA	PARAMETER
Subbagian Umum: • Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.	Subbagian Umum: • Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.	TUGAS SEKSI
Seksi Pendataan dan Penilaian: • Melakukan urusan pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan pengumpulan data potensi pajak.	Seksi Ekstensifikasi Perpajakan : • Melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pemben-tukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.	
Seksi Pengolahan Data dan Informasi: • Melakukan urusan perekaman, pengolahan data, analisis dan penyajian informasi PBB dan BPHTB.	Seksi Pengolahan Data dan Informasi: • Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pen-golahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.	
Seksi Penetapan: • Melakukan urusan penetapan, intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB. • Seksi Penerimaan: • Melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, dan pengalokasian penerimaan serta pemantauan penysetoran PBB dan BPHTB.	Seksi Penagihan: • Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.	
Seksi Penagihan: • Melakukan urusan tata usaha piutang pajak, penagihan, dan pembuatan usul penghapusan piutang PBB dan BPHTB.		
Seksi Keberatan dan pengurangan: • Melakukan penyelesaian keberatan, pengu-rangan, uraian banding, pengurangan sanksi serta pemeriksaan sederhana atas permohonan keberatan dan pengurangan PBB dan BPHTB.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV: • Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis per-pajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan penguran-gan PBB dan BPHTB, serta melakukan evaluasi hasil banding.	
	Seksi Pemeriksaan: • Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pe-meriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.	
	Seksi Pelayanan: • Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian doku-men dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpa-jakan.	
Fungsional Penilai PBB.	Fungsional Penilai PBB dan Fungsional Pemeriksa Pajak.	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan BPHTB dan PBB P2;
- Pendataan, penilaian dan penetapan PBB P2;
- Pengolahan data dan informasi BPHTB dan PBB P2;
- Pelayanan BPHTB dan PBB P2;
- Penagihan BPHTB dan PBB P2;
- Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan BPHTB dan PBB P2; dan
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

AKTIVITAS PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA (Kode Aktivitas H)

Pengadaan barang dan jasa diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang meliputi perangkat keras yang langsung berkaitan dengan bisnis proses PBB seperti SPOP, LSPOP, SPPT dan lain-lain formulir, *high speed printer* dan lain-lain. Juga dibutuhkan perangkat lunak sejenis Sismiop, DBKB dan SIG.

AKTIVITAS PENDATAAN, PEMETAAN DAN PENILAIAN (Kode Aktivitas I)

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data objek dan subjek PBB adalah sudah benar. Mengingat proses pengalihan PBB P2 memiliki kendala waktu maka kegiatan yang paling tepat adalah pemeliharaan basis data Sismiop.

AKTIVITAS INPUT DATA (Kode Aktivitas J)

Kegiatan ini berupa memasukkan data (input data) yang telah dihasilkan dari kegiatan pendataan, pemetaan dan penilaian.

AKTIVITAS CETAK MASSAL (Kode Aktivitas K)

Adalah kegiatan mencetak SPPT PBB Tahun Pajak berjalan pada saat PBB P2 sudah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota.

JALUR KRITIS (CRITICAL PATH)

Jangka waktu (durasi) yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan/aktivitas yang sudah diuraikan di atas, dihitung berdasarkan perkiraan (minggu) dan jenis-jenis kegiatan yang mendahului sebuah kegiatan dapat ditampilkan dalam tabel berikut.

Dengan demikian, jalur kritis pada pengalihan PBB P2, secara berurutan, adalah kegiatan A, B, F, G, H, I, J dan K. Jumlah minggu dalam jalur kritis tersebut adalah 69 minggu.

Oleh sebab itu jika sebuah kabupaten ingin mengelola PBB P2 pada tahun pajak 2013 maka sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kabupaten tersebut adalah telah mempersiapkan dan menyelesaikan:

1. Sarana dan Prasarana, paling lambat 30 Nopember 2012;
2. Struktur organisasi dan Tata Kerja Pemungutan PBB P2, paling lambat 30 Nopember 2012;
3. Sumber Daya Manusia, paling lambat 30 Nopember 2012;
4. Peraturan Daerah, paling lambat 30 Juni 2012. Peraturan Kepala Daerah dan SOP, paling lambat 31 Oktober 2012;
5. Kerja sama dengan pihak terkait, paling lambat 30 Nopember 2012;
6. Pembukaan rekening PBB P2 pada bank yang sehat, paling lambat 31 Desember 2012.

Dengan demikian kabupaten tersebut harus menyelesaikan kegiatan sampai dengan kegiatan huruf F paling lambat tanggal 30 Juni 2012. Sementara kegiatan G, kegiatan H, kegiatan I dan kegiatan J dapat dilakukan sampai dengan akhir tahun 2012. Sementara kegiatan K dapat dilakukan pada tahun pajak 2013.

PERAN PEMERINTAH PROVINSI

Sebuah kantor DPPKAD, biasa disebut Dispenda, membutuhkan Pejabat Fungsional Penilai PBB sekitar lima orang, OC PBB sekitar 2 orang dan Juru Sita Pajak sekitar satu orang. Jika

setiap DPPKAD se-Indonesia harus mengadakan bimtek sendiri-sendiri, maka akan terjadi pemborosan. Agar tidak terjadi pemborosan, contohlah apa yang telah dilakukan oleh Sub Bagian Evaluasi Pendapatan Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang menyiapkan aktivitas dari A sampai dengan Aktivitas E, dengan menggandeng Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak – BPPK - Kementerian Keuangan menyelenggarakan Bimtek Administrasi PBB dan BPHTB pada tahun 2010, Bimtek Penilai PBB, Bimtek *Operating Consule* PBB, Bimtek Juru Sita dan *Workshop Information Technology* Pengelolaan PBB P2 pada tahun 2011. Tentunya, hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan No. 213 dan Menteri Dalam Negeri No. 58, tepatnya pada Pasal 7 Ayat (4) yaitu “Dalam rangka penyiapan Sumber Daya Manusia, pemerintah daerah dapat meminta bantuan ke Menteri Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan bimbingan, pendidikan dan pelatihan teknis pemungutan PBB P2”.

Ditinjau dari analisis CPM & PERT, dapat dikatakan bahwa kabupaten kota se-Provinsi Jawa Barat telah selesai melaksanakan kegiatan A sampai dengan Kegiatan E. Semua itu tidak terlepas dari peranan Biro Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jabar (yang notabene adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki perhatian penuh pada proses pengalihan pengelolaan PBB P2 bagi kabupaten kota di wilayahnya). Alhasil, saat ini Subbag Evaluasi Pendapatan Daerah pada biro tersebut sedang menjadi objek studi banding bagi kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia, berkaitan dengan persiapan pengalihan PBB P2. Selain itu juga telah berhasil dibentuk Paguyuban Penilai PBB se-Jawa Barat, yang merupakan paguyuban penilai pertama di tingkat provinsi di Indonesia. Semoga proses landing pesawat dengan kode penerbangan PBB P2, sukses!

*Penulis adalah Widyaiswara
Pusdiklat Pajak



Sumber: www.zastavki.com

Emas: *In, Stay or Out?*

OLEH : AGUS HEKSO PRAMUDIJONO & MUHAMMAD ZULFIKAR KARIM

Beberapa bulan yang lalu, saya dan anda serta masyarakat umum di negara ini sempat dihebohkan dengan harga emas yang sedemikian melonjak dalam waktu yang cukup cepat. Dampak yang dapat terlihat langsung dari kenaikan ini adalah tingginya minat masyarakat untuk membeli karena tergiur akan kemungkinan keuntungan jika harga emas akan terus naik; berbagai kabar yang saya dengar bahkan para pemburu emas tersebut rela datang pagi-pagi sekali, sengaja untuk antri pada tempat-tempat penjualan logam mulia karena takut kehabisan.

Melihat fenomena ini, saya sempat berpikir apakah masyarakat kita memang benar-benar sudah kelebihan uang atau memang sudah sangat makmur, sampai-sampai beli emas pun harus antri panjang?

Saya sendiri juga sempat ditanya oleh beberapa teman saya tentang fenomena ini dan melalui tulisan ini saya akan coba bahas apakah investasi pada emas memang menguntungkan atau malah sebaliknya.

Investasi pada Emas, Salah Kaprah?

Benarkah tindakan membeli emas disebut investasi? Saya masih ingat pada saat pertama kali saya belajar tentang manajemen investasi, ada 10 hal prinsip dari investasi yang mana menurut saya, 3 hal pertama adalah yang paling penting yaitu ;

1. *Time value of Money*
2. *Risk and Return trade off*
3. *Cash, not profit, is a king*

Mari kita coba melihat emas dari ketiga sudut pandang prinsip investasi tersebut. Pertama adalah dengan menggunakan instrumen *Time Value of Money* (TVM). Pertanyaan awal saya sederhana saja, berapakah nilai 1 kg emas? 100 ribu kah? 100 juta kah? atau USD 10.000 kah? kebanyakan orang pada saat artikel ini ditulis akan menjawab sekitar 500 juta, namun bukan itu jawaban dari pertanyaan saya; coba anda perhatikan pertanyaannya sekali lagi dengan baik, yang ditanya adalah **nilai** 1 kg emas, bukan **harga** 1 kg emas. Lalu apa jawabannya? Karena pertanyaannya sederhana, maka jawabannya juga sederhana; emas, berapa pun banyaknya, tidak mempunyai nilai intrinsik apapun – sama juga halnya dengan besi, kuningan, tembaga, beras, tomat, cabe, kacang hijau dsb-nya. Tentunya jawaban seperti ini akan sangat mengundang kontroversi, terutama bagi anda para pembaca yang mempunyai ribuan kilo emas, sudah pasti artikel ini akan dibuang dan penulis akan habis dicela dan dimaki-maki... hehehe... ok, ngga apa-apa, mari kita pakai kepala dingin dulu, saya lanjutkan dengan pertanyaan, memang beda ya; antara harga dengan nilai? Yup benar, harga dan nilai adalah dua hal yang berbeda; nilai suatu barang umumnya sebanding dengan seluruh jumlah usaha yang dibutuhkan untuk memperoleh barang tersebut, sementara harga, walaupun kita tahu bahwa mekanisme pembentukan harga adalah dari equilibrium permintaan dan penawaran, tapi pada prakteknya, equilibrium tersebut umumnya terbentuk dari proses yang spekulatif. Nah, kalau begitu, berapakah nilai emas? seharusnya jika emas mempunyai nilai, maka nilai emas akan se-

banding dengan usaha manusia mendapatkan emas, dan dengan kemajuan teknologi, seharusnya usaha manusia mendapatkan emas akan semakin mudah dan nilai emas seharusnya turun, tapi pada kenyataannya, nilai emas terhadap mata uang penilai bukannya makin murah malah cenderung naik – emas hanya mempunyai harga, bukan nilai; oleh karena itu emas bersifat spekulatif. Barang-barang yang bersifat spekulatif, tidak memungkinkan dihitung dengan metode TVM paling sederhana sekalipun. Metode TVM mempunyai implikasi adanya *certainty* atau “kepastian” dalam sebuah proses investasi, yaitu sebuah proses yang berulang dalam periode yang telah ditentukan; hanya dengan proses “kepastian” tersebut sebuah investasi dapat dinilai lebih lanjut pada point ke-2 yaitu *Risk-and-Return Trade off* (RRTTO).

Metode RRTTO berasumsi bahwa semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam berinvestasi, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang akan diperoleh. Emas, sesuai dengan metode TVM sebelumnya, tidak mempunyai nilai intrinsik yang logikanya tidak akan mempunyai harga kecuali ada proses spekulasi disitu. Sehingga dengan tidak adanya nilai maka seharusnya resiko memegang emas = 0, yang berimplikasi bahwa emas tidak mempunyai tingkat pengembalian; tapi apakah seperti itu? Mari kita buktikan, coba saja anda jalan-jalan ke pasar sambil pamer bawa-bawa emas 5 kg, pasti dalam waktu beberapa saat sudah ada lebih dari 10 orang berusaha mencopet emas yang anda bawa, resiko selalu pasti ada bung! tapi apakah resiko ini yang dimaksud? Tentunya bukan pak, resiko yang dimaksud adalah *willingness* dari investor untuk menerima resiko yang lebih tinggi jika memperoleh tambahan keuntungan yang lebih banyak; dalam kasus ini adalah jika anda membeli emas dalam jumlah banyak, apakah sudah pasti akan memperoleh tambahan keuntungan yang lebih banyak? Tentu tidak sama saja halnya jika anda membeli beras dalam jumlah yang banyak – tentunya untuk tujuan investasi, apakah anda berharap nilai beras akan

naik? Kalau ya, berarti anda lagi-lagi adalah spekulator beras, karena beras sama seperti emas, tidak mempunyai nilai intrinsik dan berharap ada kesulitan suplai sehingga harga beras akan naik. Dengan tidak mempunya RRTTO menjelaskan sifat investasi pada emas, sudah pasti metode “*Cash, not-profit, is a King*” juga tidak akan berguna untuk menjelaskan apakah ada sifat investasi pada emas.

Emas tidak mempunyai *cash-flow*. Investasi mensyaratkan adanya *cash-flow*, dan emas tidak sekalipun memberikan *cash-flow* kepada pemegangnya, tidak ada pembayaran *coupon*, tidak ada pembayaran *dividend*, tidak ada aliran *cash* sama sekali kecuali pada saat dibeli dan dijual – yang mana kalau dihitung dengan menggunakan metode NPV akan sangat tidak dapat dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya.

Spekulan Emas, bukan Investor Emas

Para pembaca yang baik, saya akan coba membahas sedikit tentang sifat logam yang ada pada emas. Sifat natural dari emas menyebabkan logam ini dapat terpelihara dengan baik dalam kurun waktu yang lama, tidak mudah berkarat, tidak mudah susut, mempunyai isotope yang stabil (^{197}Au), mampu bertahan dalam kondisi yang cukup ekstrem (titik cair 1064.18°C , titik didih 2856°C) dan dalam dunia modern, mampu berperan sebagai penghantar panas dan *electricity* yang baik serta mampu memantulkan efek radiasi infra merah dengan sangat baik. Sifat logam yang sedemikian baik ini, ditambah dengan efek *blink-blink* yang dimilikinya menyebabkan orang sudah mulai menggunakan emas diperkirakan sejak awal peradaban di tahun 4000 SM. Teknik metalurgi awal peradaban telah memungkinkan emas untuk digunakan pada berbagai macam peralatan maupun sebagai perhiasan, kemudian ketika emas berperan sebagai alat tukar, maka fungsi emas berubah dari sekedar perhiasan menjadi simbol kekayaan dan kemakmuran.

Sebagai alat tukar, emas adalah pemberi nilai (*value maker*) pada barang ataupun jasa – dan bukan penerima nilai

(*value taker*). Sebagai pemberi nilai, emas dapat di-*exclude* jika barang yang diberi nilai *matching* dengan barang yang mempunyai nilai yang sama – contoh jika dua ekor kambing sama dengan satu gram emas dan satu gram emas bisa ditukar dengan tiket kereta api Jakarta – Surabaya, maka kalau PT KAI hanya cukup membutuhkan dua ekor kambing dari penumpangnya untuk biaya operasional satu tiket Jakarta – Surabaya, maka emas sebagai pemberi nilai dapat di-*exclude* dalam transaksi ini, namun dua ekor kambing dan tiket kereta api sebagai penerima nilai tidak dapat di-*exclude* dan menjadi objek dari transaksi ini.

Sejak mata uang mulai digunakan dalam perekonomian, sejak saat itu pula emas beralih fungsi dari pemberi nilai menjadi penerima nilai – menjadi komoditi yang diperdagangkan – dan fungsinya sebagai penyimpan nilai tidak lagi efektif karena adanya fluktuasi dari pemberi nilai terhadap emas.

Seperti yang umumnya kita ketahui bahwa nilai tukar dari suatu mata uang terhadap mata uang lain diperoleh dari proses ekuilibrium permintaan dan penawaran yang didasari oleh berbagai

macam aspek seperti tingkat resiko, kondisi makro, *competitive advantage* dan spekulasi pelaku pasar. Di samping itu, faktor pemerintah dan otoritas keuangan dalam mengeluarkan surat hutang, posisi neraca perdagangan dan penetapan suku bunga juga sangat mempengaruhi nilai tukar dari mata uang suatu negara.

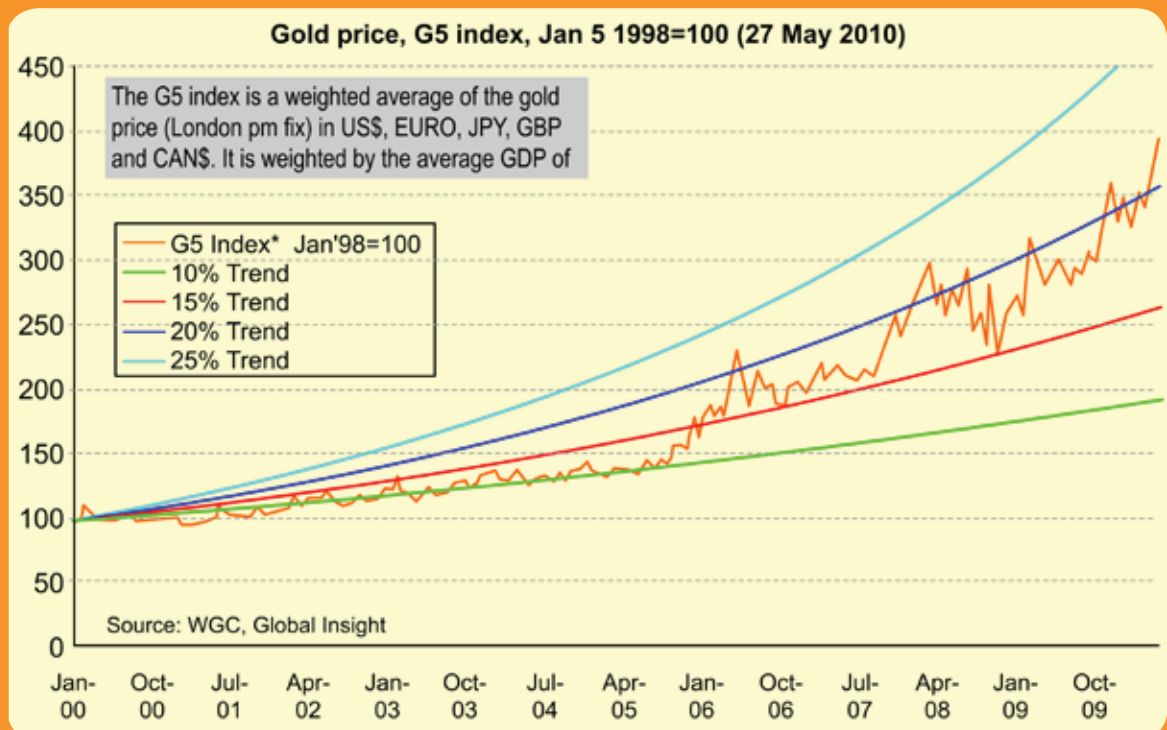
Emas, jika di awal kita asumsikan tidak mempunyai nilai – karena sifatnya yang pemberi nilai – lalu kemudian menjadi penerima nilai dan diperdagangkan – maka nilai yang timbul pada emas berasal dari proses pemberian nilai oleh mata uang yang digunakan sebagai penilai. Jika alat penilai emas mengalami fluktuasi, maka nilai emas pun akan mengalami fluktuasi.

Perdagangan mata uang maupun komoditas umumnya didominasi oleh pelaku jangka pendek (*short-term trader*) yang biasa disebut dengan spekulator. Transaksi yang dilakukan oleh spekulator ini kemudian membentuk ekuilibrium harga dari nilai tukar mata uang termasuk barang-barang komoditi seperti emas, perak, kedelai dll. Penelitian yang dilakukan oleh Thomas Klitgaard dan Laura Weir berjudul “*Exchange Rates*

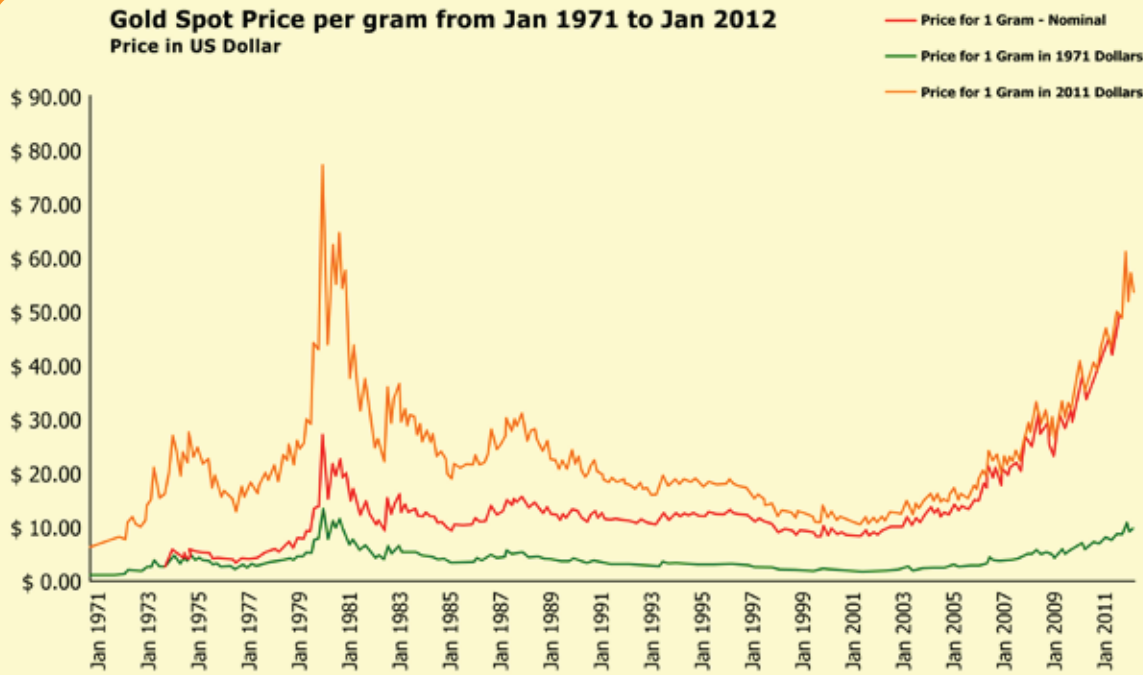
changes and Net positions of Speculators in Futures Market” menyebutkan bahwa dari hasil regresi data yang dimiliki menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antara net-posisi spekulator dengan posisi nilai tukar dalam interval mingguan. Posisi ekuilibrium inilah yang sering kita lihat pada TV, majalah, surat kabar, ataupun media informasi lainnya sebagai *closing price* – harga komoditas pada hari itu (baik itu mata uang, emas, perak, maupun komoditas lainnya)

Perhatikan grafik 1 di bawah. Grafik ini menunjukkan harga emas dengan menggunakan G5 index, yaitu *weighted-average* dari harga emas (London pm fix) dalam mata uang USD, EURO, JPY, GBP dan CAN, dari Januari 2000 s.d. Oktober 2009 (kurang lebih hampir 10 tahun).

Jika para pembaca perhatikan dengan baik, dalam kurun waktu hampir 10 tahun, harga emas hanya mengalami kenaikan kurang dari 25% terhadap mata uang penilainya, yang berarti dalam 10 tahun, hanya ada kenaikan rata-rata sebesar 2.5% dari harga emas – masih lebih besar bunga deposito rupiah pada bank swasta ya pak.. deposito saja berani memberikan 5% per tahun.



Gold Spot Price per gram from Jan 1971 to Jan 2012
Price in US Dollar



Perhatikan pula grafik pergerakan harga spot emas dalam US Dollar dalam kurun waktu 32 tahun. Perhatikan bahwa dengan menggunakan basis harga 1 gram pada tahun 1971, fluktuasi harga emas tidaklah se-fantastis yang kita perkirakan.

Sebagai pembandingan, saya tampilkan pergerakan indeks komposit (IHSG) dari Bursa Efek Jakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Terlihat jelas bahwa dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, investasi pada BEJ mampu mencapai kisaran tingkat pengembalian sebesar 70-80% yang jika di-rata-rata kan *roughly* pertahun mencapai 14%.

In, stay or out?

Kata-kata ini adalah pilihan yang umum disampaikan broker/pialang kepada *customer*-nya – masuk aja pak, atau *stay* aja dulu atau sekarang *out* dulu aja pak, *cut-loss* dulu... dstnya... dstnya... – nah sekarang ini pun pilihan ini saya serahkan kepada para pembaca sekalian, ambil yang mana nih bos?

Pilihan 'IN' otomatis akan merujuk pada kondisi bahwa para pembaca sekalian belum memiliki komoditi – bukan investasi – dalam bentuk emas. Haruskah saya masuk? Jawabannya ada-

lah tergantung preferensi masing-masing pembaca, kalau anda tetap yakin bahwa emas merupakan investasi – walaupun sudah saya jelaskan diawal dengan beberapa teori dan data bahwa emas bukanlah investasi – apa boleh buat, ya masuklah; tapi kalau tidak yakin, ya jangan... hindarkan yang ragu-ragu... katanya.

Banyak bentuk investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dengan *cash-flow* yang cukup solid serta tingkat resiko yang cukup moderat dibanding dengan membeli emas. Sebagai contoh, Jika anda memang mempunyai kelebihan dana yang dapat digunakan sebagai investasi, anda dapat membeli Obligasi Retail pemerintah Indonesia yang memberikan pembayaran *coupon* rata-rata 8 – 10% per tahun, atau anda dapat membeli saham-saham *bluechip* kemudian ambil posisi *long-term* dan nikmati pembayaran *dividend* setiap tahun sampai *capital gain* dari saham-saham tersebut meningkat, atau anda dapat pula membeli reksadana yang mempunyai *return* rata-rata >30% per tahun (umumnya reksa dana saham). Jika anda tidak menyukai pembayaran bunga, anda dapat berinvestasi pada instrumen-

instrumen syariah yang bebas bunga dan memberikan pengembalian berupa bagi-hasil. Tapi jika anda memang menyukai tantangan dan ingin memacu detak jantung dan adrenalin lebih kencang, silahkan anda terjun dalam bursa komoditi emas dan bermain – dijamin, anda tidak perlu *treadmill* untuk melatih daya tahan jantung anda.

Pilihan 'STAY' tentunya jatuh kepada anda yang sudah terlanjut membeli dan memiliki sejumlah emas. Pertanyaan saya adalah, mau diapain emas sebanyak itu pak? Disimpan sendiri? – menuh-menuhin tempat plus deg-degan kalau diambil orang. Ditaruh di *safe-deposit-box*? – kok aneh ya, bukannya memberikan *cash-flow* tapi malah mengeluarkan *cash-flow*, Dijual? – kalau belinya saat murah lalu jual saat mahal ngga-apa-apa, tapi kalau belinya pada posisi mahal dan sekarang harga emas sudah jatuh, rugi deh, gimana dong? Nasehat umum dalam teknik investasi jika anda bertemu dengan keadaan seperti ini adalah pertama, jika *capital loss* anda tidak terlalu besar dan masih dalam batas-batas yang dapat ditoleransi, lakukan *cut-loss*, kemudian re-investasikan *cash* yang diperoleh kepada instrumen yang mem-

Interactive Stock Chart for Jakarta Stock Exchange Composite Index (JCI)



punya *short-term return* yang tinggi untuk menutup *cut-loss* tersebut; kedua, jika memang *capital loss* sudah sedemikian besar, lakukan *stay & hold position* sampai *market rebound* kembali – karena seperti yang dipercayai para teknikal analis investasi bahwa pergerakan harga dari setiap instrumen investasi selalu mempunyai pola yang selalu berulang – jadi jangan takut, sabarlah menunggu, karena badai pasti berlalu..

Pilihan terakhir yaitu 'OUT', dan pertanyaannya adalah, anda yakin ini saat yang tepat untuk out? Lakukan kalkulasi dengan cermat, hitung semua biaya yang anda keluarkan untuk membeli emas tersebut termasuk didalamnya biaya menyimpan serta biaya deg-degan atas kepemilikan emas tersebut, kemudian hitung harga jualnya – silahkan jual jika

harga penjualan lebih besar atau minimal sama dengan seluruh biaya yang sudah anda hitung itu, dan langsung alihkan *cash* hasil penjualan ke instrumen investasi lain yang memberikan return yang lebih tinggi. Tapi jika tidak, ada baiknya anda memilih 'STAY' sampai kondisi menjadi lebih kondusif.

Sebuah keputusan investasi yang baik tentunya akan memberikan keuntungan yang baik pula di masa depan. Cerita menarik berikut ini akan menutup pembahasan saya yang singkat ini tentang investasi dan emas. Pada awal bursa saham beroperasi di Indonesia, ada seorang kepala keluarga yang mempunyai visi investasi yang cukup baik, membeli beberapa lot saham salah satu industri telekomunikasi besar di Indonesia dan kemudian mencetaknya dan menyim-

pannya di rumah. Tahun berganti tahun, sampai suatu saat beliau kemudian berpulang dan meninggalkan waris untuk keluarganya. Pada suatu ketika, beberapa tahun dari kepulangan beliau, anak dan istrinya menemukan saham yang disimpannya dan kemudian membawanya ke *market* untuk dinilai kembali. Setelah dihitung ulang, termasuk beberapa kali *stock-split* yang dilakukan, nilai saham tersebut selama hampir 20 tahun ternyata mencapai hampir 100 kali lipat dari nilai awalnya – alhasil investasi yang dilakukan si Bapak untuk keluarganya memang berbua sangat manis.

– bagaimana dengan anda?

*Agus Hekso Pramudijono :
Widyaiswara Pusdiklat Keuangan Umum
Muhammad Zulfikar Karim :
Praktisi Investasi dan Keuangan

Peran DJBC sebagai **Community Protector** dalam Pengawasan Importasi Prekursor

OLEH : PURJONO

Istilah “prekursor” pada dasarnya dapat dimaknai sebagai bahan-bahan atau zat yang dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri non farmasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, harus dipahami bahwa prekursor juga dapat digunakan untuk pembuatan narkoba dan psikotropika. Oleh karena itu penggunaan dan peredaran barang tersebut harus diawasi secara ketat.

Secara internasional, pengawasan prekursor berada di bawah pengawasan *International Narcotics Control Board* (INCB). Konvensi 1988 mewajibkan setiap negara untuk melaporkan kebutuhan tahunan serta membuat laporan triwulan mengenai prekursor baik yang diekspor maupun diimpor kepada INCB. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Pengaturan Ekspor prekursor. Hal ini diberlakukan secara efektif mulai 23 Februari 2007. Selanjutnya, pada tahun 2010 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.44 tahun 2010 yang mengatur tentang penggolongan dan jenis prekursor, serta mekanisme importasinya.

Dalam praktiknya, Pengawasan oleh Kementerian Perdagangan hanya sebatas pada pengawasan atas ijin untuk pengadaan dan peredarannya sedangkan pengawasan atas importasi barang atau zat berbahaya tersebut diletakkan pada pundak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Wewenang tersebut didasarkan pada Undang-Undang Kepabeanan, yang mengamankan secara tegas bahwa DJBC mempunyai tugas pokok sebagai pelindung masyarakat (*community protector*). DJBC berkewajiban mencegah importasi prekursor ilegal, agar tidak dimanfaatkan menjadi produk narkoba atau psikotropika yang dapat mengganggu stabilitas bangsa dan negara. Artikel ini merupakan ringkasan hasil penelitian penulis pada tahun 2011 yang membahas tentang usaha-usaha pengawasan importasi prekursor yang telah dilakukan oleh DJBC dan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

cyrgis.com

Pengawasan Prekursor oleh DJBC dan Kendala-Kendalanya

Untuk melaksanakan misi yang diembannya (sebagai *revenue collector*, *trade facilitator*, *industrial assistance* dan *community protector*) DJBC dituntut menjalankan keseimbangan antara fungsi pelayanan dan pengawasan. Di satu sisi DJBC harus memberikan pelayanan yang dapat memangkas ekonomi biaya tinggi, namun di sisi lain DJBC juga harus melakukan pengawasan agar penerimaan negara tidak hilang dan yang lebih terpenting lagi DJBC harus dapat melindungi masyarakat dari importasi barang-barang berbahaya (seperti prekursor) yang dapat mengganggu stabilitas bangsa dan negara.

Berkaitan dengan pengawasan atas importasi dan eksportasi barang-barang berbahaya tersebut, DJBC telah merancang dan melaksanakan pengawasan secara berlapis. Pengawasan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga tahapan, yaitu tahap *pre-clearance*, *clearance* dan *post clearance* (Sofyan, 2010).

• Pengawasan pada tahapan *pre-clearance*

Pengawasan pada tahap *pre-clearance* meliputi: sistem registrasi impor, sistem pertukaran data elektronik di bidang kepabeanan melalui INSW dan pemeriksaan sarana pengangkutan yang dilakukan oleh tim patrol DJBC.

1. Registrasi Impor

Sistem registrasi impor saat ini sudah berjalan dengan baik. Setiap calon importir, eksportir maupun pengguna jasa kepabeanan lainnya sesuai peraturan Menteri Keuangan diwajibkan untuk melakukan registrasi impor guna mendapatkan Nomor Induk Kepabeanan (NIK). Izin baru bisa diberikan setelah dilakukan validasi oleh Direktorat Audit atau Bidang IKC, sehingga bila terdapat importir fiktif sudah akan terdeteksi pada tahapan ini.

2. Pertukaran data elektronik di bidang kepabeanan melalui INSW

Para importir diharuskan mentransfer seluruh dokumen pabean secara elektronik ke portal INSW. Kemudian secara otomatis sistem akan mengecek data tersebut apakah sudah dilampiri izin impor instansi terkait. Hal ini merupakan filter pertama yang dilakukan oleh

sistem INSW sebelum dokumen pabean dicek oleh sistem komputer pabean. Pengecekan izin lartas juga dilakukan oleh unit *analyzing point* dalam sistem komputer pabean. Pengecekan tersebut terutama dilakukan terhadap dokumen pabean yang izin lartasnya masih diberikan secara manual.

Analyzing Point merupakan satu tim di bawah Seksi Intelijen yang bertugas melakukan penelitian terhadap importasi barang-barang larangan dan pembatasan. *Analyzing Point* memiliki peran penting dalam pengawasan barang impor karena merupakan filter yang akan dilalui importir untuk melakukan importasi barang. Sehingga bila terdapat impor barang larangan yang tidak ada ijinnya, maka sudah dapat terdeteksi sejak awal sebelum barang masuk ke daerah pabean. Dari hasil *Analyzing Point* ini selanjutnya dokumen kepabeanan akan ditetapkan penjalurannya.

Filtering secara sistem kepabeanan hanya mungkin berhasil bila semua importir bertindak secara jujur. Seandainya ada importir yang tidak memberitahukan klasifikasi barangnya dengan benar, misalnya barang prekursor tapi dilaporkan sebagai barang non-prekursor, maka sistem aplikasi INSW tidak dapat mengidentifikasinya. Sehingga bisa jadi sistem ini akan memberikan penjaluran barang yang salah (misalnya: jalur hijau). Bila hal ini terjadi maka barang tersebut akan bebas dari pemeriksaan, baik pemeriksaan dokumen oleh PFPD maupun pemeriksaan fisik.

Sebenarnya sistem aplikasi INSW masih bisa menangkap importir yang tidak jujur, karena meskipun mereka telah memperoleh jalur hijau atau jalur MITA, sistem tetap akan melakukan *random sampling* bagi mereka. Bila semula mereka memperoleh jalur hijau maka akan diperiksa oleh petugas pemeriksa barang, sedang apabila sebelumnya memperoleh jalur MITA, maka akan di periksa oleh Unit Audit di kantor DJBC.

Selain itu masih ada jenis-jenis prekursor yang belum diatur tata

niaganya seperti; Ketamin, Red phosphor, Iodine, Thionyl chloride, Ether, Asam asetat glacial, NaOH, Caffein, GBL (Gamma Butyrolactone), Toluene/Toluol HS. 2707200000 Calcium Oxide, dan Ammonium Chloride. Jenis-jenis prekursor ini bukan termasuk barang lartas, dan oleh karenanya DJBC tidak melakukan pengawasan secara khusus. Bila jenis prekursor tersebut kemudian masuk ke jalur hijau atau MITA, maka secara fisik barang-barang tersebut akan bebas dari pengawasan DJBC.

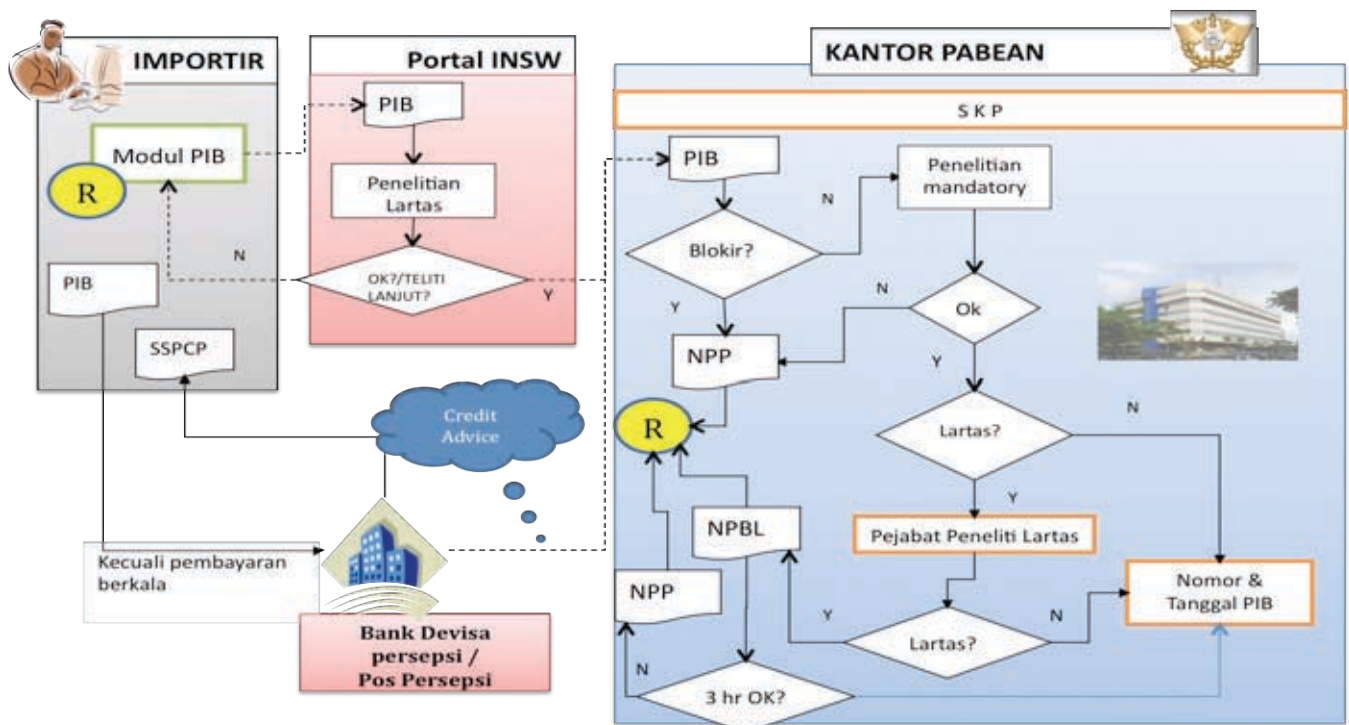
Permasalahan lain terkait dengan prekursor adalah kemungkinan terjadinya penyelundupan. Penyelundupan adalah memasukkan barang-barang ke daerah pabean secara ilegal. Usaha penyelundupan bisa dilakukan melalui jalur-jalur yang tidak terjamah oleh pengawasan, atau melalui jalur-jalur yang ada pengawasannya, namun dilakukan dengan cara-cara yang sukar untuk dideteksi. Bila yang diselundupkan barang-barang jenis prekursor maka hal tersebut akan dapat membahayakan bangsa dan negara.

Untuk mengatasi hal di atas, DJBC telah membentuk satuan patroli laut yang bertugas melakukan pengawasan atas kemungkinan masuknya barang-barang secara ilegal (Semedi, 2010). Namun karena keterbatasan SDM serta infrastruktur lainnya membuat pengawasan dengan patroli belum dapat maksimal.

• Pengawasan prekursor pada tahapan *clearance*

Pengawasan pada tahap *clearance* meliputi pengawasan dokumen oleh PFPD dan pemeriksaan fisik barang oleh Petugas Pemeriksaan Fisik Barang. Pada umumnya pemeriksaan dokumen oleh PFPD sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan. Namun karena banyak pejabat PFPD dan pemeriksa barang yang belum memiliki pengetahuan tentang prekursor yang memadai, dikhawatirkan banyak kasus prekursor yang tidak dapat terdeteksi secara dini.

Selain itu pengawasan fisik barang juga menyisakan beberapa kelemahan. Pertama, hanya barang-barang yang masuk kategori jalur merah saja yang



akan diperiksa. Untuk jalur hijau dan MITA tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang. Hal tersebut berpotensi terjadinya penyelundupan prekursor yang dimasukkan dalam peti kemas yang bebas pemeriksaan tersebut.

• Pengawasan prekursor pada tahapan *post clearance*

Sebagaimana diuraikan di atas, sistem pengawasan dengan penjaluran masih memiliki kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu DJBC, sesuai dengan prinsip-prinsip kepabeanan modern juga menerapkan sistem pengawasan setelah barang *clearance*, yaitu *post clearance audit*. Dengan audit ini diharapkan dapat mengidentifikasi bila terjadi adanya over kuota, penyimpangan ijin dan penyalahgunaan fasilitas. Selain itu *post clearance audit* juga dapat mengidentifikasi bila terdapat adanya penyelundupan yang dilakukan importir.

Untuk impor barang secara umum pendekatan ini dirasakan cukup efektif. Hal ini terlihat dari temuan-temuan yang telah diperoleh oleh para auditor DJBC. Sayangnya selama ini audit yang dilakukan lebih difokuskan pada pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan penerimaan negara (penerimaan bea masuk dan cukai). Pengawasan atas

prekursor pada tahap *post-clearance* belum menjadi suatu hal yang dianggap penting. Tambah lagi dengan minimnya pengetahuan auditor tentang prekursor, membuat audit yang dilakukan belum mampu mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terkait dengan importasi prekursor, baik penyimpangan yang disengaja (*fraud*) maupun kesalahan yang sifatnya tidak disengaja (*error*).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Indonesia belum secara penuh memiliki suatu aturan yang lengkap tentang tata niaga prekursor. Hal ini terlihat masih adanya bahan-bahan yang tergolong prekursor yang belum dimasukkan pada peraturan yang sekarang berlaku.
- DJBC masih lebih menekankan pentingnya misi sebagai '*revenue collector*' dibanding misi sebagai '*community protector*'. Akibatnya DJBC kurang memberi perhatian secara intensif terhadap pengawasan prekursor. Masih banyak titik rawan dalam pengawasan importasi prekursor, baik pada tahap *pre-clearance*, *clearance* maupun *post clearance*.

- Kurang optimalnya pengawasan importasi prekursor juga disebabkan karena tidak memadainya pengetahuan SDM DJBC (seperti PFPD, Pemeriksa Barang dan Auditor) dan minimnya infrastruktur yang dimiliki DJBC, khususnya yang terkait dengan pengawasan prekursor.

Untuk mengoptimalkan pengawasan importasi prekursor di masa yang akan datang penulis menyarankan kepada DJBC sebagai berikut:

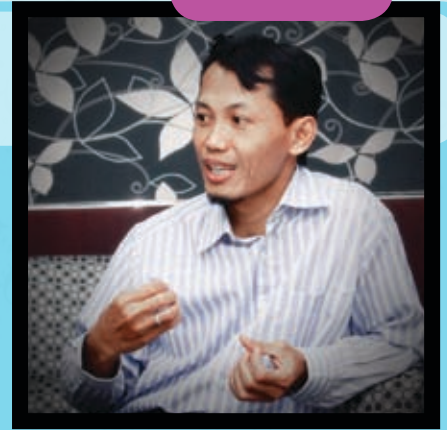
- Membuat secara khusus prosedur operasi standar untuk importasi atau eksportasi prekursor.
- Menjadikan prekursor sebagai target baik dalam *Analyzing Point* untuk menentukan penjaluran, pemeriksaan dokumen dan fisik barang serta dalam *post clearance audit*.
- Meningkatkan pengetahuan tentang prekursor bagi SDM DJBC, khususnya mereka yang terlibat langsung dengan barang tersebut, seperti: petugas patroli baik laut maupun udara, staf intelejen DJBC, Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen, Pemeriksa Fisik Barang dan para auditor *post clearance audit*.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Bea dan Cukai

“DBK, Menginspirasi dan Menantang”

Nur Eko Budianto,
Kasubbag Ketatalaksanaan IA - Biro Organta, Sekretariat Jenderal

Sejak reformasi, ketika kita melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan untuk sesuatu yang lebih baik, terlebih lagi dikaitkan dengan salah satu nilai-nilai Kementerian Keuangan, “Kesempurnaan”, tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh semua aparatur di BPPK, khususnya di Pusdiklat PSDM ini lebih bagus. Pertama, Saya merasakan Perubahan-perubahan yang lebih baik pada mekanisme pengajaran yang membentuk kita menjadi lebih baik pula. Sistem pembelajarannya yang andragogi, lebih banyak dinamika, membuat pembelajaran menjadi lebih hidup. Sarana dan prasarana juga lebih mendukung. Kesempatan sharing pengalaman dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi orang lain, kadang-kadang malah lebih melekat, lebih mengena daripada penyampaian materi yang bersifat normatif.



DBK itu menginspirasi dan menantang. Esensinya berkaitan dengan masalah kompetensi, bagaimana kita mengasah kompetensi dari level yang ada. Kita diberikan khasanah pengetahuan yang selama ini memang mungkin tidak kita dapatkan. Menjadi tahu dan pada akhirnya setelah dari sini hal-hal tersebut dapat kita terapkan sehingga bisa meningkatkan kompetensi kita.

“DBK Menyenangkan, Menambah Pengetahuan, dan Interaktif”

Wista Amalia Narulita,
Kasubbag Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Efek dan Pengelolaan Investasi, Bapepam-LK



Ini diklat kompetensi pertama yang saya ikuti. Sebelum mengikuti diklat ini saya sudah banyak bertanya pada senior, mencari tahu, seperti apa sih diklat yang akan saya ikuti, apa saja yang akan dipelajari, metode pengajarannya seperti apa.

Pengajarnya menguasai materi, komunikatif, dan atraktif serta selalu melibatkan peserta dalam diklat. Menurut saya itu merupakan suatu nilai lebih, karena diklat yang dua arah seperti itu lebih mengena ke peserta, daripada metode yang seperti jaman dulu, satu arah, dan tidak ada imbal balik. Panitianya juga lebih responsif. Mungkin untuk kedepannya bisa diperhatikan kelayakan ruang makan dan restroom.

DBK IV ini menyenangkan, menambah pengetahuan, dan interaktif. Saya mendapat tambahan pengetahuan yang memang belum pernah saya dapat. Yang jelas menambah kesadaran saya untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas diri untuk jadi lebih baik dari sebelumnya. Menyenangkan karena melalui kegiatan diklat ini saya bisa menambah teman baru.

“DBK itu Semangat, Inovasi, dan *Continuous Improvement*”

Nofiansyah, S.E., Ak., M.Ec.Dev.
Kepala Seksi Piutang Negara IIA, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Permasalahan yang dibahas dalam diklat ini adalah peningkatan kompetensi pegawai, dari sisi profesionalismenya, integritasnya dalam menunjang tugas-tugas sehari-hari pada levelnya sendiri. Di sini saya mendapatkan banyak contoh untuk meningkatkan kompetensi. Banyak hal yang tidak bisa secara sengaja kita cari, baik di buku maupun di internet. Kita tidak bisa fokus mungkin karena tuntutan tugas-tugas rutin yang harus dikerjakan. Tetapi di sini kita bisa fokus, fasilitator memberikan ilmunya, sumber-sumber refensinya, juga dengan metodologi penyampaian yang berbeda dengan diklat-diklat lainnya. Selain itu juga ada teori dan games yang dapat membangkitkan nilai-nilai kepemimpinan, dengan narasumber yang inspiratif. Ada games, presentasi, watch movie, kemudian cerita kisah-kisah. Petikan-petikan pelajaran yang disampaikan itu kebanyakan kalau secara sengaja kita cari justru tidak didapat. Tapi di sini kita dapatkan. Inspirasi untuk belajar lebih berkembang itu ada di sini. Tidak terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba kita tahu, dan bisa kita kembangkan sendiri.



DBK bagi saya itu semangat, inovasi, dan *continuous improvement*. Artinya, dalam bekerja harus semangat, harus punya inovasi untuk menyelesaikan permasalahan di luar, dan dilakukan dengan perbaikan secara terus menerus.

“Alih-alih menyalahkan situasi, ia memilih menciptakan situasi. Ia sadar, masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Cukuplah pengalaman pahit ini ia pegang sebagai pembelajaran.

Ia memutuskan untuk mengambil kesempatan yang ditawarkan, yakni menjadi pegawai Depkeu meski harus mulai dari golongan rendah, II/a. Sembari bekerja ia melanjutkan kuliah dengan etos yang sudah berbeda. Begitulah, ia pun kemudian melaju.

Bertahun-tahun sesudahnya, ia sudah menyelesaikan pendidikan S-2 di luar negeri lewat bea siswa yang diperolehnya dari Depkeu. Ia meraih keberhasilan berbekal kepahitan mengalami kegagalan.”

OLEH:
SAMPURNA BUDI UTAMA



Sumber: www.blogging4jobs.com

Menyikapi Kegagalan

Apa Kabar Sahabat? Semoga tetap hebat dan penuh semangat! Beberapa waktu lalu, saya bertemu kembali dengan seorang kawan yang telah lama tidak berjumpa. Ia kawan sewaktu kuliah di Jurangmangu dulu. Kebersamaan kami di kampus berakhir lebih cepat dari seharusnya karena ia harus *drop out* di tingkat II. Sedih sekali rasanya saat itu, menyaksikan dan mendengar sedu sedan tangis teman-teman yang bertemu dengan kenyataan bahwa mereka harus keluar dari kampus yang mereka harapkan menjadi batu pijakan menuju kesuksesan di masa depan. Ia tidak sendirian, ada puluhan dari jurusan akuntansi yang tereliminasi waktu itu. Kalau tidak salah ingat, di tingkat II itu saja ada enam puluhan yang senasib dengannya.

Ada banyak episode yang terjadi setelah mereka tereliminasi. Ada cerita sedih tentang kehidupan mereka selanjutnya. Namun tak jarang, dari mereka yang drop out itu saya mendapat cerita-cerita yang menggembirakan. Kawan itu salah satunya. Meski sempat berhari-hari tenggelam dalam tangis penyesalan dan rasa malu serta minder bertemu dengan teman-teman, ia kemudian memutuskan untuk bangkit. Alih-alih menyalahkan situasi, ia memilih menciptakan situasi. Ia sadar, masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Cukupilah pengalaman pahit ini ia pegang sebagai pembelajaran.

Ia memutuskan untuk mengambil kesempatan yang ditawarkan, yakni menjadi pegawai Depkeu meski harus mulai dari golongan rendah, II/a. Sembari bekerja ia melanjutkan kuliah dengan etos yang sudah berbeda. Begitulah, ia pun kemudian melaju.

Bertahun-tahun sesudahnya, ia bisa sejajar bahkan melebihi teman-temannya yang lulus dengan normal di kampus dulu. Ia sudah menyelesaikan pendidikan S-2 di luar negeri lewat beasiswa yang diperolehnya dari Depkeu. Ia juga punya masa depan karier yang dalam beberapa hal melebihi teman-teman lamanya. Ia meraih keberhasilan berbekal kepahitan mengalami kegagalan.

Dalam *Your Road Map for Success*, John C. Maxwell menulis: "Kesuksesan tidak berarti mengabaikan kegagalan. Kita semua pernah gagal. Ketika berkendara, kita semua pernah terperosok di lubang, mengambil jalur yang salah, atau lupa memeriksa radiator. Satu-satunya orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah meninggalkan rumahnya. Jadi masalah sebenarnya bukan apakah Anda akan gagal, melainkan apakah Anda akan gagal dengan baik (maksudnya, memetik keuntungan/belajar dari kegagalannya)".

Nelson Boswell berkata, "Perbedaan antara kebesaran dan kemampuan yang sedang-sedang sering tergantung pada cara seseorang memandang kesalahan." Jika Anda ingin melanjutkan perjalanan menuju kesuksesan, Anda perlu belajar mengatasi kegagalan.

Orang yang tidak berhasil sering begitu takut menghadapi kegagalan dan

"Kesuksesan tidak berarti mengabaikan kegagalan. Kita semua pernah gagal. Ketika berkendara, kita semua pernah terperosok di lubang, mengambil jalur yang salah, atau lupa memeriksa radiator. Satu-satunya orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah meninggalkan rumahnya. Jadi masalah sebenarnya bukan apakah Anda akan gagal, melainkan apakah Anda akan gagal dengan baik (maksudnya, memetik keuntungan/belajar dari kegagalannya)".

John C. Maxwell.

-Your Road Map for Success-

penolakan, sehingga mereka menghabiskan hidupnya dengan upaya menghindari resiko atau keputusan yang dapat membawa mereka pada kegagalan. Mereka tidak menyadari bahwa kesuksesan itu dibangun di atas dasar kemungkinan untuk gagal dan terus berusaha.

Jika Anda memiliki sikap yang tepat, kegagalan tidak akan bersifat fatal atau final. Kenyataannya, kegagalan itu dapat menjadi batu loncatan menuju kesuksesan.

Pakar *leadership*, Warren Bennis mewawancarai 70 tokoh bangsa sukses dari berbagai bidang dan mendapati bahwa tidak seorang pun dari mereka memandang kesalahan mereka sebagai kegagalan. Ketika berbicara tentang semua kegagalan itu, mereka merujuk pada "pengalaman pembelajaran" mereka atau "pembelajaran yang berhasil", atau "memastikan arah", dan "peluang untuk bertumbuh".

Orang-orang yang berhasil tidak akan membiarkan kegagalan menguasai pikiran mereka. Daripada terus-menerus memikirkan akibat kegagalan, atau memikirkan apa yang seharusnya terjadi, dan mengapa terjadi kegagalan, mereka lebih berfokus pada ganjaran dari keberhasilan, kemudian belajar dari kesalahan mereka dan memikirkan cara meningkatkan diri mereka dan keadaan mereka.

Apa makna pembelajarannya bagi kita, Sahabat?

Jadilah manusia pembelajar! Bukanlah setiap orang yang terlahir di dunia ini memiliki dorongan yang sangat kuat untuk belajar? Perhatikanlah bagaimana proses belajar yang dilakukan seorang balita untuk bisa berjalan. Ia memerlukan lebih kurang 24.000 kali, kata sebuah riset, proses jatuh bangun untuk bisa berjalan sendiri.

Jika jatuh bisa kita samakan dengan kegagalan, mengapa kita berhenti berusaha hanya karena mengalami kegagalan yang hanya sekali? Mengapa kita cepat menjadi trauma untuk mencoba hanya karena pernah merasakan resiko dari sebuah kegagalan?

Sesungguhnya, penghalang manusia untuk sukses adalah pola pikir statis (*fixed mindset*) yang membelenggunya. Orang-orang dengan *mindset* seperti ini akan mudah mencampuradukkan sebuah peristiwa, sebuah situasi dengan citra diri atau keadaan diri mereka.

Jika ia mengalami sebuah kegagalan, ia akan mencari kambing hitam atas kegagalannya bahkan lebih jauh ia akan mempersepsikan dirinya sebagai orang yang gagal. Jika ini berlanjut, ia akan semakin tenggelam dalam lingkaran citra diri yang negatif tentang dirinya bahwa "Saya adalah orang yang gagal", atau "sungguh, Saya adalah orang yang paling sial didunia ini". Pada gilirannya, citra diri negatif inilah yang akan melahirkan kegagalan-kegagalan berikutnya dalam kehidupannya. Begitulah, *law of attraction* mewujudkan dan bekerja secara negatif dalam dirinya. Sungguh, amat disayangkan!

Yakinlah bahwa kegagalan yang pernah kita alami tidak akan mempermalukan kita dihadapan semua orang di sepanjang hidup kita. Kuncinya adalah bagaimana cara kita memandang kegagalan. Stephen R. Covey pernah mewanti-wanti, "*The way we see problem is the problem.*" Sedangkan Mario Teguh berujar, "Bagi dua orang yang berbeda, satu masalah yang sama bisa menjadi batu penghalang perjalanan atau batu pijakan yang baik."

Semoga bermanfaat, selamat berkarya untuk Indonesia!

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Pengembangan SDM

Waspada HIPERTENSI

Hipertensi adalah suatu penyakit yang tidak menimbulkan gejala (asimtomatik), sehingga sering disebut sebagai silent killer. 25% orang dewasa di dunia akan menderita hipertensi. Kira-kira 50% orang dewasa berusia lebih dari 65 tahun menderita hipertensi.

OLEH:

dr. EDUARD TAMBUNAN

Pada umumnya hipertensi ditemukan pada saat pemeriksaan berkala atau pada waktu berobat ke dokter untuk suatu penyakit lain. Namun tidak jarang penderita baru menyadari adanya hipertensi pada saat telah timbul penyulit (komplikasi). Seseorang dikatakan menderita hipertensi bila pada dua kali pengukuran ditemukan tekanan darah lebih atau sama dengan 140 / 90 mmHg. Umumnya seseorang akan peduli terhadap resiko komplikasi hipertensi ketika keluarga dekatnya atau teman meninggal dunia karena serangan jantung, stroke akibat komplikasi hipertensi.

Komplikasi pada hipertensi dapat disebabkan karena :

1. Tekanan darah yang tinggi. Tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah sehingga dinding pembuluh darah kehilangan fungsi atau elastisitasnya secara normal.
2. Proses aterosklerosis (Penebalan dinding) yang cepat. Pada penderita hipertensi, proses ini berlangsung lebih sering dan lebih hebat dan timbul pada usia yang lebih muda, utamanya pada penderita dengan kadar kolesterol yang diatas normal.

Komplikasi hipertensi dapat mengenai organ tubuh sebagai berikut ;

1. Ginjal. Hipertensi dapat menyebabkan gangguan struktur penyaring ginjal yang pada akhirnya menyebabkan gagal ginjal dimana penderita harus mengalami cuci darah untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya.

2. Jantung. Hipertensi dapat mengakibatkan pembesaran dinding ventrikel jantung yang terjadi karena kerja keras jantung untuk memompa darah yang telah berlangsung beberapa waktu. Hal ini mengganggu pompa jantung sehingga jantung tidak dapat bekerja optimal yang akan menyebabkan gagal jantung seumur hidup.
3. Otak. Pada organ otak, penderita hipertensi akan mengalami gangguan berupa sumbatan atau pendarahan otak yang dapat mengakibatkan kematian. Hal ini sering kita dengar dengan istilah stroke.
4. Mata. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan naiknya tekanan pada pembuluh darah di retina mata (retinopati hipertensif) dan mengakibatkan pecahnya pembuluh darah pada retina sehingga terjadi lepasnya retina dari dinding bola mata dengan akibat akhir gangguan penglihatan

sampai kebutaan.

5. Pembuluh darah tepi. Pembuluh darah tepi dapat mengalami sumbatan.

Pengobatan hipertensi seumur hidup sangat diperlukan untuk mengendalikan tekanan darah sehingga dapat meminimalkan efek kerusakan organ dan menurunkan angka kesakitan dan kematian. Namun seperti obat lainnya, obat hipertensi juga mempunyai efek samping yang dapat mengganggu kualitas hidup. Tapi dengan pemilihan obat yang tepat serta kontrol rutin ke dokter, dokter dapat memonitor dengan baik fungsi terapi yang telah diberikan sehingga dapat mengurangi efek samping obat. Pada akhirnya diperoleh efek obat hipertensi yang menguntungkan dan terhindar dari efek samping yang merugikan.

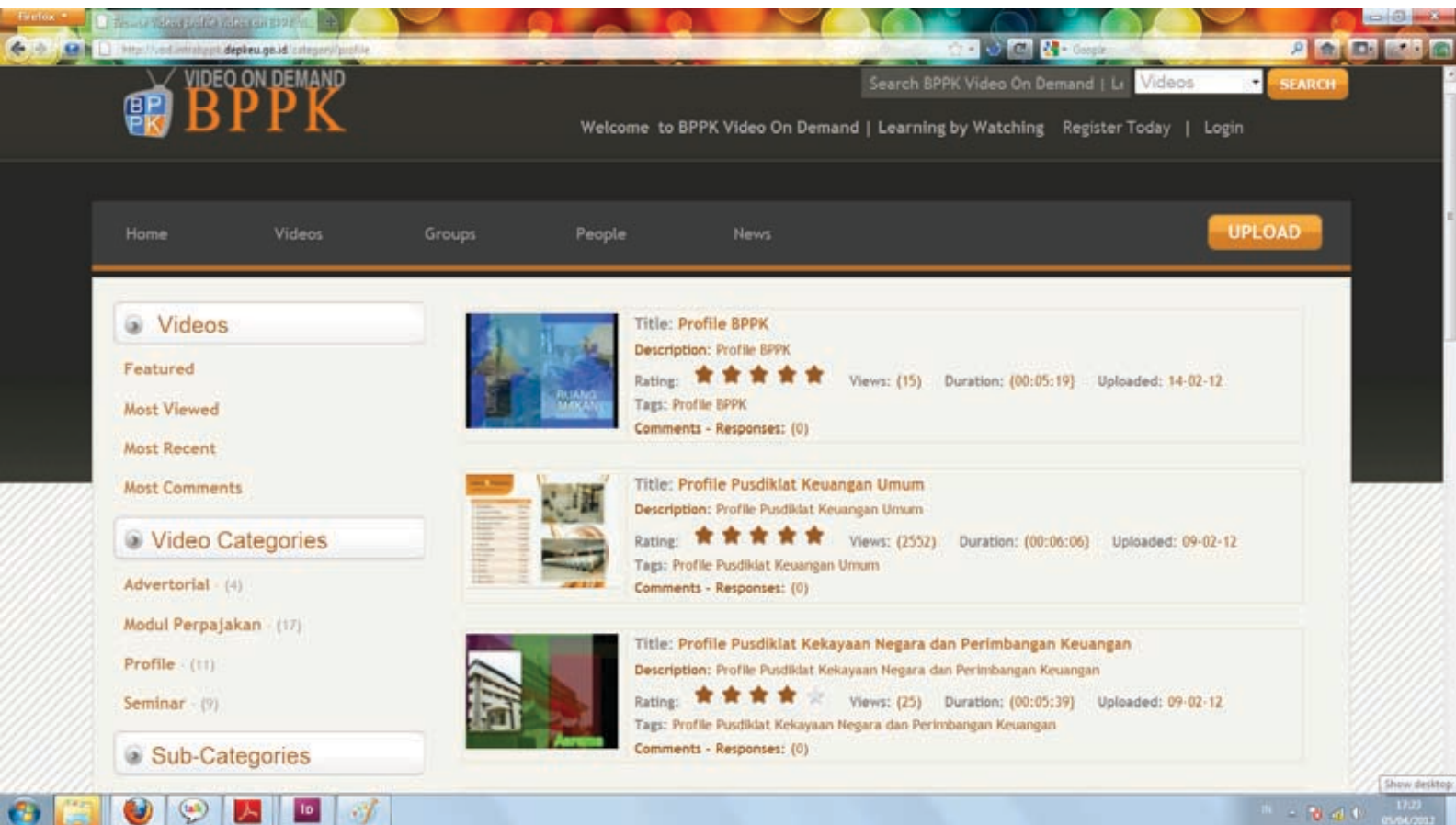
*Penulis adalah Dokter Madya pada Sekretariat BPPK

Untuk mengatasi gangguan hipertensi di lakukan:

1. Pengobatan non farmakologis.

- Menghentikan merokok
- Menurunkan berat badan berlebih
- Menurunkan konsumsi alkohol berlebih
- Melakukan latihan fisik teratur
- Menurunkan asupan garam
- Meningkatkan konsumsi buah dan sayur serta menurunkan asupan lemak.

2. Pengobatan farmakologis. Sesuai dengan obat yang diberikan oleh dokter biasanya berupa diuretika, beta blocker, calcium antagonis atau obat yang bersifat vasodilator. Diberikan tunggal dapat juga kombinasi.



Mengenal VIDEO ON DEMAND BPPK

“Di era teknologi saat ini, jarak dan waktu bukan lagi menjadi hambatan, melainkan sesuatu tantangan yang harus dihadapi dan dilewati demi menuju kemajuan di masa mendatang. Begitu pula halnya dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang banyak mengalami kemajuan dengan didorong oleh inovasi serta meluasnya jaringan berbasis *Internet Protocol* (IP). Perluasan jaringan berbasis IP ini didukung pula dengan berbagai aplikasi baru dan beragam layanan multimedia yang berkembang pesat. Kemajuan ini dimanfaatkan untuk menyediakan berbagai informasi, berita, hiburan, hingga permainan yang berbasis multimedia. Salah satu layanan multimedia yang memanfaatkan perkembangan teknologi berbasis IP adalah Video on Demand.”

OLEH : M. ICHSAN

Apa itu Video on Demand? Video on Demand (VoD) adalah sistem televisi interaktif yang memfasilitasi khalayak untuk mengontrol atau memilih sendiri program video dan klip yang ingin ditonton (sumber: Wikipedia). Secara fungsi, VoD ini seperti video rental dimana pelanggan dapat memilih sendiri program yang akan ditonton. Selain itu, pelanggan juga dapat mengunduh program-program yang diinginkannya.

Menjawab perkembangan zaman yang semakin pesat, dimana jarak dan waktu bukan lagi kendala, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) mengembangkan program interaktif yaitu VoD BPPK. VoD BPPK merupakan suatu program interaktif BPPK yang memberikan kebebasan kepada stakeholder untuk memilih sendiri video dan klip yang ingin ditonton.

Mengapa BPPK mengembangkan VoD? **Pertama**, video (perpaduan tulisan, gambar dan suara) merupakan sarana yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada *stakeholder*. Kita semua tahu, media penyampaian pesan dapat berupa lisan atau suara, tulisan, gambar atau visual dan perpaduan suara dan gambar (audio visual). Dibandingkan dengan media tulisan, gambar atau suara saja, informasi melalui media audio visual lebih cepat dan mudah diterima oleh stakeholder. BPPK sebagai lembaga pendidikan di bidang keuangan negara, berharap informasi atau pesan seputar materi keuangan Negara dapat sampai kepada stakeholder dengan baik. Dengan begitu, pemahaman dan kualitas sumber daya manusia (SDM) stakeholder akan materi keuangan Negara akan meningkat. Oleh karenanya BPPK berusaha memberikan layanan terbaik, salah satunya melalui program interaktif VoD BPPK.

Kedua, video merupakan media yang digemari masyarakat. Perkembangan perangkat keras maupun lunak di bidang multimedia telah memberikan dampak yang besar di industri film atau pembuatan video. Tampilan-tampilan yang menakjubkan banyak tersaji dalam film-film yang baru dibuat. Tak

mengerankan, jika studio-studio film menjamur dan bioskop-bioskop dipadati penonton. Begitu pula di dunia internet, pengunjung ramai-ramai mengakses laman website yang menyajikan pemutaran video. Sebut saja youtube, salah satu website yang menyediakan pemutar video, masuk dalam 10 besar website populer di tingkat dunia (Sumber: <http://mostpopularwebsites.net/>). Melihat fenomena ini, BPPK merasa perlu mengembangkan program interaktif VoD berisi video-video pembelajaran bagi stakeholder yang dapat diakses melalui laman website.

Ketiga, optimalisasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia di Kementerian Keuangan. Jaringan komputer atau *Wide Area Network* (WAN) Kementerian Keuangan yang luas hingga menjangkau kantor-kantor daerah di pelosok negeri, merupakan potensi besar yang perlu dimanfaatkan. Ditambah lagi dengan meningkatnya *bandwidth* intranet maupun internet di kantor-kantor daerah. Oleh karenanya, BPPK mengembangkan VoD sebagai media komunikasi pembelajaran interaktif melalui laman website.

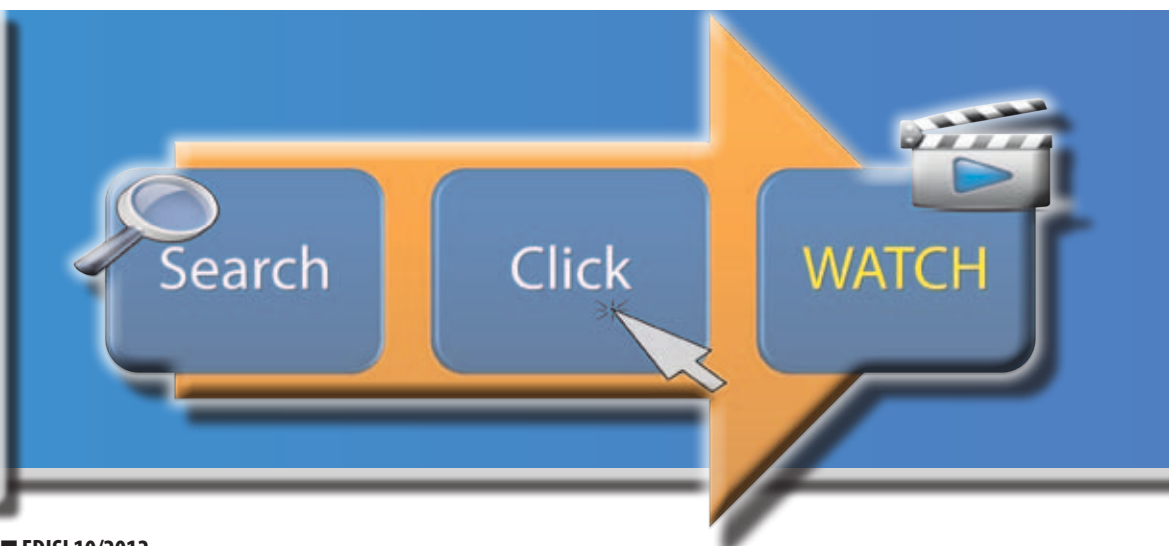
Keempat, kemudahan akses bagi stakeholder. Saat ini stakeholder cenderung selalu mencari kemudahan atau tidak mau repot. Bisa dibayangkan waktu yang terbuang di jalan, jika stakeholder harus datang ke BPPK untuk sekedar mendapatkan materi pembelajaran. Membaca situasi ini, BPPK mengembangkan VoD dengan aplikasi berbasis website yang memungkinkan stakeholder memutar atau mengunduh video materi pembelajaran langsung dari laman website. Melalui program ini stakeholder dapat memperoleh video materi pembelajaran dari kantornya masing-masing, tanpa harus datang ke BPPK.

Di tahap awal pengembangan program VoD BPPK, program ini baru dapat diakses dalam jaringan intranet Kementerian Keuangan. Untuk mengakses VoD BPPK, pengunjung cukup mengetik alamat <http://vod.intrabppk.depkeu.go.id> pada aplikasi web browser.

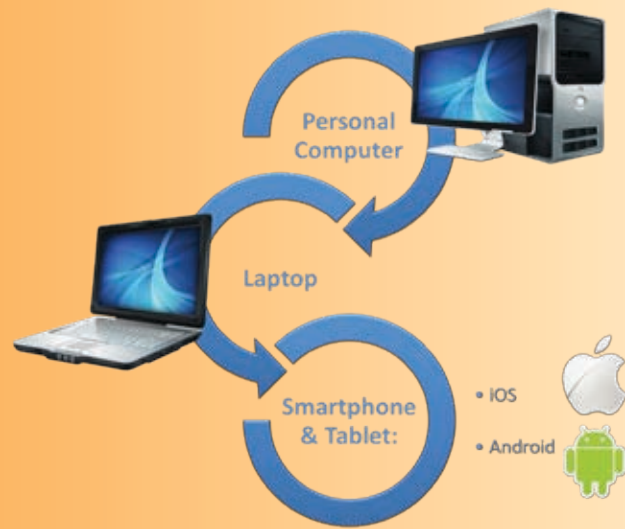
Search: user bisa mencari video apa yang ingin ditontonnya

Click: setelah menemukan video yang ingin ditonton, tinggal *click*!

Watch: video yang dipilih akan berjalan secara otomatis



VoD BPPK juga tersedia dalam versi gadget seperti smartphone dan perangkat tablet. Sebagaimana komputer biasa, untuk bisa mengakses VoD BPPK, perangkat gadget harus terhubung ke jaringan intranet Kementerian Keuangan melalui jaringan nirkabel (tanpa kabel) yang telah tersebar di kantor-kantor di lingkungan Kementerian Keuangan.



Karena terdapat di jaringan intranet, VoD BPPK tidak dapat diakses langsung dari internet atau jaringan di luar Kementerian Keuangan. Oleh karenanya, komputer harus terhubung ke jaringan intranet Kementerian Keuangan terlebih dahulu baik secara langsung ataupun melalui aplikasi *Virtual Private Network (VPN) client* Kementerian Keuangan. Aplikasi VPN ini menjembatani jaringan internet luar agar dapat berkomunikasi dengan jaringan intranet di Kementerian Keuangan.

VoD BPPK juga tersedia dalam versi gadget seperti smartphone dan perangkat tablet. Sebagaimana komputer biasa, untuk bisa mengakses VoD BPPK, perangkat gadget harus terhubung ke jaringan intranet Kementerian Keuangan melalui jaringan nirkabel (tanpa kabel) yang telah tersebar di kantor-kantor di lingkungan Kementerian Keuangan.

Siapakah pengguna VoD BPPK? Pengguna VoD BPPK adalah para stakeholder yang berkeinginan mengenal BPPK dan menambah pengetahuan terkait keuangan negara atau pihak lain yang berkepentingan dengan BPPK. Pengguna bisa saja peserta atau alumni diklat yang ingin memperdalam materi diklatnya melalui tayangan di VoD BPPK. Selain itu, orang-orang yang ingin mengenal lebih jauh tentang BPPK melalui video profil, produk dan kegiatan yang dilakukan oleh BPPK juga dapat mengakses VoD BPPK.

Bagaimana penyajian VoD BPPK? VoD BPPK tersaji dalam bentuk streaming video atau audio melalui laman website. Teknologi streaming ini memungkinkan pengguna untuk memutar file video atau audio secara langsung dari sebuah mesin server. Streaming juga menguntungkan pengguna dalam proses download dan kecepatan memutar audio dan video pada web browser. Teknologi ini juga

memungkinkan pengunjung untuk mendengarkan dan memutar file saat melakukan proses download.

Video apa saja yang tersedia di VoD BPPK? Video on Demand BPPK menyediakan video profil unit kerja di lingkungan BPPK, materi workshop atau seminar, materi diklat, kegiatan diklat dan lain-lain. Materi-materi disajikan dalam bentuk paket video-video singkat yang dipisahkan berdasarkan topik bahasan. Tujuan pemisahan materi ini tak lain untuk mempercepat proses pencarian dan pemutaran video yang diinginkan pengunjung. Pemisahan

materi menghasilkan paket-paket video bahasan materi yang lebih singkat dengan durasi ± 15 menit. Hal ini membuat ukuran file video lebih kecil sehingga file video lebih cepat untuk diputar. Ukuran file ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses pemutaran video. Semakin besar ukuran file, maka akan semakin lambat video diputar.

Selain itu, pemisahan materi ini ke dalam paket-paket video juga bertujuan memudahkan pengunjung untuk mencari dan memperdalam pokok bahasan tertentu tanpa harus menonton keseluruhan materi. Dengan mengatur penamaan file video dan mengelompokkannya dalam beberapa kategori diharapkan akan memudahkan pengunjung saat melakukan pencarian video.

Fitur-fitur pendukung VoD BPPK lainnya juga telah dibenamkan untuk kenyamanan dan kemudahan pengunjung seperti; *copy link* lokasi video, alat pencari, kode program untuk masang video di laman website lain (*embed code*), dan kolom komentar bagi pengunjung untuk memberikan saran, masukan, kritikan dan sebagainya. Khusus bagi pengunjung yang ingin memberikan komentar, pengunjung harus masuk (*login*) ke laman website VoD BPPK terlebih dahulu. Jika pengunjung tidak dapat masuk (*login*) silahkan lakukan proses pendaftaran daftar (*register*) terlebih dahulu atau hubungi call center kami di nomor 021 - 7264984 atau di alamat email tikbppk@depkeu.go.id, tikbppk@gmail.com.

Selamat mencoba VoD BPPK!

*Penulis adalah Pranata Komputer pada Sekretariat Badan - BPPK

Kalender Diklat 2012

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

DTSS Penilaian Usaha Dasar	6 Mar – 3 Apr
DTSS Teknik Membuat Perjanjian Bagi Pegawai DJKN	26 Mar – 3 Apr
DTSS Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Tingkat pemula Bagi Pegawai DJKN (II)	27 Mar – 3 Apr
DTSS Perencanaan Kebutuhan BMN Bagi Pengelola	9 – 13 Apr
DTSS Supervisor Teknologi Informasi DJKN Tingkat Pemula (I)	10 – 26 Apr
DTSS Penilaian Properti Dasar (II)	11 Apr – 9 Mei
DTSS Analisis Kinerja Perusahaan Dasar	16 – 20 Apr
DTSS Manajemen Aset (I)	17 – 26 Apr
DTSS Supervisor Teknologi Informasi dan Komunikasi DJKN Tingkat Madya (I)	30 Apr – 15 Mei
DTSD Kekayaan Negara Tingkat I (I)	30 Apr – 16 Mei
DTSD Kekayaan Negara Tingkat I (II)	30 Apr – 16 Mei
Penyegaran Penyisihan Piutang Tak tertagih	15 – 16 Mei
DTSS Manajemen Aset (II)	21 – 31 Mei
DTSS Pemeriksa Piutang Negara Dasar (I)	21 Mei – 7 Jun
DTSS Pejabat Lelang (II)	22 Mei – 22 Jun
DTSS Beracara di Pengadilan	23 Mei – 14 Jun
DTSS Penilaian Properti Lanjutan (I)	28 Mei – 22 Jun
DTSS Jurusita Piutang Negara (I)	30 Mei – 28 Jun
DTSS Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Tingkat Madya Bagi Pegawai DJKN	4 – 8 Jun
DTSS Penatausahaan BMN Bagi Pengelola	11 – 20 Jun
DTSS Pemeriksa Piutang Negara Dasar (II)	12 – 29 Jun
DTSS Pengetahuan Lelang Bagi Pelaksana (I)	25 – 29 Jun
Penyegaran Analisis dan Evaluasi Keuangan Daerah	24 – 27 Apr
DTSS Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN Bagi Pengguna Barang	9 – 12 Apr
Penyegaran Pengelolaan BMN (Bagi Pengguna Barang) (I)	7 – 11 Mei
Penyegaran Pengurusan Piutang Negara dan Lelang Lanjutan (untuk Itjen)	18 – 22 Jun
Penyegaran SIMAK BMN (Bagi Pengguna) (I)	25 – 29 Jun

Pusdiklat Bea Cukai

DTSD Kepabeanan dan Cukai (I)	30 Jan – 03 Apr
DTSD Kepabeanan dan Cukai (II)	26 Mar – 01 Jun
DTSD Kepabeanan dan Cukai (III)	21 Mei – 24 Jul
DTSD Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan DTSD 2006/2007 (I)	30 Jan – 22 Mar
DTSD Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan DTSD 2006/2007 (II)	11 Jun – 22 Agust
DTSS Teknik Pemeriksaan	07 – 29 Mei
DTSS Post Clearance Audit (II)	02 Apr – 05 Jun
DTSS Kepatuhan Internal	23 Apr – 16 Mei
DTSS Jurusita	09 – 20 Apr
DTSS Patroli dan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut	16 Apr – 04 Mei
DTSS Audit Forensik	09 – 20 Apr
DTSS Cukai Lanjutan	19 Mar – 11 Apr
DF Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (I)	12 Mar – 12 Apr
DF Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (II)	06 Jun – 05 Jul
DTU Kesamaptaan (II)	05 Mar – 10 Apr
DTU Kesamaptaan (III)	12 Apr – 16 Mei
DTU Kesamaptaan (IV)	04 Jun – 06 Jul
Workshop Perjanjian Internasional di Bidang Kepabeanan	07 – 11 Mei
Workshop Manajerial Kepala Kantor DJBC	28 Mei – 01 Jun

Pusdiklat Pajak

Diklat Manajemen Keberatan dan Banding (1)	03 – 06 Apr
DTSS Juru Sita Pajak	03 – 14 Apr
DTSS Operator Console Pajak (2)	03 – 21 Apr
Diklat Manajemen Pemeriksaan (1)	10 – 14 Apr
DF. Pemeriksa Ahli (1)	17 – 21 Apr
DTSD Pajak I Spes. Akuntansi Pemerintahan & Penilai (1)	17 – 14 Jun
DTSD Pajak I Spesialisasi Administrasi Perpajakan	17 – 14 Jun
Diklat Manajemen Waskon (1)	24 – 28 Apr
DTSS Operator Console Pajak Lanjutan (2)	24 Apr – 05 Mei
DTSS PPN Tingkat Tinggi (1)	24 – 28 Apr
Diklat Penelaah Keberatan (1)	01 – 05 Mei
DTSS PPN Tingkat Menengah (2)	01 – 05 Mei
Diklat Account Representative (5)	08 – 12 Mei
Diklat Penelaah Keberatan (1)	08 – 12 Mei
DTSS KUP Tingkat Tinggi (1)	22 – 26 Mei
DF. Pemeriksa Menengah (1)	22 Mei - 06 Jun
DTSS Operator Console Pajak (3)	22 Mei – 09 Jun
DTSS PPh Tingkat Tinggi (1)	29 Mei – 02 Jun
DTSS PPN Tingkat Tinggi (2)	05 – 09 Jun
DF. Pemeriksa Menengah (2)	05 – 16 Jun
Diklat Manajemen Waskon (2)	12 – 16 Jun
Diklat Manajemen TU dan Umum (1)	19 – 23 Jun
Diklat Transfer Pricing (1)	19 – 23 Jun
DF. Pemeriksa Menengah (3)	19 – 30 Jun
Diklat Manajemen Penagihan (1)	26 – 30 Jun
Diklat Pelaporan Keuangan WP berbasis IFRS (1)	26 – 30 Jun

Pusdiklat PSDM

Diklat Berbasis Kompetensi IV (5)	2 – 5 Apr
Diklat Berbasis Kompetensi IV (6)	9 – 12 Apr
Diklat Berbasis Kompetensi IV (7)	25 – 28 Jun
TOT MPI (1)	16 – 20 Apr
TOT MPI (2)	23 – 27 Apr
Ujian Dinas (1)	16 – 20 Apr
Diklat Comunication Skill Khusus DJPU (1)	7 – 10 Mei
Diklat Berbasis Kompetensi IV khusus Setjen (1)	8 – 11 Mei
Diklat Berbasis Kompetensi Pelaksana (1)	30 Apr – 3 Mei
DKK Kreativitas dan Inovasi (1)	16 – 19 Apr
DKK Kreativitas dan Inovasi (2)	23 – 26 Apr
DKK Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah (1)	7 – 10 Mei
DKK Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah (2)	21 – 24 Mei
DKK Motivasi dan Pemberdayaan (1)	28 – 31 Mei
DKK Motivasi dan Pemberdayaan (2)	4 – 7 Jun
DKK Transformational Leadership (1)	18 – 21 Jun
DKK Coaching and Mentoring (1)	11 – 14 Jun
Diklatpim IV Khusus DJP	4 Jun

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Diklat Penyegaran Pengadaan Barang/Jasa (6)	23 – 27 Apr
Diklat Penyegaran Pengadaan Barang/Jasa (7)	23 – 27 Apr
DTSS Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (1)	2 – 7 Apr
DTSS Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (2)	2 – 7 Apr
DTSS Pejabat Pembuat Komitmen (2)	27 – 31 Apr
DTSS Direktorat Jenderal Anggaran (1)	27 – 31 Apr
DTSS Direktorat Jenderal Anggaran (2)	1 – 5 Mei
DTSS Aplikasi Keuangan (1)	9 – 13 Apr
DTSS Teknik Pembuatan KAK dan Kontrak PBJ (1)	1 – 5 Apr
DTSS Pengelolaan Keuangan Daerah (1)	17 – 21 Mei
DTSS Pengelolaan Keuangan SKPP (3)	18 – 19 Jun
DTSS Pengelolaan Keuangan SKPP (4)	29 Jun – 9 Jul
DTSS Penguji Tagihan (2)	18 – 29 Apr
DTSS Penguji Tagihan (3)	18 – 29 Apr
DTSS Penguji Tagihan (4)	19 Jun
DTSS Pengadaan Barang/Jasa (7)	15 Apr
DTSS Pengadaan Barang/Jasa (8)	15 Apr
DTSS Pengadaan Barang/Jasa (9)	15 Apr
DTSS Pengadaan Barang/Jasa (10)	2 – 13 Apr
DTSS Pengadaan Barang/Jasa (11)	2 – 13 Apr
DTSS Pengadaan Barang/Jasa (12)	3 – 14 Mei
DTSS Pengadaan Barang/Jasa (13)	3 – 14 Mei
DTSS Pengadaan Barang/Jasa (14)	17 – 28 Mei
DTSS Pengadaan Barang/Jasa (15)	17 – 28 Mei
DTSS Pengadaan Barang/Jasa (16)	17 – 28 Mei
DTSS Pengadaan Barang/Jasa (17)	29 Jun – 9 Jul
DTSS Pengadaan Barang/Jasa (18)	29 Jun – 9 Jul
DF Bendahara Pengeluaran (4)	9 – 24 Jun
DF Bendahara Pengeluaran (5)	9 – 24 Jun
DF Bendahara Pengeluaran (6)	13 Jun
DF Bendahara Pengeluaran (7)	13 Jun
DF Bendahara Pengeluaran (8)	13 Jun
DTSS Pelayanan Perbendaharaan pada KPPN (1)	18 – 6 Apr
DTSS Pembinaan Perbendaharaan pada Karwil DJPBN (1)	27 Apr – 14 Mei
DTSS Pembinaan Perbendaharaan pada Karwil DJPBN (2)	27 Apr – 14 Mei

Pusdiklat Keuangan Umum

DTU Analisis Jabatan	2 – 5 Apr
DTU Sekretaris Pimpinan	2 – 5 Apr
DTU Information Desk (Call Center)	2 – 5 Apr
DFP Pranata Komputer Ahli	2 Apr – 3 Mei
DTU <i>Business English</i>	9 – 13 Apr
DTU Desain Pengelolaan Database	9 – 13 Apr
DTU Manajemen SDM Tingkat Menengah	9 – 13 Apr
DTU Training of Trainer	9 – 13 Apr
DTU Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai	9 – 13 Apr
<i>Blended Learning On Science and Policy Of Climate</i>	11 Apr – 1 Jul
DTU Toefl PBT Preparation	9 – 27 Apr
DTSS Perusahaan Pembiayaan	16 – 20 Apr
DTU Analisis Beban Kerja	16 – 20 Apr
DTU Toefl PBT Preparation	16 Apr – 4 Mei
DTU Kearsipan Dinamis	23 – 26 Apr
DTU Manajemen Risiko	23 – 27 Apr
DTU Balance Scorecard	7 – 11 Mei
DTU Tata Naskah Dinas	23 – 27 Apr
TOT Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai	23 – 27 Apr
DTU Microsoft Office 2010 Tingkat Lanjutan	23 Apr – 1 Mei
DTSS Teknik Intelijen (Dasar)	23 Apr – 4 Mei
DTU Control Self Assessment (CSA)	30 Apr – 4 Mei
DTU Akuntansi Berbasis PSAK Konvergensi IFRS	30 Apr – 4 Mei
DTU Analisis Jabatan	1 – 4 Mei
DTU Free Open Source Software	7 – 11 Mei
DTU Manajemen Risiko	7 – 11 Mei
DTU Penyusunan SOP	7 – 11 Mei
DTU Peningkatan Implementasi Pengendalian Internal	4 – 8 Jun
DTU Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai	7 – 11 Mei
Diklat Persiapan Purnabhakti	7 – 11 Mei
DTU General English	7 – 29 Mei
DTU Legal English	14 – 16 Mei
DTU General English	14 Mei – 5 Jun
DTU Manajemen SDM Tingkat Lanjutan	15 – 16 Mei
DTU Pengelolaan Website Dinamis (E-Learning)	18 – 29 Mei
DTU Ms. Office 2007 Advanced	21 – 29 Mei
DTU Pemrograman Web dengan ASP	21 – 25 Mei
DTU Knowledge Management untuk Organisasi	21 – 25 Mei
DTSS Psikologi Audit	22 – 25 Mei
DTU Business English	28 Mei – 1 Jun
DTSS Teknik Investigasi Dasar	28 Mei – 13 Jun
DTU Toefl iBT Preparation	28 Mei – 29 Jun
DTU Manajemen Proyek Teknologi Informasi	4 – 8 Jun
DTU Akuntansi Berbasis PSAK Konvergensi IFRS	4 – 8 Jun
DTU <i>Training Of Trainer (TOT)</i>	4 – 8 Jun
DTU Ms. Office 2010 Menengah	4 – 12 Jun
DTU <i>Competency Profiling</i>	11 – 14 Jun
DTU Sekretaris Pimpinan	11 – 14 Jun
DTU Tata Kelola TIK	11 – 15 Jun
DTU Analisis Beban Kerja	11 – 15 Jun
DTU Tata Naskah Dinas	18 – 22 Jun
DTU Akuntansi Keuangan Syariah	18 – 22 Jun
DTU Ms. Office 2010 Lanjutan	18 – 26 Jun
DTU Toefl PBT Preparation	18 Jun – 6 Jul
DTU Sekretaris Pimpinan	25 – 28 Jun

Refleksi dan Gagasan Kebijakan Fiskal

OLEH : DRS. HOTMA DI HITA L. TOBING

"Ide Brilian tentang Kebijakan Fiskal"

Buku-buku Anggito Abimanyu selalu menarik untuk disimak. Walau isi buku REFLEKSI DAN GAGASAN KEBIJAKAN FISKAL ini telah dimuat di berbagai media massa dan dioalah kembali, namun ruh pemikirannya masih menarik untuk dijadikan pembelajaran. Buku ini masih menggambarkan fenomena dan analisis terkait kebijakan fiskal di Indonesia dari dua sisi, yakni aparat pemerintah dan akademisi. Oleh karena itu, analisis yang diberikan terasa obyektif dan mendalam. Meskipun pembahasannya terkesan terpisah satu sama lain.

Anggito Abimanyu adalah seorang intelektual ilmuwan yang mendharmabaktikan ilmunya bagi pelaksanaan tugasnya di Kementerian Keuangan dalam masa perkembangan ekonomi nasional, regional dan dunia yang penuh badai topan. Dalam masa pengabdian di Kemenkeu (2000-2010) Asia, ASEAN dan Indonesia mengalami goncangan krisis ekonomi keuangan yang besar. Dalam gejolak krisis ekonomi inilah Anggito menumbuh mengembangkan berbagai alasan yang brilian. Salah satu gagasan yang sangat menarik adalah "Model Pemantauan Dini Perekonomian" yang melalui presentasi komputer "dashboard" setiap waktu memberi sinyal tentang arah perkembangan pasar dan kondisi riil ekonomi Indonesia dalam *setting* dunia.

Buku yang terbagi dalam 6 bagian dengan topik: reformasi birokrasi dan ekonomi politik, masalah risiko fiskal, dukungan perpajakan pada sektor riil, anggaran dan pemberantasan korupsi, sektor keuangan beserta privatisasi dan utang serta ekonomi global dan integrasi keuangan. Kemudian semua topik tersebut bermuara pada kebijakan fiskal untuk mendorong perbaikan perekonomian nasional.

"Pemerintah dan DPR merupakan dua institusi pembuat dan pembentuk Undang-Undang. Agar dapat mencapai tujuan bersama, maka kedua institusi tersebut harus bekerja secara harmonis meskipun berbeda fungsi," jelas Anggito. Walaupun Pemerintah dan DPR harus membangun hubungan yang harmonis dan profesional, keduanya tetap harus menjaga etika dan kesantunan. Tidak ada maksud sembunyi dibalikinya. Di sini Anggito memaparkan hubungan antara Pemerintah dan DPR melalui pengalamannya selama berbakti di dalam pemerintahan. Tujuan pembentukan undang-undang adalah untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka kedua instansi yang berbeda fungsi tersebut harus bekerja secara harmonis dan berjalan satu tujuan. Pemerintah merencanakan kebijakan dan menganggarkan kebijakan dan anggaran, dan jika disetujui, kemudian pemerintah melak-

sanakan kebijakan dan DPR mengawasi sesuai dengan Undang-Undang. Anggito berharap, ada baiknya pemerintah dan DPR teliti dan jernih serta obyektif melihat persoalannya. Hubungan harmonis yang berjarak antara Pemerintah dan DPR harus dilakukan dengan kejujuran dan saling percaya, serta tidak ada syak wasangka satu sama lain.

Dalam tulisan lainnya Anggito juga membahas tentang Risiko fiskal: inflasi, capital inflow, subsidi BBM dan listrik, tentang pergerakan indikator pasar, baik pasar uang, pasar modal maupun pasar komoditas dunia dimana akhir-akhir ini tampak semakin tidak menentu. Kadang-kadang naik tetapi tiba-tiba jatuh. Apalagi sejak adanya krisis global tahun 2008, mulai dari krisis subprime kemudian krisis keuangan, krisis fiskal, krisis utang dan krisis komoditas, kecepatan gerakan naik turun yang masih belum memperlihatkan tanda-tanda mereda.

Risiko fiskal lainnya adalah masalah tuntutan hukum kepada pemerintah jika muncul dan belum dianggarkan dalam APBN, keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional yang pada umumnya menggunakan sistem *callable fund*. Risiko tersebut muncul apabila terdapat tagihan yang muncul dari lembaga internasional dan belum mendapat alokasi anggaran. Risiko yang akhir-akhir ini muncul cukup sering adalah risiko bencana alam.

Judul : **Refleksi dan Gagasan Kebijakan Fiskal**
 ISBN / EAN : **9789792271034 / 9789792271034**
 Author : **Anggito Abimanyu**
 Publisher : **Gramedia Pustaka Utama (GPU)**
 Publish : **26 Mei 2011**
 Pages : **xviii + 274 halaman**
 Weight : **250 gram**
 Dimension (mm) : **140 x 210**

Risiko-risiko itu dapat dimitigasi dengan perencanaan APBN yang antisipatif dengan perkembangan ke depan apabila dilakukan desain pembuatan asuransi risiko. Sayang sekali karena skema asuransi risiko atau lindung nilai (*hedging*) tersebut belum mudah dicerna dan diterima oleh pengawas atau auditor.

Krakatau Steel dan PLN

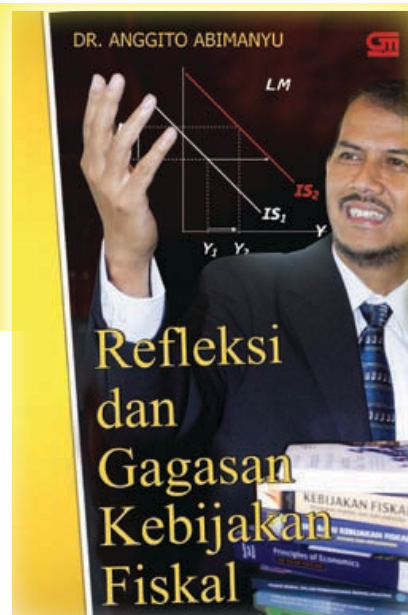
Anggito juga tak luput dari membahas tentang listrik. Kenaikan harga TDL akhirnya telah dilakukan oleh pemerintah pada 1 Juli 2010. Seperti kebijakan-kebijakan lainnya dalam masa pemerintahan SBY yang penuh kebimbangan dan keragu-raguan, kebijakan ini pun sempat maju-mundur dan tidak jelas pelaksanaannya hingga menimbulkan ketidakpastian. Namun yang perlu ditelisik lebih jauh adalah atas dasar apa pemerintah mengambil keputusan ini dan atas dasar keharusan apa opsi menaikkan harga listrik yang tentu membebani masyarakat tak bisa dihindarkan. Listrik merupakan industri yang vital, selalu menjadi tulang punggung input segala macam produksi yang lain, oleh karena itu keberlangsungan pasokan listrik di dalam negeri mutlak diperlukan. Tetapi pemerintah seyogyanya berpihak kepada hak dasar rakyat yakni ketersediaan listrik dengan biaya yang paling murah untuk dikonsumsi masyarakat. Listrik harus dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, bukan sebagian rakyat atau pengusaha besar dan tidak juga konsumen di luar negeri, tegas Anggito.

Pembahasan tentang saham pun melengkapi materi bahasan buku setebal 274 halaman ini. Khususnya dalam penawaran perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) Krakatau Steel (KS). Tata kelola dalam penerbitan yang

ketat dan rigid tersebut dimaksudkan untuk melindungi investor publik. Disarankan agar kita seyogyanya menunggu proses dan hasil IPO KS tersebut dan kita percayakan kepada pihak yang berkompeten yakni pemerintah, PT KS, Bapepam LK dan DPR serta auditor untuk menjalankan tugas masing-masing. Kedisiplinan dan kepercayaan sangat diperlukan dalam membangun institusi pasar modal yang kredibel dan professional.

Isu terbaru yang dibahas Anggito adalah divestasi Newmont antara lain mengusulkan agar divestasi sisa sebesar 7 persen dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal itu diyakini dapat memberikan manfaat publik yang lebih besar daripada divestasi oleh pemerintah daerah NTB. Namun demikian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah NTB perlu duduk bersama agar mendapatkan *win-win solution* khususnya bagi masyarakat NTB dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Masih banyak hal-hal penting lainnya dibahas dalam buku ini yang dianalisis secara objektif dan mendalam. Dalam kata pengantar, mantan Menteri Ling-



kungan Hidup : Emil Salim, mengatakan “Seorang intelektual sejati diharapkan untuk bekerja tidak hanya dengan otak, ilmu dan keahliannya, tetapi lebih-lebih dengan hati nuraninya untuk kepentingan seluruh masyarakat. Anggito telah memberi sumbangan berharga dalam mengembangkan kebijakan keuangan, baik tataran nasional, regional ASEAN maupun internasional melalui G-20. Banyak gagasan Anggito belum selesai dan masih harus dituntaskan”

*Penulis adalah PNS di Jakarta dan alumni SMEAN₃ Medan, berdomisili di Tangerang

“Membaca buku Dr. Anggito Abimanyu bukan hanya membaca buku ekonomi dan teori, tetapi lebih jauh lagi, seperti mengalami dan mendalami kebijakan ekonomi yang hidup dengan seluk-beluk fakta ekonomi politik yang dinamis, rumit dan sesekali sengit. Pembaca akan menyerap pemikiran teoretis sekaligus pengalaman berharga Penulis sebagai pengambil keputusan (decision maker) di dalam kancah kebijakan ekonomi. Buku ini adalah refleksi nyata dari pengalaman selama lebih dari sepuluh tahun menyangkut kebijakan penting di negeri ini, seperti reformasi birokrasi, masalah risiko fiskal, sektor riil dan integrasi dengan ekonomi global, masalah anggaran dan korupsi. Dengan membaca buku ini kita menjadi kaya karena pikiran kita bisa mendalami kebijakan orang yang mengalaminya.”

Didik J. Rachbini

*Guru Besar Ilmu Ekonomi, Pengajar pada Universitas Mercu Buana dan Pasca Sarjana UI, Anggota DPR RI 2004-2009

KangEdu

Pelayanan Prima

Oleh : Bimo



BPPK JANGAN SEMPETI INI YA...!!





Seminar Optimalisasi Penyerapan APBN bagi
Kementerian/Lembaga





Penandatanganan MOU BPPK - LPEI

STOP!
KORUPSI





Balai Diklat Keuangan Yogyakarta

EDUKASI

K E U A N G A N

EDISI 10/2012

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Telp: +62 21 7394666, 7244873

Fax: +62 21 7261775

<http://www.bppk.depkeu.go.id>